

MODEL PEMBELAJARAN PKn DI SMP BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Prof. Dr. Bambang Sumardjoko



Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Model Pembelajaran PKN di SMP Berbasis Kearifan Lokal
ISBN 978-602-72165-2-5
Cetakan Pertama, Maret 2015
x + 214, 14,8 X 21 cm

MODEL PEMBELAJARAN PKN DI SMP BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Penulis:
Bambang Sumardjoko, Prof. Dr.

Layout dan desain cover : Tim CV. Jasmine

Penerbit:
CV. Jasmine
Penerbit, Percetakan, Perdagangan Umum
Gumpang Agung III No. C.5, RT 12/III,
Gumpang, Kartasura, Sukoharjo
Telp/Fax: 0271-7894363/7881989
Email: jasminesolooke@gmail.com

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, termasuk fotocopy, microfilm, dan cetak tanpa izin penerbit.

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulisan buku yang berjudul 'Model Pembelajaran PKn di SMP Berbasis Kearifan Lokal' ini dapat diselesaikan dan sampai di tangan para pembaca. Materi buku ini sebagian besar merupakan hasil dari penelitian selama dua tahun yang dibeayai oleh Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Wilayah VI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Penulisan buku ini sebagai media penyebarluasan gagasan dan ide sekaligus media publikasi hasil penelitian tentang Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah Menengah Pertama Kota Surakarta Berbasis Kearifan Lokal sebagai Strategi Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila untuk Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa. Penulisan buku ini juga dimaksudkan memberikan kemudahan bagi para guru, para mahasiswa calon guru bidang studi PKn, dan para pembaca pada umumnya yang berminat untuk mendalami dan mengembangkan pembelajaran PKn. Akhirnya melalui buku ini diharapkan proses pembelajaran PKn menjadi lebih bervariasi dan inovatif serta makin meningkat kualitasnya.

Buku ini tersusun menjadi delapan bab. Bab I, tentang pendahuluan yang menguraikan masalah latar belakang, tujuan penulisan, dan metode yang digunakan. Bab II, berisi tentang konsep, pengertian dan ruang lingkup, serta tujuan pembelajaran PKn. Bab III membicarakan tentang kearifan lokal

budaya jawa, yang meliputi pengertian dan fungsi kearifan lokal, kebudayaan Jawa, serta karakter dan jati diri bangsa. Bab IV membahas tentang revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Bab V menyajikan bahasan tentang pembelajaran PKn yang diharapkan. Bab VI tentang uji implementasi model. Bab VII tentang uji efektivitas model, dan Bab VIII tentang pengembangan model pembelajaran ('Mobel PKn Berkelok')

Terselesaikannya buku ini tidak lepas dari peran dan sumbangsih yang telah diberikan oleh berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada berbagai pihak.

1. Koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah yang telah menyetujui usulan dan memberikan dana pada penulis untuk kegiatan penelitian selama dua tahun.
2. Agus Ulinuha, Ph.D., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memproses ajuan penelitian ke kantor Kopertis wilayah VI, memberikan bimbingan selama penyusunan laporan dan penulisan buku ini.
3. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, Dekan FKIP - UMS yang terus menerus memberikan motivasi, perhatian, dan bantuan baik secara pribadi maupun kelembagaan sehingga penulisan buku ini selesai dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
4. Drs. Ahmad Muhibbin, M.Si, Ketua Program Studi beserta rekan sejawat di Program Studi PKn FKIP UMS yang telah memberikan dukungan dan saran yang cukup konstruktif sehingga buku ini dapat diselesaikan sebagaimana yang direncanakan.

5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, baik langsung maupun tidak langsung yang telah mengilhami, memberikan masukan, dan bantuan pada penulis untuk menyelesaikan penyusunan buku ini.

Atas bimbingan dan sumbangsih yang telah diberikan, secara lahiriyah penulis merasa tidak dapat membalasnya. Namun penulis berdoa, semoga Allah S.W.T. berkenan memberikan balasan dan rahmat-Nya yang lebih banyak atas kebaikan yang telah diberikan.

Akhirnya, menyadari kemungkinan masih ditemukannya kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan buku ini maka tanggapan, kritik, dan saran sebagai masukan untuk perbaikan di masa mendatang sangatlah diharapkan. Semoga buku ini bermanfaat adanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

Surakarta, 2 Maret 2015

Penulis,

ttd

Bambang Sumardjoko

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

Dalam lintasan sejarah panjang pembelajaran PKn telah mengalami gelombang perubahan yang amat luar biasa. Pembelajaran yang pada awalnya didesain untuk menanamkan nilai-nilai moral, berkembang menjadi perpaduan antara penanaman nilai-nilai moral dalam Pancasila dengan semangat kewarganegaraan bela negara, bergeser menjadi pembelajaran yang bukan hanya sekadar menanamkan nilai-nilai dalam Pancasila tetapi sudah merupakan perpaduan antara penghayatan yang dibumikan melalui pengamalan dalam kehidupan bermasyarakat (*learning to live together*).

Oleh sebab itulah PKn menjadi mata pelajaran yang wajib diberikan di sekolah sejak dari jenjang Sekolah Dasar s.d Sekolah Menengah Atas. Dan merupakan mata kuliah wajib yang diberikan di Perguruan Tinggi sesuai dengan amanah UU Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012. Hal ini menggambarkan bahwa PKn bukan saja diorientasikan kepada hasil sesaat yang berujung pada nilai akhir. Lebih dari itu, pembelajaran PKn lebih menitikberatkan pada proses secara berjenjang dan berkelanjutan dalam kerangka pembentukan jati diri sebagai warga bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan identitas nasional, polstranas, demokrasi, HAM, geopolitik, geostrategik, geoekonomi, geososial, geokultural, dan geomultikultural.

Disusunnya buku yang berjudul *Model Pembelajaran PKn di SMP berbasis Kearifan Lokal* oleh Prof. Dr. Bambang Sumardjoko ini menawarkan model pembelajaran PKn yang disesuaikan dengan berubah dan berkembangnya kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuknya adalah pentingnya mengaitkan dan mendekatkan pembelajaran PKn dengan

kearifan lokal dalam kerangka pembentukan jati diri dan karakter bangsa. Model ini amatlah penting dan mendasar sebagai upaya untuk merevitalisasi nilai-nilai dalam Pancasila sebagaimana diuraikan dalam buku ini.

Menariknya lagi, buku ini juga membahas bahwa pembelajaran PKn di SMP pada dasarnya tidak cukup jika hanya dilakukan secara instan (jw: *njujug*) dan linear. Pembelajaran PKn perlu dilakukan secara *berkelok*. Liku-liku dan tahapan pembelajaran *berkelok* ini menarik untuk dibaca dan telah dipaparkan secara memadai dalam buku ini.

Oleh sebab itu, meskipun buku ini diproyeksikan bagi guru-guru dan peserta didik tingkat SMP, namun sesungguhnya juga wajib dibaca bagi dosen, orang tua, dan masyarakat luas sebagai bentuk penghayatan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan suatu proses yang berujung pada kebaikan dan kemaslahatan umat manusia.

Selamat membaca, menghayati, dan mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat dalam arti luas.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

Surakarta, 2 Maret 2015

Prof. Dr. Harun Joko Prayitno
Dekan FKIP UMS

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PRAKATA	iii
KATA SAMBUTAN	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Penelitian yang Relevan.....	8
C. Tujuan Penulisan	10
D. Metode yang Digunakan	11
E. Bagan Kerangka Berfikir.....	14
BAB 2 KONSEP PEMBELAJARAN PKn	15
A. Konsepsi Model Pembelajaran.....	15
B. Pengertian PKn	28
C. Tujuan dan Ruang Lingkup PKn	33
BAB 3 KEARIFAN LOKAL BUDAYA JAWA	41
A. Pengertian Kearifan Lokal	41
B. Fungsi Kearifan Lokal	44
C. Kebudayaan Jawa	47
D. Kearifan Lokal dan Nilai Budaya	50
E. Karakter dan Jati Diri Bangsa.....	61
BAB 4 REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA.....	74
A. Revitalisasi	74

B. Hakikat Pancasila	76
C. Nilai-nilai Pancasila	85
BAB 5 PEMBELAJARAN PKn YANG DIHARAPKAN	94
A. Pembelajaran PKn sebagai Media Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila	44
B. Draft Model Pembelajaran PKn Berbasis Kearifan Lokal ('Mobel PKn Berkelok')	107
BAB 6 PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PKn 'BERKELOK' ...	125
A. Uji Kelompok Kecil (Uji Terbatas)	125
B. Uji Kelompok Besar (Uji Luas)	136
BAB 7 UJI EFEKTIVITAS 'MOBEL PKn BERKELOK'	150
A. Deskripsi Uji Efektivitas	150
B. Hasil Uji Efektivitas Model di SMP Negeri 10	159
C. Hasil Uji Efektivitas Model di SMP Negeri 21	165
D. Validitas, Praktikabilitas, dan Efektivitas - 'Mobel PKn Berkelok'	171
BAB 8 PENGEMBANGAN 'MOBEL PKn BERKELOK'	175
A. Hasil Studi Pendahuluan	176
B. Pengembangan 'Mobel PKn Berkelok'	184
C. Efektivitas 'Mobel PKn Berkelok'	199
DAFTAR PUSTAKA	208

Bab 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan kompetensi dan pembentukan watak, karakter, serta peradaban bangsa dilakukan melalui pendidikan yang terencana dan sistematis. Setiap anak bangsa melalui pendidikan diharapkan menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Selanjutnya salah satu instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut adalah dengan

menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Kewarga-negaraan (PKn) mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

PKn sebagai instrumen pelaksana pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui penyelenggaraan PKn diharapkan terbentuk watak warga negara yang mengetahui, menyadari, dan bersedia melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan UUD tahun 1945. PKn pada hakikatnya suatu pendidikan yang mengarahkan terbentuknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai dan dasar negara Pancasila. Dengan demikian PKn merupakan praktek pendidikan Pancasila.

Secara epistemologis, PKn sebagai suatu sistem pengetahuan yang terintegrasi memiliki misi menumbuhkan potensi peserta didik agar memiliki "*civic intelligence*", "*civic participation*", dan "*civic responsibility*" sebagai warga negara Indonesia dalam konteks watak dan peradaban bangsa Indonesia yang ber-Pancasila (Winatapura, 2001). Di Indonesia kerangka sistemik PKn dibangun atas dasar paradigma bahwa pembelajaran Pkn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Kemudian secara teoretik, PKn dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, kon-

sep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, serta bela negara. Adapun secara programatik, PKn dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari (Budimansyah, 2008: 24).

Dalam praktik pendidikan selama ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional telah mengalami degradasi yang cukup mengawatirkan, nilai-nilai kearifan lokal yang bisa digunakan sebagai materi pembentukan kepribadian Indonesia tergerus oleh arus pendidikan global. Kondisi semacam itu berakibat pada menipisnya tatakrama, etika, dan kreativitas anak bangsa. Dunia pendidikan dianggap tidak mampu melahirkan lulusan yang berkualitas, yakni manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana cita-cita luhur bangsa yang diamanatkan dalam undang-undang pendidikan Nasional. Merosotnya nilai-nilai moralitas dalam tata kehidupan kolektif sebagai bangsa juga disebabkan karena mengendornya pemahaman dan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila. Pada hal harus dimaklumi bahwa suatu kesadaran kolektif ini merupakan modal dasar, modal sosial, serta *character and nation building* guna memperkokoh integrasi bangsa.

Karakter warganegara Indonesia yang hendak dibentuk dipengaruhi oleh kepentingan hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan jamannya. Cerminan dari karakter warganegara Indonesia tampak dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Menurut Budimansyah (2008), dari sejumlah kompetensi yang

diperlukan maka yang terpenting adalah penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu, pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris, pengembangan karakter dan sikap mental tertentu, serta komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional. Berdasarkan kompetensi tersebut maka pada hakikatnya terdapat tiga komponen utama yang perlu dipelajari dalam PKn, yaitu pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan watak kewarganegaraan.

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan substansi materi yang harus diketahui oleh siswa sebagai warganegara. Pada prinsipnya, pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap warganegara adalah mengenai hak dan kewajibannya sebagai warganegara. Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) adalah keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang dimiliki tersebut menjadi sesuatu yang bermakna karena keterampilan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterampilan kewarganegaraan ini mencakup keterampilan intelektual (*intelektual skills*) dan keterampilan partisipasi (*participation skills*). Kemudian, watak kewarganegaraan (*civic disposition*) merupakan sikap dan kebiasaan berpikir warganegara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi.

Merujuk pada deskripsi penjabaran di atas maka dapat dinyatakan bahwa misi PKn sebagai pendidikan karakter bertujuan mempersiapkan para peserta didik sebagai warga

negara yang cerdas dan baik (*to be smart dan good citizen*), yakni menguasai pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan nilai yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Namun, kajian tentang PKn untuk membentuk warga negara yang baik selalu menimbulkan kerumitan. *Pertama*, PKn selalu bersentuhan dengan kepentingan politik kenegaraan sehingga rentan untuk dimanfaatkan sebagai alat mempertahankan kepentingan kekuasaan suatu rezim politik. *Kedua*, konsep kewarganegaraan berkaitan dengan atribut "baik" dari seorang warga negara, hal ini berarti mengandaikan perlunya wilayah kajian etika (filsafat moral) kenegaraan. *Ketiga*, PKn tidak hanya mengajarkan hak-hak dan kewajiban warga negara terhadap negara tetapi juga membangun seorang warga negara yang berpartisipasi aktif, yakni seseorang yang tidak hanya menjadi "warga negara yang baik" tetapi juga menjadi "warga negara yang aktif".

Dalam sisi lain, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya gejala keinginan untuk menolak pembelajaran PKn yang semata-mata menampilkan nilai-nilai moral. Pembelajaran PKn dianggap kehilangan karakteristik akademisnya karena tidak terdapatnya teori-teori keilmuan yang cukup memadai. Model pembelajaran PKn dinilai lebih menekankan kepentingan rezim politik dengan materi yang tidak menarik dan formalistik. Proses pembelajaran tidak mendorong kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Hal ini bisa terjadi karena materi yang diajarkan cenderung verbalistik atas nilai-nilai moral Pancasila sebagai *civic virtues* dan model pembelajarannya

cenderung berbentuk hafalan kognitif sehingga menimbulkan kejenuhan (Samsuri, 2010).

Melalui analisis SWOT (analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) terhadap pembelajaran PKn yang berlangsung saat ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, kekuatan pembelajaran PKn. Hal-hal yang menjadi kekuatan dalam pembelajaran PKn adalah (1) adanya dukungan Pemerintah, Dinas Pendidikan, dan Sekolah dalam implementasinya, (2) ditetapkannya PKn sebagai mata pelajaran wajib di pendidikan dasar dan menengah, (3) adanya Komitmen tinggi dari sekolah dan Guru untuk melaksanakan pembelajaran PKn, (4) adanya MGMP pembelajaran PKn, (5) PKn sebagai pendidikan Pancasila dalam praktek, (6) adanya kemauan guru melakukan berbagai variasi metode mengajar, (7) adanya ketegasan guru dalam menegakkan disiplin, (8) adanya kemauan guru untuk meningkatkan profesionalisme, (9) adanya kemauan guru mengikuti perkembangan pembelajaran PKn, dan (10) adanya kemauan guru menjadi *role model* dan menunjukkan tokoh-tokoh yang dapat menjadi panutan.

Kedua, kelemahan pembelajaran PKn selama ini antara lain adalah (1) rentan untuk dimanfaatkan sebagai alat mempertahankan kepentingan kekuasaan suatu rezim politik, (2) materi pembelajarannya tidak menarik dan formalistik, (3) konsep kewarganegaraan berkaitan dengan atribut "baik" dari seorang warga negara yang juga berarti mengandaikan perlunya wilayah kajian etika kenegaraan, (4) semata-mata menampilkan nilai moral, (5) kehilangan karakteristik akademisnya karena tidak terdapatnya teori-teori keilmuan yang cukup memadai, (6)

proses pembelajarannya cenderung verbalistik atas nilai-nilai moral Pancasila sebagai *civic virtues*, (7) pembelajarannya cenderung hafalan kognitif, (8) proses pembelajaran menimbulkan kejenuhan, karena materi yang diajarkan cenderung monoton, teoretik, dan kognitif.

Ketiga, peluang dalam pembelajaran PKn agar inovatif antara lain adalah (1) proses pembelajarannya dapat dilakukan dengan belajar sambil berbuat (*learning by doing*), belajar memecahkan masalah sosial, belajar melalui pelibatan sosial, belajar melalui pembiasaan serta interaksi sosial-kultural, belajar melalui interaksi sosial-kultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat, (2) materi *content informal* dalam PKn yang bersifat kontekstual dapat dikembangkan sesuai dengan realitas sosial budaya peserta didik, (3) misi PKn sebagai pendidikan karakter untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik, (4) tujuan PKn menjadi warga negara yang baik dan aktif, serta (5) nilai-nilai Pancasila berasal dari budaya bangsa. *Keempat*, ancaman terhadap pembelajaran PKn adalah (1) adanya globalisasi yang berdampak pada homogenitas budaya, (2) menurunnya etika sopan santun dan kuatnya budaya kekerasan, (3) kurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lokal, (4) menurunnya implementasi nilai-nilai Pancasila, dan (5) pudarnya jati diri bangsa Indonesia sebagai dampak pengaruh budaya global.

Mencermati berbagai kekuatan dan peluang serta mempertimbangkan berbagai kelemahan dan ancaman pembelajaran PKn relevansinya dengan implementasi nilai-nilai Pancasila maka sudah semestinya apabila dilakukan revitalisasi pembe-

lajaran PKn sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan karakter bangsa. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan pengembangan model pembelajaran PKn di sekolah yang berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk penguatan karakter dan jati diri bangsa.

Berdasarkan maksud dan tujuan utama tersebut di atas maka permasalahan yang dikemukakan untuk dijawab secara tuntas adalah (1) bagaimanakah bentuk awal model pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk penguatan karakter dan jati diri Bangsa? (2) seperti apa desain hasil pengembangan model pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk penguatan karakter dan jati diri Bangsa, dengan penekanan pada bagaimana hasil uji validasi model pembelajaran PKn oleh tim ahli dan bagaimana deskripsi model pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal. Pertanyaan selanjutnya (3) adalah bagaimanakah efektivitas model pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk penguatan karakter dan jati diri Bangsa?

B. Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian Alexon dan Sukmadinata (2010) tentang "Pengembangan Model Pembelajaran Terpadu Berbasis Budaya (MPTBB) untuk meningkatkan Apresiasi Siswa terhadap Budaya Lokal (Studi pada Mata Pelajaran IPS Sekolah Dasar)" menemukan kesimpulan bahwa MPTBB terbukti secara signifikan

lebih efektif meningkatkan apresiasi siswa terhadap budaya lokal simultan dengan penguasaan materi pelajaran bila dibandingkan dengan model pembelajaran yang selama ini digunakan guru.

Penelitian Nurul Zuriah (2010), PKn-FKIP-Universitas Muhammadiyah Malang tentang “Model Pengembangan PKn Multikultural Berbasis Kearifan Lokal (MBKL) dalam Fenomena Sosial Pasca Reformasi di Perguruan Tinggi”. Penelitian Nurul menunjukkan bahwa (1) Pengembangan PKn multikultural menjadi kebutuhan bangsa Indonesia yang majemuk dan beranekaragam serta menjadi sebuah keniscayaan bagi wahana desimnensi pemahaman multikulturalisme melalui jargon pendidikan multikultural. (2) Substansi materi pembelajaran identitas nasional cocok untuk pengembangan nilai-nilai multikulturalisme dan penumbuhan identitas budaya bangsa yang bersumber dari budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. (3) Proses atau modus pembelajaran yang berupa sintaks model pembelajaran inkuiri sosial dituangkan dalam ikhtisar model pengembangan PKn MBKL di perguruan tinggi ke dalam enam langkah dan pembelajarannya dilakukan secara berkelompok dengan tugas/resitasi. (4) Hasil uji coba menunjukkan terjadinya peningkatan produk hasil pembelajaran, berupa peningkatan kompetensi multikultural di kalangan mahasiswa. Secara substansial hasil ini menunjukkan bahwa PKn MBKL efektif untuk meningkatkan kompetensi multikultural mahasiswa. Di samping itu penerapan PKn MBKL juga memberikan pengaruh positif terhadap aktivitas, motivasi belajar, dan dampak pengiring lainnya dalam sebuah model proyek belajar

kewarganegaraan melalui “*Procit Bhinneka Tunggal Ika*” di perguruan tinggi.

Hasil penelitian tentang “Efektivitas Model Pembelajaran Sains Berbasis Budaya Lokal untuk Mengembangkan Kompetensi Dasar Sains dan Nilai Kearifan Lokal di SMP” oleh I Wayan Suastra dan Ketut Tika (2011), FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha menunjukkan adanya (1) perbedaan kompetensi dasar sains siswa antara yang belajar dengan model pembelajaran berbasis budaya dan model regular, 2) perbedaan prestasi belajar sains siswa antara yang belajar dengan model pembelajaran berbasis budaya dan model regular, 3) perbedaan kinerja ilmiah siswa antara yang belajar dengan model pembelajaran berbasis budaya dan model regular. Berbagai temuan penelitian tersebut di atas dapat digunakan sebagai acuan dan sebagai bahan kajian serta komparasi terhadap hasil penelitian tentang model pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal yang akan dilakukan.

C. Tujuan Penulisan

Secara umum penulisan buku ini dimaksudkan untuk mempublikasikan hasil penelitian tentang model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk penguatan karakter dan jati diri Bangsa. Adapun secara khusus, tujuan penulisan buku ini mendeskripsikan tentang (1) bentuk awal model pembelajaran, (2) pengembangan model pembelajaran, dan (3) hasil uji efektivitas model pembelajaran PKn di SMP

berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan karakter dan jati diri Bangsa.

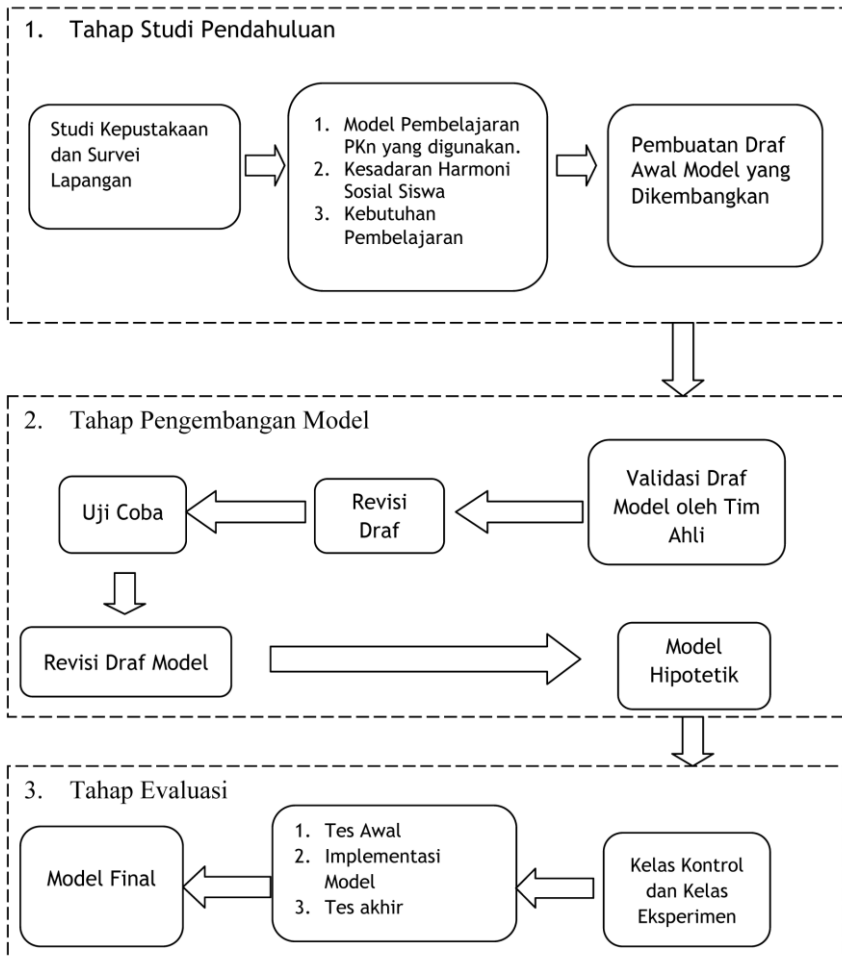
Melalui buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya (1) FKIP UMS, dalam meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi, khususnya Program Studi PKn dengan Kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Surakarta dalam rangka kesamaan tanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. (2) Bagi Sekolah, materi ini diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk penguatan karakter dan jati diri Bangsa secara lebih menarik. (3) Bagi guru-guru PKn di SMP, materi ini diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan dan menyediakan pembelajaran PKn di SMP yang menarik. (4) Adapun secara keilmuan, buku ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan model pembelajaran PKn di SMP dan sebagai salah satu bentuk inovasi yang dihasilkan dari sebuah penelitian yang menghasilkan luaran berupa model pembelajaran PKn di SMP berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk penguatan karakter dan jati diri Bangsa.

D. Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan adalah penelitian pengembangan, yakni suatu penelitian yang berorientasi pada pengembangan suatu produk yang proses pengembangannya dideskripsikan secara cermat dan teliti serta produk yang diperoleh dievaluasi secara tuntas. Produk yang dikehendaki dalam penelitian

adalah sebuah model pembelajaran PKN di SMP berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk penguatan karakter dan jati diri Bangsa. Pendekatan penelitian dan pengembangan dipandang tepat digunakan karena tujuan penelitian adalah mengembangkan model pembelajaran PKN berbasis kearifan lokal sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata di SMP Surakarta. Pendekatan ini memiliki keunggulan, terutama jika dilihat dari prosedur kerjanya yang sangat memperhatikan pada kebutuhan dan situasi nyata di sekolah, sistematis, dan bersifat siklis. Prosedur penelitian merupakan suatu penelitian intensif yang bersifat pengembangan (*research and development*), yakni suatu penelitian yang ditindaklanjuti dengan pengembangan melalui proses studi lapangan, pengembangan desain model, ujicoba desain model dan validasi model dalam suatu siklus yang sistematis.

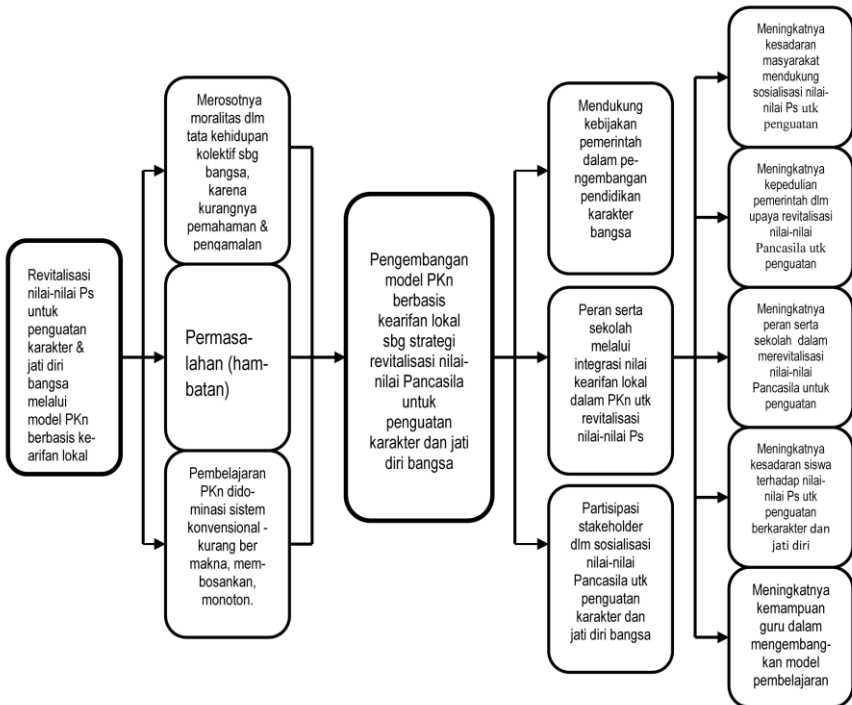
Lokasi penelitian di SMP Negeri Kota Surakarta. Sumber data diperoleh dari para informan, yakni: guru, siswa, kepala sekolah, dan para ahli, dari dokumen yang ada, serta dari tempat dan peristiwa. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yakni: wawancara mendalam, pengamatan, analisis isi atau metode simak, dan diskusi kelompok terarah. Tahapan penelitian pengembangan model pembelajaran PKN di SMP berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk penguatan karakter dan jati diri Bangsa dapat dilihat dalam bagan berikut.



Bagan 1: Tahapan Penelitian Pengembangan

E. Bagan Kerangka Berfikir

Kerangka pikir dalam penelitian pengembangan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk penguatan karakter dan jati diri Bangsa adalah sebagai berikut.



Bagan 2: Kerangka Pikir Pengembangan Model Pembelajaran PKn ‘Berkelok’

Bab 2

KONSEP PEMBELAJARAN PKn

A. Konsepsi Model Pembelajaran

Model pembelajaran menurut Eggen (1995) dimaksudkan sebagai strategi pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Arends (1997) suatu model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan diterapkan pada lingkungan pembelajaran dan manajemen kelas. Masih menurut Arends, terdapat empat ciri khas model pembelajaran, yaitu (1) rasional teoretis yang bersifat logis yang bersumber dari perancangannya, (2) dasar pemikiran tentang tugas pembelajaran yang hendak dicapai dan bagaimana peserta didik belajar untuk mencapai tujuan, (3) aktivitas mengajar guru yang diperlukan agar model pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif, dan (4) lingkungan belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Bell (1981) menyatakan "*a teaching or learning model is a generalized instructional process wich may be used for many different in a variety of subjects*". Penjelasan ini menunjukkan bahwa suatu model pembelajaran secara umum dapat diterap-

kan pada berbagai disiplin/mata pelajaran. Namun tidak berarti bahwa suatu model pembelajaran cocok untuk setiap topik dalam suatu mata pelajaran. Model pembelajaran menurut Joyce, Weil, dan Calhoun (2000) adalah “...a plan of pattern that can be used to shape curriculums (longterm course of studies) to design instructional materials, and to guide instruction in the classroom and other setting” (suatu rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelas dalam latar pengajaran ataupun latar lainnya). Ditegaskan lebih lanjut bahwa “Models of teaching are really models of learning. As we help students acquire information, ideas, skills, values, ways of thinking, and means of expressing themselves, we are also teaching them how to learn” (Model mengajar adalah pembelajaran yang sebenarnya, seperti membantu siswa memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai-nilai, cara berpikir, dan cara mengekspresikan diri, termasuk cara-cara mengajarkan mereka belajar). Ditegaskan oleh Eggen, Kauchak dan Harder (1979: 12), bahwa “A model cannot take the place of fundamental qualities in a teacher, such as knowledge of subject matter, creativity, and sensitivity to people. Rather it is a tool to help good teachers teach more effectively, by making their teaching more systematic and efficient. Models provide the flexibility to allow teachers to use their own creativity, just as the builder uses creativity in the construction...” (sebuah model tidak bisa menggantikan kualitas mendasar para guru, seperti pengetahuan tentang materi pelajaran, kreativitas, dan kepekaan terhadap orang. Justru itu

adalah alat untuk membantu guru mengajar lebih baik dan efektif, dengan membuat pengajaran mereka lebih sistematis dan efisien. Model memberikan fleksibilitas untuk memungkinkan para guru menggunakan kreativitas mereka sendiri, seperti pembangun menggunakan kreativitas dalam pembangunan).

Pada setiap model pembelajaran memperhatikan *syntax*, *social system*, *principles of reaction*, *support system*, dan *nurturant effect* (Joyce, Weil, dan Calhoun, 2000). *Syntax* adalah urutan kegiatan pembelajaran dari tahap awal hingga akhir pembelajaran. *Social system* adalah gambaran peranan dan hubungan guru dengan murid serta norma yang mengikat di kelas. *Principles of reaction* merupakan prinsip-prinsip reaksi, cara bagaimana memperhatikan peserta didik, memberikan penghargaan dan merespon peserta didik. *Support system* adalah segala sesuatu yang dapat membantu terlaksananya tujuan, misalnya dengan mengusahakan sumber-sumber belajar atau perpustakaan. *Nurturant effect* merupakan hasil sampingan atau hasil tidak langsung dari pembelajaran dengan menggunakan model tertentu.

Joyce, Weil, dan Calhoun (2000) telah mengembangkan model-model pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, kebalikan dengan model konservatif yang berpusat pada guru. Gagasan-gagasan dan keterampilan berpikir peserta didik dalam model pembelajaran dikembangkan sejalan dengan pandangan UNESCO (1996) tentang *learning thought life*, berarti tumbuh kesadarannya tentang makna belajar. Model pembelajaran dimaksud terdiri dari empat rumpun, yaitu *the social family models*, *the infor-*

mation-processing family models, the personal family models, and the behavioral models.

Model pembelajaran memiliki makna yang lebih luas daripada strategi, metode atau prosedur. Model pembelajaran memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode atau prosedur. Ciri tersebut ialah (1) rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta dan pengembangnya, (2) landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar (tujuan pembelajaran yang akan dicapai), (3) tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan (4) lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat dicapai (Kardi dan Nur dalam Trianto, 2007:6).

Menurut Khabibah (2006), untuk melihat tingkat kelayakan suatu model pembelajaran dibutuhkan ahli dan praktisi untuk memvalidasi model pembelajaran yang dikembangkan. Adapun untuk aspek kepraktisan dan efektivitas diperlukan suatu perangkat pembelajaran untuk melaksanakan model pembelajaran yang dikembangkan. Dengan demikian, untuk melihat kedua aspek ini perlu dikembangkan suatu perangkat pembelajaran suatu topik tertentu yang sesuai dengan model pembelajaran yang dikembangkan. Selain itu, dikembangkan pula instrumen penelitian yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan (dalam Trianto, 2012: 25).

Model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk penguatan karakter dan jati diri Bangsa yang dikembangkan dalam penelitian mengacu pada model pembe-

lajaran yang dikemukakan Joice (2000) sebagaimana di atas. Selanjutnya model yang dikembangkan dengan tujuan untuk peningkatan karakter ini lebih menekankan pada perlunya perubahan tingkah laku ke arah yang diharapkan, baik perubahan dalam ranah kognitif maupun afektif. Di samping itu model pembelajaran juga bertujuan untuk penguatan karakter dan jati diri bangsa. Karena itu, model pembelajaran juga dikembangkan dengan pendekatan Klarifikasi Nilai dan Pembelajaran Kontekstual.

1. Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif (*cooperative learning*) bernaung dalam teori konstruktivis. Pembelajaran ini muncul dari sebuah konsep bahwa peserta didik akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya (Trianto, 2012: 56). Dalam pada itu, Lie menyatakan bahwa *cooperative learning* atau sistem pembelajaran gotong royong merupakan sistem pengajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bekerjasama dengan sesama peserta didik dalam tugas-tugas yang terstruktur (dalam Thobroni, A. & Arif, 2011: 286). Selanjutnya, Nurhadi berpendapat bahwa *cooperative learning* adalah pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi saling silih asuh (saling tenggang rasa) untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuhan. Hasil belajar yang diperoleh tidak hanya nilai-nilai akademis tetapi juga nilai-nilai moral dan budi pekerti berupa rasa tanggung jawab pribadi, rasa saling menghargai, membutuhkan,

memberi, dan menghargai keberadaan orang lain (Thobroni, A & Arif, 2011: 287).

Dari definisi di atas tercermin bahwa dalam pembelajaran kooperatif yang menjadi perhatian utama adalah kerja sama dalam membangun pengetahuan dimana peserta didik tidak hanya belajar materi ajar tetapi juga belajar keterampilan sosial berupa rasa tanggung jawab, saling menghargai, tenggang rasa, menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman dengan selalu menjaga keharmonisan dalam interaksi antar anggota kelompok. Melalui pembelajaran kooperatif peserta didik dilatih untuk hidup berdampingan dalam perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan Ibrahim (dalam Trianto, 2012: 59), bahwa tujuan pembelajaran kooperatif mencakup tiga jenis, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keberagaman, dan pengembangan keterampilan sosial.

Pembelajaran kooperatif diharapkan dapat meningkatkan relasi antar peserta didik yang memiliki latar belakang ras, kelompok etnik, dan kemampuan akademik yang berbeda-beda, serta mampu meningkatkan produktivitas mereka dalam pemecahan masalah (Huda, 2013: 289). Secara keseluruhan, hampir seluruh kajian yang membandingkan susunan kooperatif jauh lebih efektif dalam meningkatkan perkembangan personal, sosial, dan akademik peserta didik. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa strategi pembelajaran kooperatif berpotensi meningkatkan seluruh dimensi pembelajaran peserta didik (Joyce dkk, 2009: 77).

Menurut Nurhadi (2004:48) belajar kooperatif mengandung makna multi dimensi. Dalam belajar kooperatif ada makna *learning community*, *sharing ideas*, *discussion*, *service learning*, belajar kelompok, belajar kontekstual, sumber belajar, *problem-based learning*, *learning to be*, *learning to know*, *learning to do*, *learning how to live together*, *task-based learning*, *school-based learning*, dan ada juga *collaborative learning* (dalam Thobroni, A & Arif, 2011:286).

Dalam belajar kooperatif, peserta didik dibagi ke dalam kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang untuk bekerjasama dalam menguasai materi yang diberikan oleh guru (Trianto, 2012: 56). Dalam kelompok ini peserta didik secara aktif melakukan diskusi untuk memecahkan masalah yang menjadi tema pokok kajian mereka. Pembelajaran berdasarkan masalah dilandasi oleh teori belajar konstruktivis. Menurut Ormrod (2008:326) kegiatan pemecahan masalah adalah menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah ada untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab atau situasi yang sulit.

Pembelajaran kooperatif dalam penelitian ini mengandung makna *sharing ideas*, belajar kelompok, belajar kontekstual, *problem-based learning*, *learning how to live together*, dan diskusi kelompok. Dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik diorganisasikan dalam kelompok untuk melakukan diskusi, saling bertukar pikiran untuk menganalisis masalah-masalah sosial yang terjadi dewasa ini agar dapat mengambil nilai-nilai, norma-norma, dan moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat multibudaya di Indonesia. Melalui kegiatan belajar seperti ini, diharapkan peserta didik memperoleh

manfaat kognitif, sosial, dan motivasional. Mendiskusikan suatu topik dengan teman kelas dapat membantu peserta didik mendapatkan keterampilan interpersonal yang lebih efektif. Selain itu juga mendatangkan efek yang membangkitkan semangat bagi peserta didik serta menanamkan hasrat yang murni untuk memahami suatu topik secara lebih baik. Topik-topik kontroversial secara khusus dapat membangkitkan motivasi karena para peserta didik bisa lebih bersemangat memecahkan berbagai sudut pandang yang saling bertentangan, asalkan mereka dapat melakukan secara efektif tanpa mengasingkan teman-teman kelasnya (Chinn, 2006 dalam Ormrod, 2008: 326).

2. Model PBL (*Problem Based Learning*)

Model PBL dikembangkan oleh pemikir barat, antara lain John Dewey. Metode pembelajaran PBL yang mengenalkan dengan konsep mengenai pengajaran sistem proyek atau metode pemecahan masalah. Gagasan Dewey bertumpu pada dua hal, yaitu *pertama*, bahwa pembelajaran harus bertumpu pada pertimbangan psikologis, proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia anak didik, cara berpikir, dan cara kerjanya. *Kedua*, bahwa pembelajaran harus bertumpu pada tujuan pendidikan dan pengajaran, yaitu untuk kepentingan kemajuan masyarakat (Nata, 2009:247).

Desain pembelajaran model PBL menurut Nata (2009:248-249) adalah (1) peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, yang terdiri dari 5 sampai 6 orang, (2) setiap kelompok terdapat seorang ketua yang bertindak sebagai moderator

dan sekaligus juru bicara, seorang sekretaris yang bertindak sebagai pencatat dan perumus hasil pemecahan masalah, mereka juga merangkap sebagai anggota, (3) menentukan pokok masalah yang akan dipecahkan. Permasalahan tersebut harus mengandung isu-isu yang mengandung konflik, bersifat familier, mengandung kompetensi yang harus dimiliki oleh murid sesuai dengan kurikulum yang berlaku serta sesuai dengan minat murid, (4) guru meminta peserta didik dalam setiap kelompok tersebut untuk mendiskusikan pokok masalah tersebut sesuai dengan waktu yang tersedia, (5) berbagai kegiatan yang terdapat dalam kelompok antara lain: (a) mengumpulkan data dengan cara masing-masing kelompok bertukar pikiran, melakukan observasi, mempelajari berbagai sumber bacaan, mengakses internet dan inventarisasi data lainnya, (b) menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan cara mengkajinya dan mempertanyakan-nya, (c) menyusun hipotesis yang didasarkan pada hasil analisis data tersebut, (d) mengolah data untuk memperjelas pemecahan masalah, (e) menguji hipotesis, yaitu apakah hipotesis tersebut sudah merupakan jawaban yang tepat untuk masalah tersebut, (f) menarik kesimpulan yang berisi jawaban atas pemecahan masalah.

Model PBL ini juga dikembangkan dengan mengkaji materi mata pelajaran PKn tidak hanya pada sekitar materi ajar tetapi juga mengkaitkan dengan konteks nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat melihat dan menangkap nilai serta mengambil teladan yang penting dari kajian tersebut yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam mengaktualisasi nilai-nilai karakter. Model

pembelajaran yang dikembangkan juga mengandung pendidikan nilai atau moral.

Melalui pendidikan moral diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan moral. Menurut Borba (2008:4) kecerdasan moral adalah kemampuan memahami hal yang benar dan yang salah, artinya memiliki keyakinan etika yang kuat dan bertindak berdasarkan keyakinan tersebut sehingga orang bersikap benar dan terhormat. Kecerdasan yang sangat penting ini mencakup karakter-karakter utama, seperti: kemampuan untuk memahami penderitaan orang lain dan tidak bertindak jahat, mampu mengendalikan dorongan dan menunda pemuasan, mendengarkan dari berbagai pihak sebelum memberikan penilaian, menerima dan menghargai perbedaan, bisa memahami pilihan yang tidak etis, dapat berempati, memperjuangkan keadilan, dan menunjukkan kasih sayang dan rasa hormat terhadap orang lain.

Pendidikan moral dan pendidikan nilai dapat disampaikan dengan metode langsung atau tidak langsung. Metode langsung mulai dengan penentuan perilaku yang dinilai baik sebagai upaya indoktrinasi berbagai ajaran. Caranya memusatkan perhatian secara langsung pada ajaran tersebut dengan mendiskusikan, mengilustrasikan, menghafalkan dan mengucapkannya. Metode tidak langsung dengan menciptakan situasi yang memungkinkan perilaku yang baik dapat dipraktikkan (Zuchdi, 2008: 5).

Menurut Zuriah (2007:200-201) pendekatan penerapan pendidikan moral atau budi pekerti adalah sebagai berikut.

- a. Pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*). Mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan: mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan menerapkan nilai sesuai dengan keyakinan diri. Cara yang digunakan antara lain: keteladanan, penguatan positif dan negatif, simulasi dan bermain peran.
- b. Pendekatan perkembangan moral kognitif (*cognitive moral development approach*). Pendekatan ini menekankan pada berbagai tingkatan dari pemikiran moral. Guru dapat mengarahkan anak dalam menerapkan proses pemikiran moral melalui diskusi masalah moral sehingga peserta didik dapat membuat keputusan tentang pendapat moralnya. Cara yang digunakan antara lain melakukan diskusi kelompok dengan topik dilema moral, baik yang faktual maupun yang abstrak.
- c. Pendekatan analisis nilai (*value analysis approach*). Pendekatan ini menekankan agar peserta didik dapat menggunakan kemampuan berpikir logis dan ilmiah dalam menganalisis masalah sosial yang berhubungan dengan nilai tertentu. Selain itu, peserta didik dalam menggunakan proses berpikir rasional dan analitis dapat menghubungkan dan merumuskan tentang konsep tentang nilai mereka sendiri. Cara yang dapat digunakan antara lain diskusi terarah yang menuntut argumentasi, penegasan bukti, penegasan prinsip, analisis terhadap kasus, debat dan penelitian.

- d. Pendekatan klarifikasi nilai (*value clarification approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri dan nilai-nilai orang lain. Selain itu, pendekatan ini juga membantu peserta didik untuk mampu mengkomunikasikan nilai mereka sendiri kepada orang lain dan membantu peserta didik dalam menggunakan kemampuan berpikir rasional dan emosional dalam menilai perasaan, nilai, dan tingkah laku mereka sendiri. Cara yang digunakan antara lain: bermain peran, simulasi, analisis mendalam tentang nilai sendiri, aktivitas yang mengembangkan sensitivitas, kegiatan di luar kelas, dan diskusi kelompok.
- e. Pendekatan pembelajaran berbuat (*action learning approach*). Pendekatan ini untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti pada pendekatan analisis dan klarifikasi nilai. Selain itu, pendekatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan sosial serta mendorong peserta didik untuk melihat diri sendiri sebagai makhluk yang senantiasa berinteraksi dalam kehidupan. Cara yang digunakan antara lain proyek di sekolah, hubungan antar pribadi, praktik hidup bermasyarakat dan berorganisasi.

Dalam penelitian ini pendidikan nilai dan moral disampaikan dengan menggunakan model terintegrasi dalam semua bidang studi, yaitu melalui mata pelajaran PKn dimana guru dapat memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui

beberapa pokok atau sub-pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai yang akan ditanamkan adalah nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa yang relevan dengan nilai-nilai karakter sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Adapun pendekatan yang digunakan adalah dengan klarifikasi nilai, yakni peserta didik dalam kelompok dibimbing untuk dapat mengidentifikasi nilai, memilah dan memilih nilai, mengekspresikan dan mengaktualisasi nilai dalam bentuk tindakan. Dari proses ini diharapkan terjadi internalisasi nilai-nilai secara berkelanjutan. Melalui diskusi atas soal-soal yang aktual dalam masyarakat, dimana proses itu diharapkan menumbuhkan sikap berpikir logis, analitis, sistematis, dan argumentatif untuk dapat mengambil nilai-nilai hidup dari masalah yang diolah bersama. Dengan menemukan permasalahan, mengkritisi, dan mengolahnya anak diharapkan dapat mengambil nilai-nilai yang ada dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Masalah yang dikaji dalam kegiatan pembelajaran ini adalah masalah kemerdekaan mengemukakan pendapat dan tata cara mengeluarkan pendapat. Materi dipilih dengan pertimbangan untuk mengajarkan sikap demokrasi. Selain itu, peserta didik belajar menggunakan proses berpikir rasional dan analitis dapat menghubungkan-hubungkan dan merumuskan tentang konsep tentang nilai mereka sendiri. Cara yang dapat digunakan antara lain diskusi terarah yang menuntut argumentasi, penegasan bukti, penegasan prinsip, analisis terhadap kasus, dan debat.

B. Pengertian PKn

Secara ontologis, Pendidikan Kewarganegaraan berkembang dari konsep “civics”. Secara harfiah, civics berasal dari bahasa Latin “civicus”, yang artinya warga negara dan secara akademis sebagai embrio dari “civic education”, kemudian di Indonesia diadaptasi menjadi “Pendidikan Kewarganegaraan” (PKn). Dari sudut pandang epistemologis, pembelajaran PKn dikembangkan dari salah satu tradisi *social studies*, yakni “*social studies taught as citizenship transmission, social studies taught as social science, and social studies taught as reflective inquiry*”. Tradisi “*Social Studies Taught as Citizenship Transmission*” merujuk pada suatu modus pembelajaran sosial yang bertujuan untuk mengembangkan warganegara yang baik, yang ditandai oleh “....*conforms to certain accepted partices, hold particular beliefs, is loyal to certain values, participates in certain activities, and conforms to norms which area often local in character*”. Oleh karena itu tujuan dari tradisi ini menurut Barr dkk, (1978: 47) adalah mengembangkan “*a reasoned patriotism; a basic understanding and appreciation of (American) values, institution, and practices; personal identity and integrity and responsible citizenship; understanding and appreciation of the (American heritage; active democratic participation; an awareness of social problems, and desirable) ideals, attitudes, and behavioral skills*” (patriotisme beralasan bahwa pemahaman dasar dan penghargaan nilai (Amerika), institusi, dan praktek; identitas pribadi dan integritas dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab; pemahaman dan apresiasi (warisan Ame-

rika, partisipasi demokratis aktif, kesadaran masalah sosial, dan diinginkan) cita-cita, sikap, dan keterampilan perilaku).

Dalam kajian lain, tradisi ini bertujuan untuk mengembangkan warganegara yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang telah diterima secara baku dalam suatu negara. Dari tradisi ini berkembang menjadi “*body of knowledge*” yang dikenal dan memiliki paradigma sistemik yang di dalamnya terdapat tiga domain “*citizenship education*”, yakni domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural (Winataputra, 2001). Ketiga domain tersebut saling terkait secara struktural dan fungsional yang menurut *Center for Civic Education* (1998) di Amerika Serikat diikat oleh konsepsi kebajikan dan budaya kewarganegaraan (*civic virtue and culture*) yang mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), watak kewarganegaraan (*civic disposition*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), kepercayaan kewarganegaraan (*civic confidence*), komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*), dan kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*). Karena itu, kajian PKn menjadi lebih luas dari pada embrionya, yakni meliputi kajian keilmuan, program kurikuler, dan aktivitas sosial-kulturalnya. Implikasinya, secara aksiologis pengembangan PKn harus tetap berlandaskan ideologis Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan operasional Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang studi yang bersifat *multifaset* dengan konteks lintas bidang keilmuan atau lebih dikenal dengan bidang kajian yang multi dimensional

sebagai integrasi dari disiplin ilmu politik, hukum, pendidikan, psikologi, dan disiplin ilmu lainnya yang dapat mendukung pembentukan warga negara yang baik. Namun secara filsafat keilmuan PKn memiliki ontologi pokok ilmu politik, khususnya konsep “*political democracy*” untuk aspek “*duties and rights of citizen*” (Chreshore, 1886). Dari ontologi pokok inilah berkembang konsep “*civics*”, yang di Indonesia diadaptasi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk dari domain kurikuler PKn. Sebagai mata kuliah pada program pendidikan tenaga kependidikan, PKn mempunyai misi sebagai pendidikan nilai Pancasila dan pendidikan Kewarganegaraan serta sebagai “*subject-specific paedagogy*” atau pembelajaran materi subjek untuk guru PKn. Sebagai mata pelajaran di tingkat satuan pendidikan, PKn mempunyai misi sebagai pendidikan nilai Pancasila dan kewarganegaraan untuk warga negara muda usia. Secara ontologis, mata pelajaran ini berangkat dari nilai-nilai Pancasila dan konsepsi kewarganegaraan. Secara epistemologis, mata pelajaran ini merupakan program pengembangan individu dan secara aksiologis mata pelajaran ini bertujuan untuk pendewasaan peserta didik sebagai anggota masyarakat, warga negara, dan komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, karakteristik kurikulum PKn yang dikembangkan selalu diarahkan dengan tujuan untuk mencapai target hingga terjadinya artikulasi proses “belajar tentang, melalui proses, dan untuk menumbuhkan demokrasi konstitusional Indonesia sesuai dengan UUD

1945”, yang secara konseptual diadaptasi dari konsep *“learning about, through, and for democracy”* (Winataputra, 2001).

PKn untuk persekolahan sangat erat kaitannya dengan dua disiplin ilmu yang erat dengan kenegaraan, yakni Ilmu Politik dan Hukum yang terintegrasi dengan humaniora dan dimensi keilmuan lainnya yang dikemas secara ilmiah dan pedagogis untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Karena itu, PKn di tingkat persekolahan bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik. Warga negara yang dimaksud adalah warga negara yang menguasai pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia seperti yang berkembang di negara lain memiliki sifat multidimensional, artinya bahwa program PKn bukan hanya untuk satu tujuan. Winataputra (2001) mengemukakan bahwa ada tiga dimensi dalam PKn, yakni: (1) sebagai program kurikuler, (2) sebagai program akademik, dan (3) sebagai program sosial kultural. Dalam pelaksanaan program, ketiga dimensi ini dapat saja terjadi secara simultan khususnya dalam mencapai tujuan umum, yakni membentuk warga negara yang cerdas dan baik. Khusus untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan PKn dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bagian penjelasan Pasal 37 ayat (1) bahwa “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk

peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”.

Adanya ketentuan tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam UU Sisdiknas sebagai mata pelajaran wajib pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi menunjukkan bahwa mata pelajaran PKn menempati kedudukan strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional di tanah air. Adapun arah pengembangannya difokuskan pada pembentukan peserta didik agar menjadi manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Arah pengembangan pendidikan nasional pada era reformasi mengacu pada UU Sisdiknas yang di-operasionalkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sejalan dengan kebijakan otonomi pendidikan maka pengembangan kurikulum sekolah tidak lagi dibebankan kepada pemerintah pusat sebagaimana terdahulu melainkan diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional hanya menyediakan standar nasional, yakni berupa standar isi dan standar kompetensi lulusan, sementara pelaksanaan pengembangan kurikulum dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenisnya. Sebagai landasan kurikulumnya, pendidikan kewarganegaraan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 masing-masing tentang Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Berlakunya ketentuan tentang otonomi pendidikan membawa implikasi bagi setiap satuan pendidikan termasuk

implikasi dalam pengembangan kurikulum. Satuan pendidikan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengembangan kurikulum, bahkan dalam pengelolaan bidang lainnya, namun di pihak lain mereka pun dituntut agar selalu meningkatkan kualitas satuan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional.

C. Tujuan dan Ruang Lingkup PKn

Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945 (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 33). Pendidikan Kewarganegaraan yang pertama adalah *civic*. Kurikulum yang berlaku adalah kurikulum 1968. Perkembangan zaman semakin cepat dan pendidikan berjalan pesat pula akhirnya *civic* diganti dengan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dengan dikeluarkannya kurikulum 1975. Pelajaran PMP lahir pada tahun ajaran 1975/1976, dengan visi dan misi berorientasi pada penanaman nilai (*Value Inculcation*) dengan muatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kondisi ini bertahan sampai disempurnakannya kurikulum PMP tahun 1975/1976 pada tahun 1984. PMP makin kaya dengan muatan baru Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Eka Prasetya Pancakarsa dengan 36 butir nilai Pancasila. Kondisi tersebut terus berlanjut sampai berubahnya kurikulum PMP 1984 menjadi kurikulum 1994. Pada tahun 2004 kurikulum 1994 yang dikenal dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diubah

dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan sebutan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Dalam paradigma baru PKn memusatkan perhatian pada pengembangan kecerdasan warga negara dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, dan sosial baik secara individu, sosial maupun sebagai pemimpin hari esok.

Sebagaimana lazimnya semua mata pelajaran, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi, misi, tujuan, dan ruang lingkup isi. Visi mata pelajaran PKn adalah terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (*nation and character building*) dan pemberdayaan warga negara. Dengan visi tersebut diupayakan PKn mampu mewujudkan proses pendidikan yang terarah pada pengembangan kemampuan individu sehingga menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya mampu mendukung berkembangnya pendidikan masyarakat bangsa dan negara Indonesia yang cerdas (Depdiknas, 2006: 3).

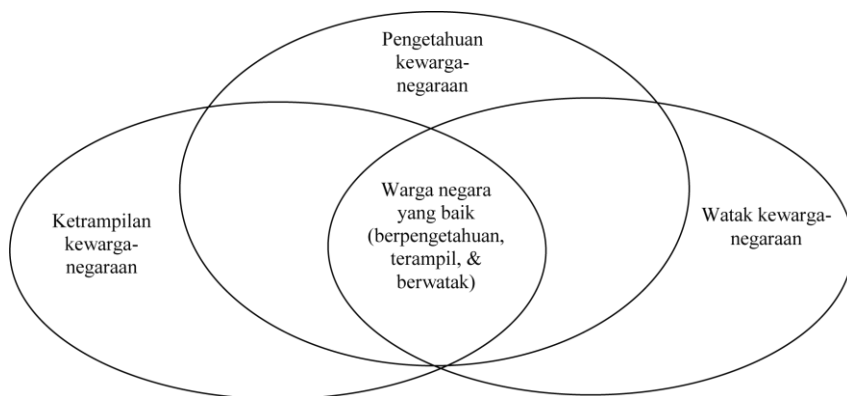
Sementara itu, misi mata pelajaran PKn adalah membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Depdiknas, 2006:3). Dengan misi ini, Pendidikan Kewarganegaraan dapat (a) memanfaatkan kenyataan dan kecenderungan masyarakat yang semakin transparan. Tuntutan kembali mutu yang semakin mendesak dan proses demokrasi yang semakin intens dan meluas sebagai konteks dan orientasi pendidikan demokrasi, (b) memanfaatkan substansi berbagai

disiplin ilmu yang relevan sebagai wahana paedagogis untuk menghasilkan dampak instruksional dan pengiringnya, dan (c) memanfaatkan berbagai konsep, prinsip dan prosedur pembelajaran yang memungkinkan para peserta didik mampu belajar demokratis, dalam situasi yang demokratis dan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat yang lebih demokratis (Depdiknas, 2006: 3).

Pembelajaran PKn bertujuan untuk mengembangkan potensi individu sebagai warga negara Indonesia sehingga mereka memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai yang memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai dimensi kehidupan (Depdiknas, 2005: 34). Sejalan dengan pernyataan ini, dalam Pedoman Pengembangan Silabus Mata Pelajaran PKn (Depdiknas, 2006: 3) diuraikan bahwa tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai berikut.

1. Memiliki kemampuan berfikir secara rasional, kritis, dan kreatif sehingga mampu memahami berbagai wacana kewarganegaraan.
2. Memiliki keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi secara demokratis dan bertanggungjawab.
3. Memiliki watak dan kepribadian yang baik, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Rumusan tujuan tersebut sejalan dengan aspek-aspek kompetensi yang hendak dikembangkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Aspek-aspek tersebut mencakup pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan watak atau karakter kewarganegaraan. Hal ini sejalan dengan analogi konsep Bloom tentang pengembangan kemampuan peserta didik yang mencakup ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Cakupan aspek-aspek kompetensi dalam pembelajaran PKn dapat digambarkan sebagaimana pada diagram berikut.



Gambar 1. Diagram Aspek-aspek Kompetensi dalam PKn

Aspek kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori dan konsep politik, hukum, dan moral. Ini berarti, mata pelajaran PKn merupakan bidang

kajian multi disipliner. Secara rinci materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintahan dan non pemerintahan, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum dan peradilan yang bebas tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat (Depdiknas, 2006: 4).

Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) meliputi keterampilan intelektual (*intellectual skills*) dan keterampilan berpartisipasi (*participatory skills*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh keterampilan intelektual adalah keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya merancang dialog dengan DPRD. Contoh keterampilan berpartisipasi adalah keterampilan menggunakan hak dan kewajiban di bidang hukum, misalnya segera melapor kepada polisi atas terjadinya kejahatan yang diketahui (Depdiknas, 2006:5)

Watak kewarganegaraan (*civic dispositions*) sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dimensi watak atau karakter kewarganegaraan dapat dipandang sebagai “muara” dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan mata pelajaran PKn maka karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap, dan potensi lain yang bersifat afektif (Depdiknas, 2006: 5).

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan dalam panduan KTSP 2006 disebutkan, bahwa ruang lingkup mata

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek berikut.

1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
2. Norma, Hukum, dan Peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistim hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
3. Hak Asasi Manusia, meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
4. Kebutuhan Warga Negara, meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
5. Konstitusi Negara, meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.

6. Kekuasaan dan Politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
7. Pancasila, meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
8. Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas maka seorang warga negara pertama-tama perlu memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik, terutama pengetahuan di bidang politik, hukum, dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, seorang warga negara diharapkan memiliki keterampilan secara intelektual maupun secara partisipatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, pengetahuan dan keterampilannya itu akan membentuk suatu watak atau karakter yang mapan sehingga menjadi sikap atau kebiasaan hidup sehari-hari. Watak, karakter, sikap atau kebiasaan hidup sehari-hari yang mencerminkan warga negara yang baik itu misalnya sikap religius, jujur, adil, demokratis, menghargai perbedaan, menghormati hukum, menghormati hak

orang lain, memiliki semangat kebangsaan yang kuat, memiliki rasa kesetiakawanan sosial, dan lain-lain.

Tujuan akhir dari pendidikan kewarganegaraan adalah warga Negara yang cerdas dan baik, yakni warga negara yang bercirikan tumbuh-kembangnya kepekaan, ketanggapan, kritisitas, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat secara tertib, damai, dan kreatif. Para peserta didik dikondisikan untuk selalu bersikap kritis dan berperilaku kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah, anggota masyarakat, warga negara, dan umat manusia di lingkungannya yang cerdas dan baik. Proses pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil berbuat (*learning by doing*), belajar memecahkan masalah sosial (*social problem solving learning*), belajar melalui perlibatan sosial (*socio-participatory learning*), dan belajar melalui interaksi sosial-kultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat.

Bab 3

KEARIFAN LOKAL BUDAYA JAWA

A. Pengertian Kearifan Lokal

Secara umum, kearifan setempat (*local wisdom*) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Menurut Nurjaya (2006: 2-4) kearifan lokal pada hakikatnya berpangkal dari sistem nilai dan religi yang dianut dalam komunitasnya. Ajaran agama dan kepercayaan masyarakat lokal menjiwai dan memberi warna serta mempengaruhi citra lingkungan dalam wujud sikap dan perilaku terhadap lingkungannya. Hakikat yang terkandung di dalamnya adalah memberi tuntunan kepada manusia untuk berperilaku yang serasi dan selaras dengan irama alam semesta sehingga tercipta keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya.

Kearifan lokal menurut Wales (dalam Atmodjo, 1986:46) diartikan sebagai “*the sum of the cultural characteristics which the vast majority of a people have in common as result of their experiences in early life*”. Berdasarkan rumusan

tersebut menjadi jelas bahwa lokal yang dimaksud Wales merupakan substrat kebudayaan Pra-Indian atau yang disebut sebagai "Pribumi" (Poespowardojo, 1986:30).

Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai *local development*, yaitu perkembangan setempat yang arahnya menuju ke arah perubahan. Kearifan lokal dan perkembangan lokal berkembang setelah terjadinya kontak kebudayaan atau akulturasi dengan kebudayaan lain, terutama yang datang dari India (kebudayaan Hindhu). Namun unsur-unsur asli pada zaman pra-Hindhu juga mempunyai daya gerak penting yang menentukan sehingga unsur-unsur asli tersebut tidak hilang. Kearifan lokal bangsa Indonesia merupakan kemampuan penyerapan kebudayaan asing yang datang secara selektif, artinya disesuaikan dengan suasana dan kondisi setempat (Atmodjo, 1986:47). Dengan demikian secara substansial, kearifan lokal adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat. Sebagaimana dikatakan Geertz (1963: 26) bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakatnya adalah yang menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakatnya.

Berdasarkan deskripsi di atas maka kearifan lokal sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) atau kecerdasan

setempat (*local genius*). Kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada komunitas itu daya-tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah dimana komunitas itu berada. Dengan kata lain kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-geopolitis, historis, dan situasional yang bersifat lokal. Kearifan lokal pada dasarnya dapat dipandang sebagai landasan bagi pembentukan jati diri bangsa secara nasional.

Kearifan lokal dapat dijadikan jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa sekarang, generasi nenek moyang dan generasi sekarang demi menyiapkan masa depan dan generasi mendatang. Pada gilirannya, kearifan lokal dapat dijadikan semacam simpul perekat dan pemersatu antar generasi. Dengan selalu memperhitungkan kearifan lokal melalui pendidikan budaya niscaya peserta didik diharapkan tidak terperangkap dalam situasi keterasingan atau menjadi ‘orang lain’ dari realitas dirinya dalam pengertian ‘menjadi seperti (orang lain)’. Menggali dan menanamkan kembali kearifan lokal secara inheren melalui pendidikan dapat dikatakan sebagai gerakan kembali pada basis nilai budaya daerahnya sendiri sebagai bagian upaya membangun identitas bangsa, dan, sebagai semacam filter dalam menyeleksi pengaruh budaya ‘lain’. Nilai-nilai kearifan lokal itu meniscayakan fungsi yang strategis bagi pembentukan karakter dan identitas bangsa.

Pendidikan berbasis kearifan lokal dapat dikatakan sebagai model pendidikan yang memiliki relevansi tinggi bagi pengembangan kecakapan hidup (*life skills*) dengan bertumpu

pada pemberdayaan keterampilan dan potensi lokal di masing-masing daerah. Materi pembelajaran harus memiliki makna dan relevansi tinggi terhadap pemberdayaan hidup mereka secara nyata berdasarkan realitas yang mereka hadapi. Kurikulum disiapkan sesuai dengan kondisi lingkungan hidup, minat, dan kondisi peserta didik. Juga harus memperhatikan kendala-kendala sosiologis dan kultural yang mereka hadapi. Pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu lekat dengan situasi nyata yang mereka hadapi.

B. Fungsi Kearifan Lokal

Kearifan lokal dipandang sangat bernilai dan mempunyai manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat, setidaknya bagi masyarakat pemiliknya. Kearifan lokal dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk menghayati, mempertahankan, dan melangsungkan hidup sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan dan tata nilai yang dihayati di dalam masyarakat. Dengan kata lain, kearifan lokal itu kemudian menjadi bagian dari cara hidup mereka yang arif, untuk memecahkan segala permasalahan hidup yang mereka hadapi. Berkat kearifan lokal mereka dapat melangsungkan kehidupannya bahkan dapat berkembang secara berkelanjutan (*sustainable development*). Kearifan lokal dilandasi oleh suasana kebatinan masyarakatnya akan suatu nilai sakral (religius) sehingga mampu dijadikan sebagai sistem nilai.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-

sama masyarakat dan lingkungannya dalam lingkup lokal yang sudah dialami bersama-sama. Oleh karena itu kearifan lokal tidak sekadar sebagai acuan tingkah-laku seseorang tetapi lebih jauh, yaitu mampu mendinamisasi kehidupan masyarakat yang penuh keadaban. Kearifan lokal dilandasi oleh suasana kebatinan masyarakatnya akan suatu nilai sakral (religius) sehingga mampu untuk dijadikan sistem nilai.

Kearifan lokal pada umumnya berbentuk oral (tradisi lisan), berkembang di daerah pedesaan bahkan pedalaman yang terpencil dan biasa disebut masih bersifat tradisional tersebut memang tidak/belum didasarkan pada metode tertentu yang bersifat sistemik, apalagi bersifat ilmiah. Kearifan lokal tidak pernah dapat dipahami dan disimpan secara sistematis sehingga akibatnya akan punah. Kearifan lokal tidak dapat diukur dari inteligensi praktis. Kearifan akan memediasi nilai yang didukung oleh kinerja intelegensi praktis. Dengan demikian kearifan menopang asumsi pada diri sendiri, juga melihat sisi baik orang lain dan memperhatikan konteks lingkungan, merangkai keseimbangan dari kepentingan sendiri (intrapersonal) dengan mempertimbangkan kepentingan orang lain (interpersonal) dan aspek lain, yakni lingkungan sosial. Secara lebih jelas kearifan merupakan aplikasi antara pengetahuan yang paling dalam dengan pengetahuan eksplisit sebagai mediasi nilai untuk pencapaian kebaikan bersama melalui keseimbangan diantara faktor individu, masyarakat dan lingkungannya.

Sejalan dengan kemajuan sosial-ekonomi, tata-cara atau teknik yang mereka gunakan untuk memproses penemuan-penemuan itu juga berkembang. Karena itu, secara perlahan

mereka menciptakan ‘metode’ untuk membangun pengetahuan yang pada dasarnya merupakan cara-cara atau teknologi asli (*indigenous ways*) mendayagunakan sumber daya alam bagi kelangsungan kehidupan. Mereka mengembangkan suatu sistem pengetahuan dan teknologi yang asli suatu kearifan lokal (*indigenous or local knowledge*), yang mencakup berbagai macam topik seperti masalah pengobatan tradisional, masalah pangan dan pengolahan pangan, pemeliharaan ternak, pengelolaan air bersih, konservasi tanah, serta pencegahan hama dan penyakit tanaman. Secara lebih jelas kearifan merupakan aplikasi antara pengetahuan yang paling dalam dengan pengetahuan eksplisit sebagai mediasi nilai untuk pencapaian kebaikan bersama melalui keseimbangan diantara faktor individu, masyarakat dan lingkungannya.

Hasil akhir dari kearifan lokal adalah pengetahuan yang menggambarkan tentang kearifan lokal, yaitu gambaran mengenai sikap atau tingkah laku yang mencerminkan budaya asli. Nilai-nilai yang diyakini bersama dan terinternalisasi dalam diri individu sehingga terhayati dalam setiap perilaku, disebut juga sebagai kearifan lokal. Secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku masyarakat setempat (Nurjaya, 2006: 2-4). Hakikat yang terkandung di dalamnya adalah memberi tuntunan kepada manusia untuk berperilaku yang serasi dan selaras dengan irama alam semesta, sehingga tercipta keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya.

Setiap suku bangsa Indonesia yang bhinneka memiliki nilai-nilai budaya luhur dan memiliki keunggulan lokal atau memiliki kearifan lokal. Menurut Alwasilah (2009:16) kearifan lokal inilah yang melahirkan pendidikan bermakna *deliberative*, yakni bahwa "setiap masyarakat berusaha mentransmisikan gagasan fundamental yang berkenaan dengan hakikat dunia, pengetahuan, dan nilai-nilai". Kesadaran sangat dibutuhkan karena praktik pendidikan selama ini terlalu berorientasi ke Barat dan melupakan nilai-nilai keunggulan yang ada di bumi Nusantara.

C. Kebudayaan Jawa

Menurut Soeseno (2000: 76) kebudayaan Jawa selalu berhubungan dengan nilai-nilai falsafah kejiwaan maupun pola pikir. Hal yang bersifat filsafati terletak pada nilai-nilai simbolisme akibat adanya kontak antara manusia dengan mikro-makro kosmos, antara kehidupan lahir dan bathinnya yang disebut "*Kejawen*". Titik berat yang melatar belakangi kejawen disebut '*ngilmu*', sehingga ilmu kejawen dapat menembus lingkungan bersifat umum dan universal.

Masyarakat Jawa memiliki karakteristik budaya yang khas sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Prabowo (2003: 24) membagi budaya secara garis besar menjadi dua, yaitu: budaya lahir dan budaya batin. Budaya lahir terkait dengan kedudukan seseorang sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam hal itu, budaya Jawa memiliki kaidah-kaidah yang dapat dengan mudah diidentifikasi berdasarkan ungkapan-ungkapan budaya sebagai pengejawantahan nilai-nilai budaya yang didukung

masyarakat. Sebaliknya budaya batin terkait dengan persoalan-persoalan yang bersifat supranatural atau hal-hal yang tidak dapat dijangkau berdasarkan penghitungan empiris atau objektif, tetapi menduduki posisi yang penting dalam sistem kehidupan masyarakat Jawa. Budaya batin yang dalam klasifikasi menurut Koentjaraningrat (1982: 2) dapat dimasukkan pada sistem religi atau keagamaan Jawa tersimbolisasikan dalam ungkapan *manunggaling kawula Gusti*.

Pandangan dunia Jawa bertolak dari perbedaan antara dua segi fundamental seperti atas dan bawah serta hal-hal yang telah disebutkan di atas. Inilah yang menjadi titik tolak dari ajaran kejawaan yang pada intinya adalah *kebatinan*, yakni gerak diri harus mengalir dari luar ke dalam, dari penguasaan lahir ke pengembangan batin. Sedang hakikat dari kebatinan itu sendiri terletak pada kedudukan serta kehidupan masyarakat di dunia melalui perspektif religius. Manusia dinilai keberadaannya dalam konteks kosmologis, di tengah alam semesta yang diyakini merupakan kancah peperangan antara dua kekuatan untuk diselaraskan. Sebagaimana diungkapkan Suseno (1991: 39), bahwa keselarasan hidup dalam masyarakat Jawa ditentukan dua prinsip dasar, yaitu prinsip *rukun dan hormat*. Ditambahkan oleh De Jong (1985: 19-20) sifat orang Jawa adalah (1) *Narimo*, yakni merasa puas dengan nasibnya dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana sendiri untuknya, (2) *Rila*, yakni keikhlasan hati yang didasari pemahaman bahwa segala sesuatunya adalah milik Tuhan dan segala sesuatu yang ada di dunia adalah barang pinjaman yang sewaktu-waktu akan diambil kembali, (3) *Sabar*, merupakan kelapangan dada dalam

melewati segala cobaan. Kesabaran diibaratkan dengan samudera yang tidak pernah meluap meski sebanyak apapun air yang mengalirinya. KRT Widiatono menambahkan dua sikap dasar, yakni *temen*, artinya menepati janji yang telah diikrarkan dan *budi luhur*, yaitu keadaan dimana manusia seyogyanya selalu berusaha mengisi hidupnya dengan melakukan kebaikan terhadap sesama. Sikap hidup yang mencerminkan kerukunan tersebut tidak terlepas dari sikap *tepo slira* (tenggang rasa). Dengan berbekal kesadaran bahwa *nandur bakal ngundhuh* "menanam akan memetik" atau *ngundhuh wohing pakarti* "memetik buah perbuatan", sikap dan perilaku orang Jawa sesungguhnya dikendalikan oleh cahaya hati nurani untuk menjauhi perbuatan nista. Bagi orang Jawa tidak berpikiran bahwa pada saat mereka memberi harus kembali kepadanya dalam bentuk kebaikan lain.

Budaya Jawa mengutamakan *rasa*, *cipta*, dan *karsa* dalam hidup. Ketiganya terpadu menjadi satu kesatuan yang sangat erat hubungannya. Menurut Mulder (1986) setidaknya terdapat *tiga nilai utama* dalam pandangan hidup masyarakat Jawa, khususnya di lingkungan keluarga *priyayi* di Surakarta. Ketiganya adalah *hormat*, *rukun*, dan *tolong-menolong*. Sebagai *core value*, ketiga prinsip hidup tersebut kemudian berkembang menjadi nilai-nilai prinsip hidup lainnya. Hormat, rukun, dan tolong-menolong disebut sebagai *nilai inti* sedangkan nilai-nilai lain yang muncul sebagai cabang dari perluasan ketiga nilai utama yang akhirnya juga dijadikan sebagai pandangan hidup masyarakat Jawa disebut sebagai *nilai transformasi*.

D. Kearifan Lokal dan Nilai Budaya

Sistem nilai budaya merupakan pedoman yang dianut oleh setiap anggota masyarakat terutama dalam bersikap dan berperilaku dan juga menjadi patokan untuk menilai dan mencermati bagaimana individu dan kelompok bertindak dan berperilaku. Sistem nilai dapat dikatakan sebagai norma standar dalam kehidupan bermasyarakat. Djajasudarma dkk. (2002:13) mengemukakan bahwa sistem nilai begitu kuat meresap dan berakar di dalam jiwa masyarakat sehingga sulit diganti atau diubah dalam waktu singkat.

Nilai-nilai yang diyakini dan terinternalisasi dalam diri individu sehingga terhayati dalam setiap perilaku disebut juga sebagai kearifan lokal. Secara substansial, kearifan lokal adalah nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku masyarakat setempat.

Dengan demikian, perlu digagas dan dirumuskan model pendidikan karakter berbasis kearifan budaya lokal bagi masyarakat Indonesia yang majemuk secara budaya ini. Kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal yang tercipta dari hasil adaptasi suatu komunitas yang berasal dari pengalaman hidup yang dikomunikasikan dari generasi ke generasi. Proses regenerasi kearifan lokal dilakukan melalui tradisi lisan (cerita rakyat) dan karya-karya sastra, seperti *babad*, *suluk*, *tembang*, *hikayat*, *lontar* dan lain sebagainya (Gunawan, 2008).

Secara umum makna *local wisdom* dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Pengertian kearifan lokal menurut

Sedyawati (1986: 186-192) dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu (1) segala nilai, konsep dan teknologi yang telah dimiliki suatu bangsa sebelum mendapat pengaruh asing dan (2) daya yang dimiliki suatu bangsa untuk menyerap, menafsirkan, mengubah, dan mencipta sepanjang terjadinya "pengaruh asing".

Atmodjo (1986:47) menjelaskan kearifan lokal sebagai *local development*, yaitu perkembangan setempat yang arahnya menuju ke arah perubahan. Dengan demikian secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat. Sebagaimana dijelaskan Geertz (1963:26) bahwa "Kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakatnya adalah yang menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakatnya".

Haryati Soebadio mengatakan bahwa *local genius* adalah *cultural identity*, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri (Ayatrohaedi, 1986:18-19). Ciri-cirinya adalah (1) mampu bertahan terhadap budaya luar, (2) memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, (3) mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli,

(4) mempunyai kemampuan mengendalikan, (5) mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Soebadio (1986:18-25) menjelaskan pengertian kearifan lokal sama dengan *cultural identify* yang diartikan sebagai identitas budaya bangsa. Adapun identitas nasional menurut Barker (2005:260) merupakan bentuk identifikasi imajinatif dengan simbol dan wacana negara bangsa. Bangsa bukan sekadar formasi politik melainkan sistem representasi kultural tempat identitas nasional terus-menerus direproduksi sebagai tindakan diskursif.

Sistem nilai budaya dalam semua kebudayaan di dunia ini menurut Kluckhohn mengandung lima masalah pokok dalam kehidupan manusia, yakni sebagai berikut.

1. Hakikat hidup manusia. Hakekat hidup untuk setiap kebudayaan berbeda secara ekstrim, ada yang berusaha untuk memadamkan hidup, ada pula yang dengan pola-pola kelakuan tertentu menganggap hidup sebagai suatu hal yang baik untuk mengisi hidup.
2. Hakekat karya manusia. Setiap kebudayaan hakekatnya berbeda-beda, di antaranya ada yang beranggapan bahwa karya bertujuan untuk hidup, karya memberikan kedudukan, karya merupakan gerak hidup, karya merupakan gerak hidup untuk menambah karya lagi.
3. Hakekat waktu manusia. Hakekat waktu untuk setiap kebudayaan berbeda, ada yang berpandangan mementingkan orientasi masa lampau, ada pula yang berpandangan untuk masa kini atau yang akan datang.

4. Hakekat alam manusia. Ada kebudayaan yang menganggap manusia harus mengeksploitasi alam atau memanfaatkan alam semaksimal mungkin, ada pula kebudayaan yang beranggapan bahwa manusia harus harmonis dengan alam dan manusia harus menyerah kepada alam.
5. Masalah hubungan manusia. Dalam hal ini ada yang mementingkan hubungan manusia dengan manusia, baik secara horizontal (sesamanya) maupun secara vertikal.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sistem nilai budaya merupakan masalah dasar dalam hidup manusia sehingga berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah dan orientasi kepada kehidupan warga masyarakat. Sistem nilai budaya adalah kompleks ide-ide dan gagasan manusia yang menjadi sumber inspirasi dan orientasi dalam menghadapi masalah kehidupan manusia. Orientasi ini mengkristal kuat sebagai jiwa dari suatu masyarakat dan saling berkaitan menjadi suatu sistem yang berpola (*habit of thinking*).

1) Kebudayaan Jawa

Secara umum kebudayaan Jawa dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebudayaan pedalaman dan pesisir. Daerah pedalaman Jawa berpusat di Yogyakarta dan Surakarta atau disebut wilayah kebudayaan Jawa *Negarigung*. Sedangkan "kebudayaan pesisiran" meliputi daerah pesisir pantai utara Jawa yang berpusat di wilayah Pati, Blambangan, dan Tegal (Sukmawati: 2004:12).

Geertz (1981: X-XII) menggambarkan masyarakat Jawa terutama yang berada di wilayah kebudayaan Jawa *Negara gung* memiliki pandangan hidup atau falsafah dalam memahami makna kehidupan sehingga mempunyai pedoman dalam melakukan tindakan. Pandangan orang Jawa dalam melihat, memahami, dan berperilaku berorientasi dan bersumber dari budaya. Karena itu perkembangan budaya Jawa selaras dengan dinamika masyarakat yang mengacu pada konsep budaya induk, yaitu "*sangkan paraning dumadi*" (dari mana dan mau ke mana kita) menunjukkan bahwa hidup bagi orang Jawa adalah sebuah "*lelaku*" (perjalanan). Karena itu, hidup di dunia harus memahami dari mana 'asal', akan ke mana 'tujuan' dan 'akhir' perjalanan hidupnya untuk mencapai "*kasampurnaning dumadi*" (kesempurnaan tujuan hidup) sehingga dianggap "*wingkan sangkan ing paran*". Masyarakat Jawa mengartikan kata "Jawa" bermakna mengerti atau paham. Karena itu, di dalam keseharian sering terdengar masyarakat Jawa melontarkan ungkapan seperti: '*durung jawa*' (belum paham), "*wis jawa*" (sudah paham) atau '*wis ora jawa*' (berubah sombong atau atau buruk).

Mulder (1985: 31) berpendapat bahwa untuk mencapai "*kasampurnaning dumadi*" orang harus sudah memahami dan menjalankan konsep '*Manunggaling Kawula Gusti*', yakni konsep religiusitas hubungan manusia dengan Tuhan. *Manunggal* artinya 'menyatu' sedangkan *kawula* adalah 'hamba' dan *Gusti* adalah 'Tuhan', konsep ini hendaknya diterima sebagai nilai-nilai spiritual yang menyatukan kehendak dari seorang hamba dengan 'Penciptanya'. Penyatuan diri itu dilakukan manusia

ketika masih hidup di dunia sehingga seluruh perjalanan hidupnya dari lahir hingga ke liang kubur dalam tataran konsep Tuhan. Orang-orang yang mengejawantahkan konsep "*manung-galing kawula Gusti* tidak akan melakukan hal-hal di luar keinginan Tuhan. Penerapan konsep ini di dalam lingkungan rumah tangga, di masyarakat maupun di birokrasi akan melahirkan keluarga harmonis, sejahtera lahir dan batin, masyarakat yang saling hormat-menghormati akan melahirkan negeri "*gemah ripah loh jinawi*". Konsep dikenal dengan istilah "*nunggak semi*", artinya senantiasa tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Karena itu dalam setiap diri inividu ditanamkan sikap '*andhap asor*' yang tercermin dalam sikap menjalani laku '*nrimo*' (menerima apa adanya) '*rilo*' (rela dan ikhlas) dan *sabar* (tidak gampang marah).

Menurut Soeseno (2000: 76) kebudayaan Jawa selalu berhubungan dengan nilai-nilai falsafah kejiwaan maupun pola pikir. Hal yang bersifat filsafati terletak pada nilai-nilai simbolisme akibat adanya kontak antara manusia dengan mikro-makro kosmos, antara kehidupan lahir dan bathinnya yang disebut "*Kejawen*". Titik berat yang melatar belakangi *kejawen* disebut '*ngilmu*' sehingga ilmu *kejawen* dapat menembus lingkungan bersifat umum dan universal.

Dalam tataran epistemologis, ilmu pengetahuan dinilai sebagai sebuah "*kawruh*", maka kegiatan seseorang untuk mencari dan mendapatkan ilmu pengetahuan disebut "*ngangsu kawruh*". Budaya pikir masyarakat Jawa lebih mengkom-binasikan antara pengalaman dan kesesuaian hati dibandingkan dengan rasional dan empiris. Karena itu, aktivitas pemikiran

dalam budaya Jawa diistilahkan sebagai "*menggalih*", yang berarti menggunakan hati nurani, karena berasal dari kata "*galih*" yang berarti hati. Kebenaran tertinggi yang dicapai oleh "*kawruh*" bukanlah kebenaran kritis seperti disyaratkan oleh ilmu pengetahuan melainkan satu pendekatan tentang kebijakan yang diistilahkan sebagai *kabecikan*. Ada ungkapan kebenaran belum tentu dekat kepada kebijakan atau "*bener iku durung mesti pener*". Seseorang tidak hanya butuh mengetahui kebenaran tetapi juga harus terarah kepada kebijakan sebagai tujuan akhir (Sutrisno, 2002).

Unsur kejiwaan kebudayaan Jawa menjadikan manusia berbudi luhur dan suci dalam sikap bathin dan tingkah lakunya. Lahirnya nilai-nilai tersebut karena adanya hubungan antara manusia dengan manusia dengan Sang Hyang Illahi yang bersifat universal. Keseimbangan antara hati nurani yang berinteraksi dengan alam dan Sang Hyang Pencipta dengan dilandasi penalaran intelektual disebut '*ngelmu*'. Ketiganya berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dalam hidup dan kehidupan orang Jawa (Mulder, 1996).

Persinggungan antar-budaya dan agama di seluruh dunia ikut menggoreskan lukisan di wajah budaya dan agama orang Jawa. Terjadi pengelompokan aliran, keyakinan, dan pemikiran tentang sejumlah ide dasar spiritualisme. Penelitian Geertz (1960) yang akhirnya disanggah banyak ahli, tampaknya juga mencoba memahami pemilahan pola pemikiran dan budaya spiritual masyarakat Jawa menjadi abangan, santri, dan priyayi. Kuntowijoyo (1987:3) menyimpulkan bahwa pada akhir-

nya semua agama yang berkembang di tanah Jawa selalu berciri Jawanisme.

Masyarakat Jawa memiliki karakteristik budaya yang khas sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Prabowo (2003: 24) membagi budaya menjadi dua, yaitu budaya lahir dan budaya batin. Budaya lahir terkait dengan kedudukan seseorang sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam hal itu, budaya Jawa memiliki kaidah-kaidah yang dapat dengan mudah diidentifikasi berdasarkan ungkapan-ungkapan budaya sebagai pengejawantahan nilai-nilai budaya yang didukung masyarakat. Sebaliknya budaya batin terkait dengan persoalan-persoalan yang bersifat supranatural atau hal-hal yang tidak dapat dijangkau berdasarkan penghitungan empiris atau objektif tetapi menduduki posisi penting dalam sistem kehidupan masyarakat Jawa. Budaya batin yang dalam klasifikasi menurut Koentjaraningrat (1982: 2) dapat dimasukkan pada sistem religi atau keagamaan Jawa tersimbolisasikan dalam ungkapan *manunggaling kawula Gusti*.

Salah satu wujud ideal kebudayaan masyarakat Jawa adalah *Kejawen*. Kata *kejawen* berasal dari kata Jawi yang merupakan bentuk halus atau krama dari kata Jawa. Pengertian pertama *kejawen* mencakup segala hal yang berhubungan dengan pandangan hidup Jawa serta wawasan tentang Jawa. Menurut Mulder (1996: 7), *kejawen* bukan suatu agama tetapi cenderung kepada suatu etika dan gaya hidup yang berpedoman pada pemikiran khas Jawa. *Kejawen* sering disebut dengan istilah *Ilmu Jawi*, suatu ajaran tentang cara menjadi seorang manusia Jawa seutuhnya. Ajaran ini merupakan bentuk awal

dari kebatinan yang merupakan inti dari *kejawen*, *ngelmu*, dan *laku*, yakni peraturan tingkah laku yang harus menjadi pedoman hidup manusia. Tujuannya adalah untuk membina hubungan yang selaras dan harmonis antara seseorang dengan makhluk hidup di sekitarnya. Ngelmu dan laku membina manusia untuk menjadi anggota keluarga, anggota masyarakat yang baik, menjadi manusia yang berpribadi mulia dan membimbing manusia menuju kebahagiaan abadi yang dapat dirasakan jika roh seseorang mencapai kesatuan dengan Hyang Widhi (Hariwijaya, 1986: 228).

Pandangan dunia Jawa bertolak dari perbedaan antara dua segi fundamental seperti atas dan bawah serta hal-hal yang telah disebutkan di atas. Inilah yang menjadi titik tolak dari ajaran *kejawen* yang pada intinya adalah *kebatinan*, yakni gerak diri harus mengalir dari luar ke dalam, dari penguasaan lahir ke pengembangan batin. Karena itu *kejawen* pada hakekatnya adalah menyelaraskan diri dengan kebenaran yang lebih tinggi hingga lebur (*transenden*). Adapun hakikat dari kebatinan itu sendiri terletak pada kedudukan dan kehidupan masyarakat di dunia melalui perspektif religius. Manusia dinilai keberadaannya dalam konteks kosmologis, di tengah alam semesta yang diyakini merupakan kancah peperangan antara dua kekuatan untuk diselaraskan. Sebagaimana diungkapkan Suseno (1991: 39), bahwa keselarasan hidup dalam masyarakat Jawa ditentukan dua prinsip dasar, yaitu prinsip rukun dan hormat.

Sikap hidup yang mencerminkan kerukunan tersebut tidak terlepas dari sikap *tepo slira* (tenggang rasa). Dengan berbekal

kesadaran bahwa *nandur bakal ngundhuh* (menanam akan memetik) atau *ngundhuh wohing pakarti* (memetik buah perbuatan), sikap dan perilaku orang Jawa sesungguhnya dikendalikan oleh cahaya hati nurani untuk menjauhi perbuatan nista. Bagi orang Jawa tidak berpikiran bahwa pada saat mereka memberi harus kembali kepadanya dalam bentuk kebaikan lain. Karena itu harus ikhlas dan *rila legowo* pada saat membantu, menyumbang atau meminjamkan sesuatu pada orang lain. Dalam konteks kebaikan seperti itu menurut Suratno dan Astiyanto (2009: 99) "keikhlasan" adalah ibarat "*idhep-idhep nandur pari jero*" *Pari jero* artinya padi yang memerlukan waktu lama untuk dapat *dipanen*.

Budaya Jawa mengutamakan *rasa*, *cipta*, dan *karsa* dalam hidup. Ketiganya berpadu menjadi satu kesatuan yang sangat erat. Menurut Mulder (1986) terdapat *tiga nilai utama* dalam pandangan hidup masyarakat Jawa khususnya di lingkungan keluarga *priyayi* di Surakarta. Ketiganya adalah *hormat*, *rukun*, dan *tolong-menolong*.

1) *Hormat*

Masyarakat Jawa memiliki ciri khusus dalam hal hormat-menghormati. Lebih bersifat kalem, sederhana, dan merendah diri merupakan ciri khusus pribadi orang Jawa. *Unggah-ungguh* dijadikan tolok ukur utama dalam bersosialisasi baik di lingkungan keluarga dan masyarakat. Bagaimana seorang anak harus bersikap dan bertingkah laku yang sesuai dengan seseorang yang di bawahnya, sepadan, dan di atasnya. Sikap hormat mengindikasikan bahwa seseorang harus menghargai,

tidak boleh menyinggung, melecehkan atau merendahkan lawan bicara.

2) *Rukun*

Sikap rukun merupakan salah satu ciri khas yang dijunjung oleh masyarakat Jawa. Tipe umum masyarakat Jawa ialah tidak suka adanya konflik dalam pergaulannya terutama sampai menimbulkan konflik terbuka. Konflik akan berusaha diselesaikan secara personal dan tidak membiarkan sampai diketahui orang banyak. Konflik atau perselisihan dianggap sebagai suatu *aib* yang tidak perlu diketahui oleh orang lain dan cukup diketahui oleh pelaku konflik sendiri. Dengan meredam sekuat mungkin terjadinya konflik maka diharapkan suatu kerukunan bisa tercapai. Jika suatu kerukunan hidup sudah bisa terbina dengan baik maka ketentraman sosial bisa terpelihara.

3) *Tolong-menolong*

Tolong-menolong merupakan salah satu ciri khas prinsip hidup masyarakat Jawa. Banyak hal dalam hidup didasari dengan sikap saling bahu-membahu atau gotong-royong. Kesadaran sebagai makhluk sosial yang harus menjunjung rasa *welas asih* dijadikan landasan utama mengapa prinsip hidup ini sangat penting. Contoh sikap tolong-menolong dalam kehidupan orang Jawa ialah *rembug desa*, *gugur gunung*, *sambatan*, *kenduren* dan sebagainya.

Sebagai *core value*, tiga prinsip hidup di atas kemudian berkembang menjadi nilai-nilai prinsip hidup lainnya. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam budaya

Jawa sangatlah luas dan lentur. Namun perluasan tersebut tidak lepas dari ketiga prinsip utama. Hormat, rukun, dan tolong-menolong disebut sebagai *nilai inti* sedangkan nilai-nilai lain yang muncul sebagai cabang dari perluasan ketiga nilai utama dijadikan sebagai pandangan hidup masyarakat Jawa disebut sebagai *nilai transformasi*.

Menurut Rukmana (1990) dalam budaya Jawa dikenal adanya istilah *pituduh* (petunjuk) dan *wewaler* (nasehat). Keduanya merupakan representasi nilai-nilai edukatif yang terkandung di dalamnya baik *nilai inti* maupun *nilai transformasi*. *Pituduh* dan *wewaler* berperan dalam menuntun dan mengatur tingkah laku manusia supaya bisa hidup damai, tenteram, sejahtera, sentosa lahir dan batin. *Pituduh* dan *wewaler* mencakup enam bidang, yakni Ketuhanan yang maha esa, kerohanian, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, dan kebendaan.

E. Karakter dan Jati Diri Bangsa

1. Karakter dan Pendidikan karakter

Istilah karakter diambil dari bahasa Yunani “*to mark*” (menandai atau mengukir) yang lebih terfokus pada tindakan atau tingkah laku. Wynne (1991) menyebutkan dua pengertian karakter, yakni pertama, menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Kedua, karakter erat kaitannya dengan “*personality*”. Seseorang bisa disebut sebagai “orang yang berkarakter” kalau tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral.

Terbentuknya karakter karena perkembangan dasar yang telah terkena pengaruh dari ajar. Sedang “dasar” adalah bekal

hidup atau “bakat”nya anak dari alam sebelum lahir, yang sudah menjadi satu dengan kodrat hidupnya anak (biologis). “Ajar” adalah segala sifat pendidikan dan pengajaran mulai anak dalam kandungan ibu hingga akil baligh, yang dapat mewujudkan *intelligibel*, yakni tabiat yang dipengaruhi oleh masaknya angan-angan. Di dalam jiwa, karakter itu adalah imbalan yang tetap antara hidup batinnya seseorang dengan segala macam perbuatannya. Karena itu seolah-olah menjadi “lajer” atau “sendi” di dalam hidupnya, yang kemudian mewujudkan sifat perangai yang khusus buat satu-satunya manusia (Ki Hadjar Dewantara, 1977: 407-408).

Dalam arti etis, watak menunjukkan sifat-sifat yang baik dan selalu dapat dipercaya. Karena itu orang yang berwatak akan menunjukkan sifat mempunyai pendirian yang teguh, baik, terpuji, dan dapat dipercaya. Berwatak berarti memiliki prinsip dalam arti moral (Imam Barnadib, 1978: 14). Menurut Simon Philips dalam buku *Refleksi Karakter Bangsa* (2008:235), karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Berikutnya Koesoema (2007:80) menjelaskan bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik, atau gaya, atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan dan juga bawaan seseorang sejak lahir, sedang karakter bangsa sebagai kondisi watak yang merupakan identitas bangsa.

Unsur utama dalam pembentukan karakter bangsa adalah nilai-nilai budaya. Karena itu, pengembangan pendidikan nilai

budaya merupakan penentu totalitas kepribadian/ karakter bangsa yang berawal pada akar perjalanannya dan ditentukan oleh hasil proses aktualisasi nilai-nilai budaya tersebut. Pembangunan karakter suatu bangsa adalah suatu proses yang sifatnya berkelanjutan (*never ending process*) menuju pada kondisi karakter bangsa yang diinginkan. Identitas suatu bangsa adalah pilihan dan terbentuk dari pancaran karakter bangsa yang sudah melembaga/ mendarah daging atau menjadi kebiasaan sehari-hari sehingga menjadi karakter atau jati diri bangsa.

Pendidikan karakter merupakan upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai utama atau nilai-nilai positif kepada warga masyarakat agar menjadi warga bangsa yang percaya diri, tahan uji, dan bermoral tinggi, demokratis dan bertanggung jawab serta survive dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana dijelaskan Samsuri (2009:1 dan Zuchdi, 2008: 5) pendidikan karakter, pendidikan nilai, dan pendidikan moral sering disamakan. Karakter mencerminkan kepribadian yang berkaitan dengan moralitas namun kualitas moral itu sedemikian khas sehingga berbeda kualitas dengan orang lain atau kelompok masyarakat yang lain.

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu pendidikan yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*). Menurut Lickona (1992), tanpa ketiga aspek itu maka pendidikan karakter tidak akan efektif, dan pelaksanaannya pun harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan pendidikan karakter, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya.

Kecerdasan emosi adalah bekal terpenting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena dengannya seseorang akan dapat berhasil dalam menghadapi segala macam tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis.

Secara akademik, pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang tujuannya mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik itu, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Muatan pendidikan karakter secara psikologis mencakup dimensi *moral reasoning*, *moral feeling*, dan *moral behaviour* (Lickona, 1991) atau dalam arti utuh sebagai *morality* yang mencakup *moral judgment and moral behaviour* baik yang bersifat *prohibition-oriented morality* maupun *pro-social morality* (Piaget, 1967; Kohlberg, 1975; Berg, 1981).

Secara pedagogis, pendidikan karakter seyogyanya dikembangkan dengan menerapkan *holistic approach*, dengan pengertian bahwa “*Effective character education is not adding a program or set of programs. Rather it is a transformation of the culture and life of the school*” (Berkowitz, 2010). Sementara itu Lickona (1992) menegaskan bahwa: “*In character education, it’s clear we want our children are able to judge what is right, care deeply about what is right, and then do what they believe to be right-even in the face of pressure from without and temptation from within*”.

Dalam pengembangan pendidikan karakter di sekolah, institusi pendidikan atau sekolah harus menjadi lingkungan yang kondusif. Menurut Lewis (1996:8) pendidikan karakter akan senantiasa mengembangkan akhlak mulia dan kebiasaan yang baik bagi para peserta didik. Bulach (2002:80) menjelaskan guru dan orang tua perlu membuat kesepakatan tentang nilai-nilai utama apa yang perlu dibelajarkan misalnya: *respect for self, others, and property; honesty; self-control/discipline*. Dalam kaitan ini, Lickona (2000:48) menyebutkan beberapa nilai kebaikan yang perlu dihayati dan dibiasakan dalam kehidupan peserta didik agar tercipta kehidupan yang harmonis di dalam keluarga dan masyarakat. Beberapa nilai itu antara lain kejujuran, kasih sayang, pengendalian diri, saling menghargai atau menghormati, kerjasama, tanggung jawab, dan ketekunan. Pendidikan karakter bukan sekadar memiliki dimensi integratif, dalam arti mengukuhkan moral intelektual peserta didik atas dasar nilai-nilai kebaikan, sehingga menjadi pribadi yang mantap dan tahan uji, pribadi-pribadi yang cendekia, mandiri, dan bernurani tetapi juga bersifat kuratif secara personal maupun sosial.

Koesoema (2007:116) berpendapat bahwa pendidikan karakter dapat menjadi salah satu langkah untuk menyembuhkan penyakit sosial. Dalam konteks keindonesiaan pendidikan karakter adalah proses menyaturasikan sistem nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya Indonesia dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan karakter bangsa merupakan suatu proses pembudayaan dan transformasi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya bangsa (Indo-

nesia) untuk melahirkan insan atau warga negara yang ber peradaban tinggi, warga negara yang berkarakter. Karakter bangsa adalah sebuah keunikan suatu komunitas yang mengandung perekat kultural bagi setiap warga negara. Karakter bangsa menyangkut perilaku yang mengandung *core values* dan nilai-nilai yang berakar pada filosofi Pancasila dan simbol-simbol keindonesiaan.

Proses internalisasi nilai-nilai moral ke dalam domain afektif meliputi beberapa jenjang dan jenjang afeksi yang paling tinggi adalah karakterisasi (pembentukan karakter). Krathwohl dkk (1964) mengemukakan taksonomi domain afektif yang cakupannya secara hirarkhis meliputi: (1) *Receiving*, (2) *Responding*, (3) *Valuing*, (4) *Organization*, and (5) *Characterization* (Bloom, *et.al*, 1981: 301-302; Ringness, 1975: 21). Dengan demikian, karakterisasi adalah proses internalisasi nilai yang telah mencapai tingkatan paling tinggi/dalam. Penghayatan terhadap suatu nilai, pada tingkatan yang sangat dalam maka nilai itu telah mengkarakter atau menjadi penanda khas kepribadian orang yang bersangkutan.

Pendidikan karakter sejalan dengan pengembangan kurikulum pendidikan dasar (SD dan SMP) yang menekankan pada 4 (empat) pilar pendidikan yang ditetapkan UNESCO, yaitu belajar mengetahui (*learning to know*), menjadi dirinya sendiri (*learning to be*), belajar bekerja (*learning to do*) dan belajar hidup bersama (*learning to live together*). Pengembangan kurikulum (program belajar) di SMP harus memfasilitasi peserta didik untuk belajar lebih bebas dan mempunyai pandangan sendiri yang disertai dengan rasa tanggung jawab pribadi untuk

mencapai tujuan hidup dan tujuan bersama sebagai anggota masyarakat. Hal ini yang selanjutnya menjadi hakekat dari pendidikan karakter.

Pengertian karakter bangsa dalam Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa (2010:7) adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang unik, baik tercermin dalam kesadaran pemahaman rasa, karsa dan perilaku berbangsa dan bernegara dan hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa serta olah raga seseorang/sekelompok orang. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sapriya (2008:205) menjelaskan bahwa karakter bangsa dimaknai sebagai ciri-ciri kepribadian yang relative tetap, gaya hidup yang khas, cara berfikir, bersikap dan berperilaku yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Berangkat dari falsafah Negara Pancasila (Suparno, 2005: 90-91) menyebutkan karakter bangsa Indonesia terdiri dari lima butir sesuai dengan lima sila Pancasila, yakni sebagai berikut.

- 1) Bangsa Indonesia adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, patuh pada hukum pemerintah dan Undang Undang serta peraturan yang berlaku;
- 2) Bangsa Indonesia adalah manusia yang bangga sebagai warga Negara Indonesia serta mencintai Tanah air bangsa, berbudi pekerti baik, siap membela Negara dan angsa demi tegaknya Negara RI;
- 3) Bangsa Indonesia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah manusia yang memiliki jiwa kebersamaan, gotong royong dan toleransi;

- 4) Bangsa Indonesia adalah manusia yang berbadan sehat, bersih, hemat dan jujur, cermat, rajin tepat waktu serta disiplin tinggi;
- 5) Bangsa Indonesia adalah manusia yang memiliki jiwa dan rasa adil, kepedulian dan kemanusiaan.

Pendidikan karakter dengan penggalan nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi langkah bijaksana agar bangsa Indonesia tidak kehilangan karakter bangsa dengan keanekaragamannya. Peningkatan mutu pendidikan tersebut sekaligus untuk memunculkan generasi yang berkarakter. Karena itu pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat.

Kemendiknas (2010: 9-10) mengidentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai berikut.

Tabel Nilai Budaya dan Karakter

NILAI	DESKRIPSI
1. Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

NILAI	DESKRIPSI
3. Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5. Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6. Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7. Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8. Demokratis	Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9. Rasa Ingin Tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10. Semangat Kebangsaan	Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

NILAI	DESKRIPSI
11. Cinta Tanah Air	Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12. Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13. Bersahabat/Komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14. Cinta Damai	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15. Gemar Membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16. Peduli lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17. Peduli Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung-jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan YME.

2. Jati Diri Bangsa

Identitas nasional tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa. Istilah kepribadian sebagai suatu identitas merupakan keseluruhan atau totalitas dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Tingkah laku itu terdiri atas kebiasaan, sikap, sifat-sifat, dan karakter yang berada pada seseorang sehingga ia berbeda dengan orang lain. Jati diri atau identitas suatu bangsa adalah pilihan karena merupakan tatanan kehidupan masyarakat/ bangsa yang harus dibentuk. Jati diri bangsa terbentuk dari pancaran karakter bangsa yang sudah melembaga/ mendarah daging atau menjadi kebiasaan sehari-hari sehingga menjadi identitas atau ciri umum dari suatu bangsa. Dengan demikian pembangunan karakter bangsa adalah suatu proses yang sifatnya berkelanjutan (*never ending process*) menuju pada kondisi karakter bangsa yang diinginkan.

Sebagaimana dijelaskan Kaelan (2007:18) kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas dan keunikan sendiri-sendiri, yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas suatu bangsa Indonesia meliputi (1) faktor objektif, yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis, (2) faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

Menurut Kibawa (2010: 1) identitas berarti ciri-ciri, sifat-sifat khas yang melekat pada suatu hal sehingga menunjukkan

suatu keunikan dan membedakan dengan hal-hal lain. Proses konstruksi identitas dalam komunitas besar dan kompleks, yakni bangsa selalu melibatkan inovasi politis (*political innovation*). Dengan cara itu berbagai hal yang dipilih dan digunakan sebagai simbol identitas akan mendapat pengakuan sebagai milik bersama dan dapat didayagunakan untuk membangun solidaritas. Warga komunitas merasa menjadi bagian dari kebudayaan yang sama atau mempunyai identitas bersama, melalui perantaraan simbol-simbol yang penetapan dan pemaknaannya didasarkan pada konsensus. Bagi komunitas sederhana dan relatif homogen dengan interaksi sosial yang intensif dan intim, pemilihan simbol-simbol tertentu sebagai identitas kolektif cukup mudah dilakukan. Namun dalam komunitas yang besar dan kompleks dengan cakupan wilayah luas, kondisi lingkungan fisik yang beragam, dan kondisi sosiokultural heterogen pembentukan identitas bersama dapat berlangsung dalam proses yang seringkali penuh pertentangan.

Ernerst (1983: 1) menyebutkan inovasi politis untuk mencapai tujuan itu sebagai 'nasionalisme', yang dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu sebagai sentimen dan sebagai gerakan. Nasionalisme sebagai sentimen merupakan "*feeling of anger aroused by the violation of the principle, or the feeling of satisfaction aroused by its fulfillment*". Sementara sebagai gerakan, nasionalisme merupakan "*one actuated by sentiment of this kind*".

Meskipun penentuan batas-batas wilayah suatu bangsa lebih banyak mengekspresikan praktik politik kekuasaan tetapi sebenarnya juga ditujukan untuk mendefinisikan bahwa orang-

orang yang ada di dalamnya merupakan anggota dari komunitas dan kebudayaan yang sama. Oleh karena itu, bangsa/ negara tidak dapat dilihat sebagai unit administrasi politik semata melainkan lebih tepat disebut sebagai sebuah komunitas budaya (*cultural community*) (Eriksen, 1993: 99-102). Dengan demikian identitas bangsa ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Karena itu Castells (2002: 10) menyebutkan sebagai *Identity: must be situated historically*. Identitas bangsa berhubungan dengan pengalaman sebuah bangsa di masa lalu dan tidak dapat dipisahkan dengan jati diri bangsa.

Bab 4

REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

A. Revitalisasi

Secara kebahasaan, revitalisasi berarti proses, cara atau tindakan untuk memvitalkan (menganggap penting) kembali (Hoetomo, 2003: 418). Revitalisasi juga diartikan sebagai peninjauan ulang mengenai suatu hal untuk ditata, digarap, dan disesuaikan agar lebih bermanfaat dalam arti luas (Hastanto, 2002:1). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa revitalisasi pada hakikatnya adalah suatu upaya membuat sesuatu (budaya) dengan meninjau ulang akan kekurangannya untuk disesuaikan dengan kondisi zaman dalam upaya memenuhi kebutuhan yang lebih bermanfaat.

Konsep revitalisasi menyarankan perlunya bukti-bukti yang mendorong revitalisasi tidak ditentukan secara individual karena masing-masing dari dorongan atau motivasi mereka memperkuat dan berpengaruh satu sama lain. Untuk memenuhi dorongan tersebut diperlukan kriteria untuk memperkuat dalam menentukan warisan budaya yang seharusnya direvitalisasi yang

didasarkan pada filosofi, kepercayaan, sosio-budaya dan latar kesejarahan yang ditandai pada tradisi yang harmonis, teratur dengan kondisi lingkungan dan keindahan. Untuk masing-masing kriteria ini selalu berubah menurut persepsi masyarakatnya. Jika kriteria warisan budaya ini dapat dikelompokkan menurut posisi, makna, dan skala peranan maupun proses memantapkannya maka prioritas revitalisasi menjadi lebih mudah dilakukan.

Menurut Departemen Kimpraswil (2005), revitalisasi adalah upaya untuk menghidupkan kembali kawasan yang mati, yang pada masa silam penuh hidup, atau mengendalikan, dan mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki atau pernah dimiliki atau seharusnya dimiliki oleh sebuah kota. Menurut Hasan (2001), revitalisasi bertujuan untuk menghidupkan kembali kawasan pusat kota yang memudar atau menurun kualitas lingkungannya, meningkatkan nilai ekonomis kawasan yang strategis, merangsang pertumbuhan daerah sekitarnya, mendorong peningkatan ekonomi lokal dari dunia usaha dan masyarakat, memperkuat identitas kawasan, dan mendukung pembentukan citra kota.

Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik tetapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Untuk melaksanakan revitalisasi perlu keterlibatan masyarakat. Revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Kata vital mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Secara lebih jelas revitalisasi itu adalah membangkitkan

kembali vitalitas. Jadi, pengertian revitalisasi ini secara umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali.

B. Hakikat Pancasila

Perkataan Pancasila pada mulanya dipergunakan oleh pemeluk agama Budha di India. Ajaran Budha memuat berbagai ajaran moral di mana untuk setiap golongan berbeda kewajiban moralnya, seperti: Dasa-syila, Sapta-syila, dan Panca-syila. Ajaran Pancasila menurut Budha dimaksudkan sebagai lima aturan atau *“Five Moral Principles”* yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut agama Budha.

Kata Pancasila dalam khasanah kesusasteraan Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada ditemukan dalam keropak *“Negara Kertagama”* yang berupa kakawin (syair pujian) dalam pujangga istana bernama Empu Prapanca, di mana dapat ditemukan dalam sarga bait ke-2, sebagai berikut: *“Yatnaggegwani panca-syila kertasangskara bhisekaka krama”*, artinya Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan (Pancasila) itu, begitu pula dalam upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan.

Selanjutnya, dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular, istilah Pancasila diartikan *“berbatu sendi yang lima”* (Soegito, 1999) yang berarti pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila Krama), yang isinya tidak boleh melakukan keke-
rasan, mencuri, berjiwa dengki, berbohong, dan tidak boleh minum-minuman keras.

Pada jaman Majapahit, kepercayaan tradisi Agama Hindu Syiwa dan Agama Budha Mahayana serta campurannya Tantrayana hidup berdampingan secara damai. Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai menyebar ke seluruh penjuru tanah air, sisa-sisa pengaruh ajaran “Moral Budha” (Pancasila) masih dikenal di masyarakat Jawa, dalam pada itu muncul pula lima larangan, yang isinya meliputi larangan: mateni (membunuh); maling (mencuri); madon (berzina); mabok (minum-minuman keras); dan main (judi). Semua huruf dalam ajaran moral tersebut dimulai dengan huruf “M” atau dalam bahasa Jawa disebut “Ma”. Karena itu lima prinsip moral tersebut sering dinamakan sebagai “Ma-Lima”, yaitu lima larangan.

Perkembangan berikutnya, istilah Pancasila muncul kembali, pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Soekarno berpidato di sidang hari ketiga Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan lima hal untuk menjadi Dasar Negara Indonesia Merdeka dan memberi nama Pancasila. Demikianlah deskripsi singkat tentang Pancasila, selanjutnya bagaimana dengan hakikat Pancasila.

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila hakikatnya adalah sebagai dasar Negara (filsafat negara) sekaligus pandangan hidup (filsafat hidup) bangsa. Memahami hakikat Pancasila berarti memahami makna pokok nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua kedudukan dan fungsi tersebut bersifat hakiki. Karena itu, berbagai kedudukan dan fungsi Pancasila yang lain, seperti sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, ideologi nasional, perjanjian luhur, tujuan bangsa,

termasuk sebagai norma dasar dan kriteria dasar watak/kepribadian manusia Indonesia semuanya dapat dikembalikan pada sifat hakiki tersebut. Berdasarkan kedudukan nilai Pancasila yang hakiki itu lahir berbagai nilai dan fungsi Pancasila yang melandasi tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Bangsa Indonesia mewarisi nilai-nilai budaya dari nenek moyangnya. Sampai saat ini nilai-nilai budaya tersebut melandasi tata kehidupan masyarakat Indonesia. Sari dan puncak sosio-budaya masyarakat Indonesia adalah nilai-nilai yang melandasi tata kehidupan masyarakat yang disebut sebagai pandangan hidup. Sebagaimana setiap pribadi, manusia mempunyai keyakinan dan pandangan hidup yang dianggap terbaik, begitu pula bagi setiap bangsa.

Sari dan puncak nilai dalam sosio-budaya bangsa Indonesia tampak pada adanya (a) Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai Maha Pencipta dan Pengayom alam semesta, (b) Asas kekeluargaan, cinta kebersamaan sebagai satu keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak. Cinta dan kekeluargaan ini menjadi dasar terbentuknya masyarakat, (c) Asas musyawarah mufakat. Kebersamaan merupakan kumpulan banyak pribadi, warga, dan keluarga. Agar mereka tetap rukun dan bersatu maka keputusan ditetapkan atas dasar musyawarah mufakat, (d) Asas gotong royong. Keputusan yang ditetapkan atas dasar musyawarah mufakat untuk kebersamaan adalah tanggungjawab bersama. Jadi dilaksanakan bersama secara gotong

royong oleh dan untuk kebersamaan, (e) Asas tenggang rasa; saling menghayati keadaan dan perasaan antar warga, antar pribadi, saling menghargai dan menghormati dalam keragaman dan perbedaan. Saling menghormati hak, pendapat, keyakinan, dan agama masing-masing demi terpeliharanya kesatuan dan keharmonisan hidup bersama.

Berbagai asas mendasar Pancasila tersebut di atas merupakan sifat utama masyarakat Indonesia sepanjang sejarah. Tata kehidupan berdasarkan asas-asas tersebut telah membudaya dan merupakan watak masyarakat Indonesia. Karena itu, nilai-nilai dasar atau nilai-nilai ideal dalam sosio-budaya ini dianggap sebagai kepribadian Indonesia. Nilai-nilai dasar menjiwai dan melandasi tata kehidupan rakyat jauh sebelum Indonesia merdeka. Kesatuan, kerukunan, keharmonisan, dan kesejahteraan sebagai wujud pengamalan nilai dasar meyakinkan rakyat untuk selalu tetap percaya bahwa nilai dasar itu sebagai suatu keyakinan dan pandangan hidup. Nilai dasar pandangan hidup dipraktekkan sepanjang sejarah masyarakat Indonesia. Nilai dasar itu teruji kebenaran dan kebaikannya bahkan dapat menjamin kesatuan dan kerukunan, keserasian dan kesejahteraan. Keyakinan berdasarkan pada pandangan hidup Pancasila adalah mantap untuk ditingkatkan kedudukan dan fungsinya sebagai dasar negara.

2. Pancasila sebagai Dasar Negara RI

Oleh pendiri negara, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, UUD negara ditetapkan dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Di dalam Pembukaan UUD negara termaktub

dasar negara Pancasila. Ini berarti, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 bersifat yuridis-konstitusional. Maksudnya, nilai Pancasila sebagai norma dasar negara bersifat imperatif, mengikat dan memaksa semua yang ada di dalam wilayah kekuasaan hukum negara RI untuk setia melaksanakan, mewariskan, mengembangkan, dan melestarikan. Semua warga negara, pejabat atau pimpinan, lembaga negara, bahkan hukum perundangan wajib bersumber dan sesuai dengan nilai Pancasila. Dengan demikian, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berarti sebagai norma objektif dan norma tertinggi dalam negara, sumber dari segala sumber hukum yang berlaku bagi bangsa dan negara RI.

Penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam UUD 1945 tampak sebagai berikut.

- a. Nilai-nilai fundamental dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan penjelmaan sila-sila Pancasila, yang meliputi (1) pokok pikiran pertama: Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; negara mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan. (2) negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (3) negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/ perwakilan. (4) negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dengan memegang teguh cita-cita moral yang luhur.

- b. Nilai-nilai Pancasila (menjelma dalam Batang Tubuh, dalam pasal-pasalnya), misalnya: sila 1, menjelma dalam pasal 9 dan 29; sila 2 menjelma dalam pasal 26, 27, 28, 30, dan 31; sila 3, menjelma dalam pasal 1, 31, 32, 35, dan 36; sila 4, menjelma dalam pasal 1 ayat (2), 2-7, 19-21; dan sila 5, menjelma dalam pasal 27, 3, dan 34.

3. Pancasila sebagai suatu Filsafat

Dalam kehidupan bangsa Indonesia diakui bahwa nilai-nilai Pancasila adalah pandangan hidup yang berkembang dalam sosio-budaya bangsa Indonesia. Nilai Pancasila dianggap sebagai nilai dasar dan puncak budaya bangsa; karenanya, diyakini sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Begitu mendasarnya nilai itu dalam menjiwai dan memberikan watak (kepribadian, identitas) sehingga pengakuan atas kedudukan Pancasila sebagai filsafat bersifat mendasar.

Sebagai ajaran filsafat, Pancasila mencerminkan nilai dan pandangan mendasar dan hakiki rakyat Indonesia dalam hubungannya dengan sumber kesemestaan, yakni Tuhan Maha Pencipta. Asas Ketuhanan ini sebagai asas fundamental dalam kesemestaan dan dijadikan asas fundamental kenegaraan (negara atas Ketuhanan Yang Maha Esa). Asas-asas ini mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang religius dan atau teisme religius. Demikian pula, untuk sila-sila yang lain, yang secara bulat dan utuh mencerminkan asas kekeluargaan, cinta sesama, dan cinta keadilan.

4. Pancasila sebagai Ideologi Nasional

Suatu sistem filsafat pada tingkat perkembangan tertentu, melahirkan ideologi, yakni seperangkat nilai ide dan cita-cita beserta pedoman dan metode melaksanakan/ mewujudkannya. Umumnya, ideologi selalu mengutamakan asas-asas kehidupan politik dan kenegaraan sebagai satu kehidupan nasional yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan. Secara teoritis filosofis, ideologi bersumber pada sistem filsafat, dan merupakan pelaksanaan sistem filsafat. Dengan perkataan lain, suatu sistem filsafat dikembangkan dan dilaksanakan oleh suatu ideologi. Atas dasar konsep teoritis ini maka tidak mungkin suatu bangsa menganut dan melaksanakan suatu sistem ideologi yang tidak bersumber pada filsafat hidup atau filsafat negara mereka sendiri. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa sehingga Pancasila juga merupakan ideologi bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup tetapi bersifat terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan jaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila tetapi mengeksplisitkan wawasannya secara lebih kongkrit sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual.

5. Pandangan Integralistik dalam Filsafat Pancasila

Istilah integralistik berasal dari kata integral, yang berarti kebulatan dan keutuhan. Integral juga berarti kesatuan, keseluruhan, dan kekeluargaan. Jadi, paham integralistik adalah

suatu nilai atau asas yang mengutamakan adanya kebulatan atau keutuhan, kesatuan, dan kekeluargaan. Dengan demikian, warga atau anggota kesatuan keluarga itu sejajar dalam kebersamaan. Tiap warga mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama di dalamnya demi kebersamaan, kesatuan, dan kekeluargaan.

Nilai filsafat Pancasila pada dasarnya mengandung asas integralistik atau kekeluargaan. Hal ini tampak pada asasnya bahwa bangsa Indonesia adalah satu keluarga bangsa Indonesia, dalam satu susunan (rumah tangga) negara kesatuan yang dilandasi asas/ paham persatuan. Asas ini tampak dalam sila 3, 4, dan 5 yang berintikan makna Persatuan Indonesia dengan asas musyawarah mufakat, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara universal asas kekeluargaan itu dilandasi sila 2 dan dijiwai nilai sila 1.

Asas-asas integralistik dalam filsafat Pancasila mengajarkan pokok-pokok ajaran bahwa: (a) manusia sebagai makhluk yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Pencipta cenderung untuk berbakti dan mengabdikan kepada-Nya, cinta sesama dalam keluarga, merasa bagian dari masyarakat, bangsa dan negara. (b) manusia sebagai makhluk utama diberkati dengan potensi harkat dan martabat luhur untuk mencintai kebenaran dan keadilan, berbakti kepada Tuhan, sesama dan kepada alam (flora dan fauna) demi kelestariannya. (c) manusia Indonesia, sebagai bangsa dan negara adalah keluarga besar bangsa Indonesia dengan kondisi psikologis, budaya dan alamnya merupakan bagian dari umat manusia, budaya dan dunia. Karenanya, bangsa Indonesia menerima hak-hak asasinya

dari dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, alam, kemanusiaan dan kebudayaan secara nasional, internasional, dan universal. Asas-asas mendasar ini senantiasa menjiwai dan melandasi masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara.

Di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (vide Pasal 37 UU No. 20 tahun 2003) Pancasila tidak lagi dicantumkan sebagai mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Padahal Surat Keputusan Direktorat Jenderal Dikti Depdiknas No. 38/DIKTI/ KEP/2002 tanggal 18 Juli 2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi yang merupakan penjabaran SK Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi, merupakan landasan kuat untuk tetap melaksanakan Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Dalam hubungan tersebut, dalam ilmu teknik perundang-undangan dikukuhkan oleh peraturan lain yang lebih tinggi kedudukannya sehingga memperoleh legitimasi yang kuat. Namun dengan tidak diwajibkannya mata kuliah Pancasila di dalam UU No. 20 tahun 2003 menimbulkan kegoncangan paradigmatis. Meskipun di dalam Pasal 2 UU No. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, namun jika Pasal 37 UU No. 20 tahun 2003 tidak mewajibkan Pendidikan Pancasila diberikan kepada semua arah pendidikan maka Pancasila hanya bersifat fakultatif bukan merupakan suatu *conditio sine quanon*. Dengan demikian, secara esensial seharusnya Pancasila dijadikan sebagai dasar

atau landasan berpijak yang ideal untuk memahami fondasi filosofis, sosiologis, dan kultural dari berbagai ilmu pengetahuan, pengembangan relasi iman dan ilmu.

C. Nilai-nilai Pancasila

Rumusan Pancasila secara material memuat nilai-nilai manusiawi sedangkan sebagai dasar Negara, Pancasila memiliki ciri khas yang hanya dimiliki bangsa Indonesia. Atas dasar itu keberadaan Pancasila yang pada hakekatnya adalah nilai-nilai yang berharga. Yang memuat nilai-nilai dasar manusiawi dan nilai-nilai kodrati yang melekat pada setiap individu manusia diterima oleh Bangsa Indonesia (Paulus Wahono, 2011:73).

Notonagoro membahas Pancasila, bahwa sifat manusia sesuai dengan sifatnya manusia memiliki sifat individual dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Dengan memaknai nilai-nilai dasar manusiawi tersebut, wajar bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki landasan hubungan antara manusia dengan Tuhan penciptanya, dengan sesamanya, dan dengan lingkungan alamnya (Notonagoro, 1987: 12-23)

Sejak awal pembentukannya, ideologi Pancasila merupakan ideologi dari, oleh dan untuk bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa secara operasional dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan konsensus politik yang menjanjikan suatu komitmen untuk bersatu dalam sikap dan pandangan guna mewujudkan tujuan nasional (Paulus Wahono, 2011: 91-92).

Nilai-nilai yang telah disepakati mewajibkan bangsa Indonesia untuk mewujudkan sesuai dengan situasi dan kondisi nyata serta menghindari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar. Sebagai ideologi terbuka Pancasila memiliki keterbukaan, keluwesan yang harus diterima dan dilaksanakan oleh seluruh golongan yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional harus mampu memberikan wawasan, asas dan pedoman normatif bagi seluruh aspek serta dijabarkan menjadi norma moral dan norma hukum.

Akselerasi sosialisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi Nasional. Ideologi Pancasila ini selayaknya disosialisasikan secara sederhana, jelas, praktis dan terus menerus, baik dalam pemikiran, perkataan, perilaku dan keteladanan, sehingga mampu menarik dan mengetuk hati setiap rakyat Indonesia. Ideologi Pancasila tetap menghormati hak individu dan martabat manusia. Pada perkembangan ke depan, ideologi Pancasila tidak melancarkan indoktrinasi, melainkan menggunakan cara persuasif dan dialog sehingga mampu berperan, membimbing semua warga negara secara bersama dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara secara sadar, ikhlas dan menaati serta mengamalkan kelima sila dari Pancasila. Ideologi Pancasila memaklumi adanya perubahan nilai sebagai indikator adanya dinamika masyarakat dalam mencapai tujuan nasional.

Upaya menjaga dan melestarikan Pancasila dilakukan secara preventif dan represif. Usaha pengamanan preventif antara lain melakukan usaha meningkatkan pengertian, pemahaman, penghayatan dan pengamalannya melalui pendidikan,

penerangan, pembinaan kesadaran nasional, pembinaan kesadaran wawasan nusantara dan usaha-usaha pencegahan lainnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kurikulum dan isi pendidikan yang memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan terus ditingkatkan dan dikembangkan di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Dengan demikian Pendidikan Pancasila di Sekolah Menengah perlu terus-menerus ditingkatkan ketepatan materi instruksionalnya, dikembangkan kecocokan metodologi pengajarannya, dan dibenahi efektivitas manajemen pembelajaran termasuk kualitasnya. Dalam operasionalnya, ketiga muatan tersebut menjadi menu wajib dari kurikulum yang berlaku secara nasional.

Berdasarkan pada asas pemikiran tersebut maka pendidikan Pancasila perlu dilaksanakan di semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta. Kompetensi lulusan pendidikan Pancasila yang diharapkan adalah suatu tindakan yang intelegen, penuh tanggung jawab dan sebagai seorang warga negara mampu memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan pemikiran berlandaskan Pancasila. Sifat intelegen yang dimaksudkan tampak pada kemahiran, ketepatan dan keberhasilan bertindak, sedangkan sifat penuh tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan dilihat dari iptek, etika ataupun kepatutan agama dan budaya.

1. Nilai Ketuhanan

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama.

Secara lebih terperinci nilai-nilai Pancasila sila pertama meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Merupakan bentuk keyakinan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan.
- b. Negara menjamin bagi setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
- c. Tidak boleh melakukan perbuatan yang anti ketuhanan dan anti kehidupan beragama.
- d. Mengembangkan kehidupan toleransi baik antar intern maupun antara umat beragama.
- e. Mengatur hubungan Negara dan agama, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, serta nilai yang menyangkut hak asasi yang paling asasi.

Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila pertama, antara lain:

- a. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain.

- c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- d. Tidak memaksakan salah satu agama kepada orang lain.

2. Nilai Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

Secara Umum dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini :

- a. Merupakan bentuk kesadaran manusia terhadap potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma kebudayaan pada umumnya.
- b. Adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil dan bermutu tinggi karena kemampuannya berbudaya.
- c. Manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia, meyakini adanya prinsip persamaan harkat dan martabat sebagai hamba Tuhan.
- d. Mengandung nilai cinta kasih dan nilai etis yang menghargai keberanian untuk membela kebenaran, santun, dan menghormati harkat kemanusiaan

Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila kedua adalah sebagai berikut.

- a. Mengakui persamaan derajat, harkat, dan martabat manusia.
- b. Saling mencintai sesama manusia.
- c. Mengembangkan sikap tenggang rasa.

- d. Tidak semena-mena kepada orang lain.
- e. Suka memberi bantuan kepada korban bencana alam.

3. Nilai Persatuan

Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia.

Secara umum dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini :

- a. Persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanan.
- b. Manifestasi paham kebangsaan yang memberi tempat bagi keragaman budaya atau etnis.
- c. Menghargai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat.
- d. Menjunjung tinggi tradisi perjuangan dan kerelaan untuk berkorban dan membela kehormatan bangsa dan Negara.
- e. Adanya nilai patriotik serta penghargaan rasa kebangsaan sebagai realitas yang dinamis.

Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila ketiga, adalah sebagai berikut.

- a. Mengembangkan sikap saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan.
- b. Mengembangkan sikap saling asah, saling asih, dan saling asuh.
- c. Tidak membedakan warna kulit, suku dan etnik.

- d. Membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan Negara.

4. Nilai Kerakyatan

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Secara umum dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini:

- a. Paham kedaulatan rakyat yang bersumber kepada nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.
- b. Musyawarah merupakan cermin sikap dan pandangan hidup bahwa kemauan rakyat adalah kebenaran dan keabsahan yang tinggi.
- c. Mendahulukan kepentingan Negara dan masyarakat.
- d. Menghargai kesukarelaan dan kesadaran daripada memaksakan sesuatu kepada orang lain.
- e. Menghargai sikap etis berupa tanggung jawab yang harus ditunaikan sebagai amanat seluruh rakyat baik kepada manusia maupun kepada Tuhannya.
- f. Menegakkan nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan yang bebas, aman, adil dan sejahtera.

Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila keempat, antara lain :

- a. Menghargai perbedaan pendapat
- b. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain

- c. Mengembangkan sikap demokratis
- d. Mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama

5. Nilai Keadilan

Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah dan batiniah. Secara umum dapat dilihat dalam penjelasan berikut:

- a. Setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial.
- b. Tidak adanya golongan tirani minoritas dan mayoritas.
- c. Adanya keselarasan, keseimbangan, dan keserasian hak dan kewajiban rakyat Indonesia.
- d. Kedermawanan terhadap sesama, sikap hidup hemat, sederhana dan kerja keras.
- e. Menghargai hasil karya orang lain.
- f. Menolak adanya kesewenang-wenangan serta pemerasan kepada sesama.
- g. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila kelima, antara lain :

- a. Memajukan perbuatan yang luhur
- b. Bersikap adil terhadap sesama manusia
- c. Menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan
- d. Berani bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan

- e. Membiasakan hidup sederhana dan hemat guna menciptakan keseimbangan kehidupan.

Bab 5

PEMBELAJARAN PKn YANG DIHARAPKAN

A. Pembelajaran PKn sebagai Media Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila

Secara historis empiris, terjadinya penyimpangan ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan kenegaraan, dapat dikatakan dimulai sejak Nopember 1945 sampai sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ketika pemerintah republik Indonesia mengubah haluan politiknya menjadi sistem demokrasi liberal dan akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September 1965 yang menjadi pemicu tumbanganya pemerintahan Orde Lama. Pemerintahan Orde Baru berusaha mengoreksi segala penyimpangan yang dilakukan oleh rezim sebelumnya terutama dalam pengamalan Pancasila dan UUD 1945. Meskipun demikian rezim orde baru pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan UUD 1945, serta cenderung ke praktik liberalistik-kapitalistik dalam mengelola negara.

Pada tahun 1998 muncul gerakan reformasi yang dahsyat dan berhasil mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru (Afiff,

2006). Rezim reformasi ini semestinya mampu memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 yang dilakukan oleh Orde Baru. Namun, saat ini pemaknaan Pancasila nampaknya bergeser pada kepentingan kekuasaan semata dan kepentingan politik sehingga janji-janji kemerdekaan yang tertuang dalam Pancasila belum terealisasi sepenuhnya. Karena itulah maka menjadi keharusan untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran PKn. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia pada hakikatnya merupakan (1) pendidikan nilai-moral, (2) pendidikan sosial, (3) pendidikan politik, dan (4) pendidikan bela Negara.

Pendidikan moral atau pendidikan karakter perlu dilakukan sejak usia dini karena tidak mudah untuk mengubah karakter seseorang dalam waktu sekejap. Pendidikan karakter dapat membangun kepribadian bangsa. Pendidikan bagi anak harus memasukkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang di dalamnya semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dan menghadapi globalisasi. Warga negara Indonesia dalam hal ini anak muda perlu memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku, cinta tanah air serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemampuan bela negara dalam rangka upaya mempertahankan dan mengamankan bangsa dan negara perlu dimiliki oleh seluruh warga negara. Kemampuan itu harus secara dini diberikan kepada warga negara yang berhak wajib ikut serta dalam bela negara. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, meningkatkan keyakinan

akan ketangguhan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Ketangguhan ideologi bangsa harus didukung oleh pengamalannya. Nilai-nilai yang terkandung di setiap sila Pancasila diimplementasikan dalam pembelajaran PKn.

Para peserta didik perlu dibantu untuk hidup berdasarkan pada nilai moral yang benar, mempunyai watak yang baik, dan bertanggungjawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Terjadinya degradasi moral, berdasar penelitian pendahuluan disebabkan karena: (1) kurang dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa, (2) keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila, (3) mudarnya kesadaran pada nilai-nilai budaya berbangsa dan bernegara, (4) karena bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan (5) ancaman disintegrasi bangsa dan melemahnya kemandirian bangsa.

Permasalahan moral diakibatkan mudahnya akses informasi. Keterbukaan arus informasi kalau tidak diantisipasi dan dibentengi oleh nilai-nilai Pancasila dapat menyebabkan pergeseran moral pada generasi penerus bangsa, seperti pergaulan bebas, seks bebas, narkoba, budaya konsumerisme dan lain sebagainya. Pemaknaan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dapat mengembalikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemaknaan kembali dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila ini haruslah dimulai dari sosialisasi dan penanaman nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda penerus bangsa melalui pendidikan sehingga dapat

membentengi generasi muda dari ancaman dan tantangan yang dibawa arus globalisasi.

Gunawan (2006), menjelaskan bahwa revitalisasi Pancasila berarti revitalisasi semangat kemandirian bukan semangat ketergantungan, semangat gotong royong bukan semangat keserakahan mencari untung diri sendiri, semangat kejujuran bukan kemunafikan, semangat keadaban bukan semangat balas dendam, semangat kerakyatan bukan semangat mengejar kekuasaan semata, semangat menyelamatkan lingkungan alam demi generasi yang akan datang, dan di atas semuanya itu, semangat menjunjung tinggi moralitas melalui percaya pada kekuasaan tertinggi Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai ideologi, Pancasila bersifat terbuka, luwes, dan fleksibel tetapi bukan berarti nilai dasar yang terkandung di dalamnya dapat diubah atau diganti dengan dasar lain. Pancasila sebagai ideologi terbuka mempunyai ciri bahwa nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya dan religious masyarakatnya, menerima reformasi dan penguasa (pemerintah) bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanah rakyat. Untuk itu dalam pembelajaran PKn perlu dikombinasikan dengan berbagai pendekatan nilai. Ciri utama PKn bukan hanya mentransfer ilmu/ pengetahuan melainkan lebih berorientasi pada membelajarkan PKn, yakni diarahkan pada bagaimana siswa belajar dan melakoni kehidupan yang baik. Dengan demikian aspek pembelajaran PKn bukan sekedar pengetahuan tetapi juga moral dan nilai. Guru harus memahami dan menerapkan berbagai model pendidikan nilai.

Content PKn dibedakan yang sifatnya *structural formal* dan *informal*. *Content* yang bersifat *structural formal* merupakan isi yang tidak boleh ditawar harus sama untuk seluruh siswa, sekolah, seluruh kabupaten/ kota, propinsi dan seluruh bangsa. *Content* yang bersifat *structural formal* ini merupakan perekat, pemersatu Bangsa, memperkuat semangat nasionalisme Indonesia dan NKRI. Adapun *content informal* bersifat kontekstual tergantung lingkungan tempat di mana siswa berada sehingga memungkinkan pembelajaran dikembangkan secara kontekstual.

Dalam konteks masyarakat Surakarta maka nilai-nilai kearifan lokal Budaya Jawa perlu digali lebih mendalam sehingga bisa disosialisasikan kepada generasi muda. Nilai-nilai seperti gotong-royong, toleransi, tepo seliro, solidaritas dan lain sebagainya sangat baik jika ditanamkan pada siswa di sekolah. Dengan demikian harapan memiliki generasi muda yang berbudaya akan terwujud. Nilai-nilai kearifan lokal pada dasarnya merupakan inti dari Pancasila, karena itu menurut salah satu nara sumber Sr bahwa:

“dunia pendidikan mulai dari yang dasar sampai perguruan tinggi dalam menyusun *mapping* kekuatan kearifan lokal sebagai basis ketahanan nasional agar berfungsi sebagai *problem solver*. “Untuk mencapainya, harus memiliki kualitas, *social responsibility*, dan *global citizenship*. Jadi menciptakan lulusan yang berkualitas global”

Pendidikan Kewarganegaraan perlu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kearifan lokal/ nilai-nilai

budaya/ pendidikan budi pekerti. Hal ini perlu dilakukan karena PKn merupakan alat/ sarana untuk mengembangkan nilai kearifan lokal. PKn bukan semata-mata hanya mengajarkan pasal-pasal Undang-undang Dasar, lebih jauh bahwa PKn juga perlu mengkaji perilaku warga negara dalam hubungannya dengan warga negara lain dan alam sekitarnya. Objek studi PKn adalah warga Negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan dan negara. Menurut Somantri (2001:276), termasuk dalam objek *studi civities* ialah tingkah laku, tipe pertumbuhan pikir, potensi yang ada dalam setiap diri warga negara, hak dan kewajiban, cita-cita dan aspirasi, kesadaran (patriotisme, nasionalisme, pengertian internasional, moral Pancasila), usaha atau kegiatan dan partisipasi serta tanggung jawab.

1. Model Pembelajaran PKn Berbasis Kearifan Lokal

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dirumuskan strategi pengembangan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan untuk meningkatkan jati diri bangsa. Dari hasil diskusi kelompok dan lokakarya berbagai komponen pemangku kepentingan pendidikan dirumuskan arah Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Berbasis Kearifan Lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan untuk meningkatkan jati diri bangsa sebagai berikut.

Materi *content informal* dalam PKn yang bersifat kontekstual dan sesuai dengan realitas sosial budaya peserta didik, yakni budaya Jawa.

- a. *Core value* budaya Jawa bersumber dari prinsip hormat dan rukun yang kemudian menjadi harmonisasi, selanjutnya dijabarkan dan dipetakan dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai karakter.
- b. Untuk mempersiapkan peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik (*to be smart dan good citizen*) maka pembelajaran dilakukan melalui (1) belajar sambil berbuat (*learning by doing*), (2) belajar memecahkan masalah sosial (*social problem solving learning*), (3) belajar melalui perlibatan sosial (*socio-participatory learning*), dan (4) belajar melalui pembiasaan serta interaksi sosial-kultural (*enculturation and socialization*).
- c. Proses pembelajaran PKn melalui (1) belajar sambil berbuat (*learning by doing*), (2) belajar memecahkan masalah sosial (*social problem solving learning*), (3) belajar melalui perlibatan sosial (*socio-participatory learning*), akan direalisasikan dengan model pembelajaran *Problem Based Learning*, *Project Based Learning* dan Klarifikasi Nilai.
- d. Proses belajar melalui pembiasaan dan interaksi sosial-kultural (*enculturation and socialization*) direalisasikan melalui budaya sekolah dan role model dari guru, kepala sekolah, dan orang tua.
- e. Untuk merealisasikan tujuan pendidikan PKn menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) dan warga negara yang aktif (*active citizen*).

2. Model Pembelajaran *Problem Based Learning* dan Klifikasi Nilai

Problem Based Learning (PBL) dipilih untuk merealisasikan model pembelajaran PKn di SMP berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan untuk meningkatkan jati diri bangsa. Model pembelajaran ini dilandasi teori konstruktivis dimana pada model ini pembelajaran dimulai dengan menyajikan masalah nyata yang penyelesaiannya membutuhkan kerjasama antara siswa, guru memandu siswa menguraikan rencana pemecahan masalah menjadi tahap-tahap kegiatan. Guru memberi contoh mengenai penggunaan keterampilan dan strategi yang dibutuhkan supaya tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan. Guru menciptakan suasana kelas yang fleksibel dan berorientasi pada upaya penyelidikan oleh siswa.

Kehidupan identik dengan menghadapi masalah. Proses belajar hanya terjadi kalau siswa dihadapkan kepada masalah dari kehidupan nyata untuk dipecahkan. *Problem Based Learning* utamanya dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir pemecahan masalah dan keterampilan intelektual, pengalaman nyata atau stimulus dan menjadi pelajar yang otonom dan mandiri (Ibrahim, 2000). Dengan *Problem Based Learning* siswa dilatih menyusun sendiri pengetahuannya, mengembangkan ketrampilan pemecahan masalah, mandiri serta meningkatkan kepercayaan diri. Selain itu dengan pemberian masalah yang autentik, siswa dapat membentuk makna dari bahan pelajaran melalui proses belajar

selanjutnya menyimpulkan dalam ingatan sehingga dapat digunakan di kemudian hari (Nurhadi, 2004).

Tujuan dalam proses pembelajaran ini adalah melatih kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah, menguraikan masalah dan merevisinya ketika melakukan presentasi akan menambah informasi sesuai kompetensinya (Taufik Amir, 2010). Sejalan dengan pendapat di atas Trianto (2011:95) mengemukakan tujuan dari pembelajaran PBL yaitu: (1) membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah, (2) belajar berperan sebagai orang dewasa yang autentik (nyata), dan (3) menjadi siswa yang mandiri.

Pembelajaran PBL berpusat pada siswa dimana para siswa harus mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri, mengidentifikasi untuk mengetahui pemahaman lebih baik dan mengatur masalah serta menentukan kearah mana agar mendapat informasi. Dalam pembelajaran ini guru berperan sebagai penyaji, mengadakan dialog, membantu dan memberikan fasilitas penyelidikan. Selain itu guru juga memberikan dorongan dan dukungan yang dapat meningkatkan pertumbuhan intelektual siswa (Ibrahim, 2000). Hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembelajaran ini adalah pemberian masalah kepada siswa yang berfungsi sebagai motivasi untuk melakukan proses penyelidikan. Di sini guru mengajukan masalah, membimbing, dan memberikan petunjuk dalam memecahkan masalah.

Menurut Suparno (1997) peran guru dalam proses pembelajaran PBL adalah (1) menyediakan pengalaman belajar

yang memungkinkan siswa bertanggung jawab dalam membuat rancangan, proses dan penelitian, (2) memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dalam mengekspresikan gagasan serta ide mereka yang bersifat ilmiah, dan (3) memonitor, mengevaluasi dan menunjukkan apakah pemikiran siswa dapat didorong secara aktif.

Selanjutnya, model pembelajaran Klarifikasi Nilai adalah model pembelajaran penumbuh kembangan nilai moral yang bersentuhan langsung dengan upaya pencarian langsung oleh anak didik secara cerdas, dialogis dan reflektif terhadap problematika dan dilemma moral yang akan selalu dihadapi anak. Karena itu model strategi klarifikasi nilai memiliki arti yang sangat strategis terutama untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri anak itu sendiri dalam rangka penumbuh kembangkan nilai moral secara cerdas dan elegan bukan melalui paksaan dan tekanan dari luar diri anak itu sendiri (Candee R, 1977: 1249-1250).

Dengan memanfaatkan klarifikasi nilai peserta didik akan merefleksikan dan berfikir secara kritis dan komprehensif akan nilai-nilai yang dimilikinya dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan situasi riil kehidupan sehari-hari atau mengkaitkannya dengan persoalan-persoalan yang telah pernah ada dalam kehidupan (Louis E, Rath, Merrill Harmil & Sidney B. Simon, 1978: 5).

Pembelajaran klarifikasi nilai disebut juga sebagai inkuiri nilai karena dapat mengembangkan sikap dan kepribadian. Sikap dan kepribadian yang berkembang dengan belajar inkuiri antara lain meragukan kebenaran yang telah lama dan ingin

mengetahui hal yang baru, menghargai penalaran sebagai cara untuk memperoleh suatu kebenaran, menghargai data sebagai alat untuk menguji kebenaran, objektif terhadap data yang ada serta menghindari prasangka, bersedia menerima keputusan sementara sebelum mendapatkan kepastian jawaban (Beyer, 1979: 18-20).

Peserta didik dengan menggunakan belajar penemuan dapat menghubungkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Pembelajaran dengan penemuan dalam hal ini inkuiri merupakan pembelajaran yang mengembangkan intelektual peserta didik, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berhasil mengembangkan potensi seorang peserta didik secara maksimum (Hasan, 1996: 76), hal ini seperti yang diharapkan Ausubel (1963) dapat mengembangkan belajar yang penuh makna atau *meaningful learning*.

Proses penemuan nilai merupakan karakteristik pembelajaran inkuiri selain induktif adalah keterampilan proses. Belajar dengan keterampilan proses berarti belajar sebagai proses. Proses cara menemukan pengetahuan, melibatkan mental peserta didik untuk menghayati subjek yang dipelajari. Inkuiri bukan berarti bertanya tetapi mencari makna lebih dalam dengan kegiatan intelektual agar dapat lebih menghayati (Wiriaatmadja, 2002: 137).

Salah satu komponen utama inkuiri adalah proses, berupa operasi proses intelektual. Inkuiri adalah keterampilan proses sebagai pendekatan belajar-mengajar yang mengarah kepada pengembangan kemampuan mental, fisik, dan sosial sebagai penggerak kemampuan dalam diri peserta didik. Menurut

Semiawan (1988: 10-13), pendekatan keterampilan proses menekankan prinsip (1) motivasi, sebagai pembangkitkan daya dalam pribadi peserta didik yang mendorong untuk melakukan sesuatu, (2) latar atau konteks, yaitu menggunakan pengetahuan atau pengalaman yang telah dimiliki peserta didik, (3) keterarahan pada fokus tertentu dengan merumuskan batasan-batasan masalah yang akan dipecahkan murid, (4) hubungan sosial yang menekankan kerjasama, (5) belajar sambil bekerja dengan menekankan aktivitas mental dan fisik, (6) perbedaan perorangan sehingga tidak ada anak yang tertekan, (7) menemukan, yang menekankan proses belajar di mana anak tidak hanya menerima informasi atau konsep tetapi didorong untuk mencari dan menemukan sendiri informasi serta konsep dan nilai tersebut, dan (8) pemecahan masalah dengan menekankan pada kepekaan peserta didik terhadap berbagai masalah dan kemudian mendorong memecahkan masalah-masalah tersebut.

Perlunya pengembangan inkuiri nilai didasarkan bahwa penumbuh kembangan nilai-nilai moral pada anak didik ternyata tidak hanya sebatas mengupayakan dan menciptakan bentuk-bentuk interaksi sosial yang sangat kondusif dan positif bagi tumbuhkembangnya nilai-nilai moral dalam kehidupan anak yang akhirnya bermuara pada perilaku moral dalam kehidupan keseharian mereka. Namun yang lebih penting dan memiliki arti yang amat strategis dari yang pertama adalah menciptakan kemampuan bagi anak-anak didik secara cerdas mampu memahami dan menemukan nilai-nilai moral dalam dinamika interaksi sosialnya yang penuh dengan tantangan,

terutama pada kondisi-kondisi sosial yang dinilai tidak kondusif bagi penumbuhkembangan nilai-nilai moral.

Peserta didik pada pembelajaran inkuri dilatih ketajaman berpikirnya sehingga menjadi warga masyarakat yang mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dilatih mengidentifikasi masalah, membuat perkiraan berbagai aspek sosial yang merupakan sebab akibat masalah tersebut, menggali informasi berkenaan dengan permasalahan, dan akhirnya dilatih menyusun alternatif pemecahan masalah. Pembelajaran inkuiri merupakan suatu proses, peserta didik dibimbing mencari makna lebih dalam dengan aktivitas intelektual agar menghayati bukan hanya mendengarkan. Tujuan pembelajaran inkuiri tidak hanya pencapaian pengetahuan dan pemahaman tetapi juga domain kognitif tinggi (analisis dan sintesis). Domain afektif terjadi dalam aktivitas menjabarkan nilai dan membentuk sikap, domain motorik terjadi dalam bentuk keterampilan aspek-aspek teknis inkuiri. Menurut Wiriaatmadja (2002), proses inkuiri dalam pembelajaran meliputi (1) perumusan masalah, (2) memperkenalkan konsep-konsep, (3) memformulasikan hipotesis, (4) mengumpulkan data dan informasi untuk menguji hipotesis, dan (5) penarikan kesimpulan.

Implementasi model pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal adalah menumbuh kembangan nilai-nilai moral. Karena itu klarifikasi nilai merupakan pilihan dalam menjawab dinamika psiko-sosial dalam diri peserta didik. Tertujunya pilihan pada klarifikasi nilai dikarenakan model pengajarannya sangat menekankan akan terwujudnya kemampuan anak untuk memilah,

memilih, memahami, dan bereksplorasi secara cerdas terhadap nilai-nilai moral dalam konteks materi yang dipelajari.

B. Draft Model Pembelajaran PKn Berbasis Kearifan Lokal ('Mobel PKn Berkelok')

1. Pengembangan 'Mobel PKn Berkelok' Budaya Jawa

Desain awal perencanaan "Mobel PKn Berkelok" dapat dideskripsikan sebagai berikut.

a. Sintak

- 1) Tahap pertama : penyiapan kelas dan peserta didik masuk dalam model.

Dalam kegiatan apersepsi, guru menjelaskan model yang akan dilaksanakan. Guru mulai mengenalkan topik pembelajaran, menyampaikan tujuan, dan mengarahkan siswa ke dalam model dengan cara mengaitkan kemerdekaan berpendapat dengan kebebasan mengarah pada kerusuhan dan anarkhi. Guru memutar video *demo-demo kebebasan berpendapat*. Kegiatan ini dilakukan untuk mulai mengajak siswa mengidentifikasi nilai yang seharusnya dikembangkan oleh siswa dalam kemerdekaan berpendapat.

- 2) Tahap kedua: penyampaian informasi materi

Pada tahap ini guru menyampaikan informasi berupa materi pengantar dan inti serta konsep-konsep penting dalam materi pokok. Hal yang tidak boleh dilupakan adalah

dalam masyarakat Surakarta/ Jawa sudah ada tuntunan dan tatanan yang disebut dengan kearifan lokal.

- 3) Tahap ketiga: membimbing siswa memilah dan memilih nilai dan sikap yang harus dikembangkan dalam kemerdekaan berpendapat.

Pada tahap ini guru mulai menjajagi kesiapan dan kemampuan siswa dengan melaksanakan tanya jawab tentang materi yang akan dibahas. Dalam tahap ini siswa secara bersama-sama dalam kelompok dengan didampingi guru mulai menganalisis nilai yang seharusnya dikembangkan dalam kemerdekaan berpendapat. Guru memberikan penjelasan secara garis besar mengenai materi pembelajaran, topik diskusi kelompok, dan keterkaitan antara keduanya. Guru juga mengorganisasikan siswa dalam kelompok dan menjelaskan mengenai lembar kerja kelompok serta bentuk diskusi yang akan dilaksanakan.

- 4) Tahap keempat: membimbing diskusi kelompok dan diskusi kelas

Tahap elaborasi merupakan lanjutan dari tahap eksplorasi. Siswa mulai berdiskusi tentang kajian masalah mengenai kasus-kasus pemahaman kemerdekaan berpendapat yang salah dan menganalisis nilai-nilai apa saja yang dapat dikembangkan dan yang harus ditinggalkan sehingga tidak terjadi tindakan yang anarkhis. Atas kajian dan identifikasi, memilah dan memilih nilai siswa akan dapat menyimpulkan bahwa terdapat nilai-nilai yang harus dikem-

bangkan dan diterapkan dalam rangka mengemukakan pendapat agar dapat mencegah tindakan yang anarkhis sebagaimana dalam masalah yang sedang dibahas. Setelah diskusi kelompok usai, masing-masing perwakilan kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan peserta kelompok lain dapat bertanya tentang kasus yang disajikan karena setiap kelompok mengkaji kasus yang berbeda. Pada akhir diskusi siswa mengumpulkan pekerjaan masing-masing. Dalam tahap ini guru berperan sebagai pemandu dalam pembentukan kelompok dan pelaksanaan diskusi.

5) Tahap kelima: evaluasi dan refleksi hasil diskusi.

Pada tahap konfirmasi peran guru sangat dibutuhkan untuk meluruskan kesalahpahaman dalam diskusi yang telah dilaksanakan, sekaligus memberi penjelasan tentang hal-hal yang belum diketahui siswa.

6) Tahap keenam: memberikan penghargaan dan penguatan

Dalam proses penguatan nilai, guru berperan sebagai nara sumber yang menjelaskan bahwa kemerdekaan berpendapat tetap harus memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal budaya jawa seperti “*sepi ing pamrih rame ing gawe*”, “*berbudi bowo leksono*”, “*mikul duwur mendem jero*” yakni sikap yang harus dipahami dan dikembangkan oleh generasi muda. Guru membimbing siswa untuk bersama-sama membuat kesimpulan hasil diskusi.

b. Sistem Sosial

Dalam sistem sosial yang dimaksud di sini guru bersikap demokratis dan kooperatif, antara lain dengan memberikan kebebasan pada siswa untuk mengemukakan pendapat, terbuka untuk menerima pendapat dari siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan materi, serta guru bertanggung jawab terhadap gagasan yang muncul dalam kelompok-kelompok belajar. Selain itu guru juga menjadi fasilitator untuk mendukung tercapainya proses pembelajaran, untuk itu guru dituntut memiliki kreativitas yang tinggi guna menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Sementara itu sebagai motivator, guru lebih banyak memberikan dorongan kepada siswa untuk lebih meningkatkan hasil belajarnya.

c. Prinsip Reaksi

Prinsip reaksi dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada siswa selama mengikuti proses pembelajaran di kelas. Dengan demikian diharapkan siswa memiliki semangat yang tinggi, aktif, dan mampu berpikir kritis terhadap berbagai permasalahan. Peran guru antara lain menyediakan sumber dan media belajar, yaitu video dan artikel yang berkaitan dengan model, menyampaikan materi PKn kelas VII dan hubungannya dengan prinsip-prinsip kemerdekaan berpendapat serta membimbing siswa dalam menganalisis relevansi nilai dengan materi yang dibahas dalam kehidupan sehari-hari.

d. Sistem Pendukung

“Mobel PKn Berkelok” membutuhkan sistem pendukung berupa hal-hal berikut.

- 1) Rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat langkah-langkah pembelajaran beserta sumber dan media yang diperlukan.
- 2) Lembar kerja kelompok sebagai media implementasi model yang menggunakan strategi pembelajaran kooperatif PBL - Klarifikasi nilai.
- 3) Lembar evaluasi untuk mengukur penguasaan kompetensi siswa dan skala sikap untuk mengukur tingkat karakter dan jati diri bangsa.

e. Dampak Pengiring

“Mobel PKn Berkelok” dirancang untuk meningkatkan karakter dan jati diri Bangsa serta sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Pengembangan model juga bertolak dari pembelajaran kontekstual yang mengutamakan kebermanaknaan pembelajaran, dimana hal tersebut hanya akan diperoleh melalui pembangunan pengetahuan oleh peserta didik, bukan melalui indoktrinasi dan hafalan semata. Menurut Joyce (2009:325) mengkonstruksi makna dari setiap mata pelajaran dengan cara mengeksplorasi, menjelaskan, mendiskusikan, dan mendebat topik-topik tertentu. Melalui kegiatan tersebut siswa tidak hanya dilatih untuk mencapai tujuan akademik, tetapi juga tujuan sosial. Didalam mengeksplorasi sumber peserta didik akan mendapatkan pengalaman intelektual, sedangkan dalam kegiatan menjelaskan, mendiskusikan dan mendebat

topik tertentu mereka akan dilatih untuk mengorganisasikan ide secara rasional dan menyampaikan pendapat secara santun. Jadi melalui pembelajaran kontekstual terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh, *pertama*, siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan dan makna dalam pembelajaran PKn sehingga tidak membosankan, *kedua*, pengetahuan yang dikonstruksi bersama tidak ditanamkan secara indoktrinatif akan lebih bertahan lama, dan *ketiga*, siswa dapat berlatih untuk mengeksplorasi sumber, mengorganisasikan ide secara rasional, dan menyampaikan pendapat secara santun. Dengan demikian “Mobel PKn Berkelok” ini dapat meningkatkan kompetensi intelektual dan keterampilan sosial siswa.

Pembelajaran kontekstual menandakan adanya tujuh komponen penting yang harus dipenuhi, dan komponen tersebut tercermin sebagai berikut:

1. *Konstruktivisme*, pengetahuan dibangun melalui proses asimilasi dan akomodasi oleh siswa bersama guru. Proses ini tercermin dalam setiap fase kegiatan pembelajaran, yaitu apersepsi, eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Dalam fase-fase itu guru dan siswa saling berinteraksi membangun pengetahuan melalui tanya jawab dan diskusi.
2. *Inkuiri*, prosedur inkuiri terdiri dari tahapan: melontarkan permasalahan, mengumpulkan data dan verifikasi, mengumpulkan data dan eksperimentasi, merumuskan penjelasan, dan menganalisis proses inkuiri. Proses inkuiri tercermin dalam kegiatan elaborasi dimana siswa mengkaji artikel, mendiskusikan kasus, dan menganalisis nilai, serta

menjelaskan hasil diskusi melalui presentasi dan tanya jawab.

3. *Bertanya*, kegiatan ini berlangsung pada fase apersepsi, eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Dalam kegiatan ini guru bukan satu-satunya sumber jawaban sehingga siswa lain berhak memberikan jawaban.
4. *Masyarakat Belajar*, proses sosial dalam kegiatan pembelajaran ini terjadi pada fase elaborasi ketika siswa bekerjasama dalam kelompok.
5. *Pemodelan*, pendemonstrasian pembelajaran dilakukan ketika siswa mempresentasikan hasil diskusi dan menjawab pertanyaan yang diajukan. Pada fase ini akan tampak sejauh mana peserta didik memahami materi dalam proses pembelajaran.
6. *Refleksi*, proses refleksi dilakukan pada fase konfirmasi dimana guru dan siswa secara bersama-sama melakukan refleksi terhadap materi dan kegiatan pembelajaran.
7. *Penilaian autentik*, penilaian diambil dari keseluruhan proses pembelajaran yaitu aktivitas siswa secara individual, proses kerjasama dalam kelompok, pada saat presentasi dan diskusi bersama, serta penilaian kognitif.

Model juga dikembangkan dengan pembelajaran kooperatif sehingga terjadi interaksi antara siswa dengan siswa dengan intensitas yang lebih tinggi, untuk itu secara sadar atau tidak siswa akan belajar untuk berhati-hati dalam menempatkan diri dalam komunitas, menyampaikan pendapat, menuliskan laporan diskusi, memberikan jawaban kepada

teman. Para siswa akan belajar mengembangkan sikap tenggang rasa, toleransi, dan saling menghargai untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuhan. Oleh karena itu Nurhadi (dalam Thobroni, A 2011:287) menyatakan bahwa hasil belajar yang diperoleh dalam pembelajaran kooperatif tidak hanya nilai-nilai akademis tetapi juga nilai-nilai moral dan budi pekerti, berupa rasa tanggung jawab pribadi, rasa saling menghargai, saling membutuhkan, saling memberi, dan saling menghargai keberadaan orang lain. Senada dengan yang diungkapkan Joyce (2009: 77) bahwa strategi pembelajaran kooperatif berpotensi meningkatkan seluruh dimensi pembelajaran siswa. Strategi pembelajaran yang dipakai dalam “Mobel PKn Berkelok” adalah investigasi kelompok dan debat.

Deskripsi desain awal perencanaan ‘Mobel PKn Berkelok’ sebagaimana di atas dapat disederhakan dalam bentuk bagan desain sebagai berikut.

Desain Awal Perencanaan ‘Mobel PKn Berkelok’

Sintak ‘Mobel PKn Berkelok’ di SMP

Struktur

Tahap pertama : penyiapan kelas dan peserta didik masuk dalam model

Tahap kedua : penyampaian informasi materi

Tahap ketiga : membimbing siswa mengklarifikasi nilai dan sikap yang harus dikembangkan dalam kemerdekaan pendapat

Tahap keempat : membimbing diskusi kelompok dan diskusi kelas

Tahap kelima : evaluasi dan refleksi hasil diskusi

Tahap keenam : memberikan penghargaan dan penguatan

Sistem Sosial

Model ini bersifat kooperatif sehingga guru bertindak sebagai fasilitator, inisiator, kreator, dan pengawas pembelajaran. Adapun siswa sebagai pusat kegiatan pembelajaran yang bertindak secara individu maupun kelompok aktif dalam membangun pengetahuan melalui tanya jawab dan diskusi.

Prinsip Reaksi

Peran guru dalam implementasi model antara lain menyediakan sumber dan media belajar, yaitu video dan artikel yang berkaitan dengan model, menyampaikan materi PKn kelas VII dan hubungannya dengan kemerdekaan mengemukakan pendapat dan membimbing siswa dalam mengklarifikasi nilai dengan materi yang dibahas dalam kehidupan sehari-hari.

Sistem Pendukung

‘Mobel PKn Berkelok’ membutuhkan sistem pendukung berupa:

1. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat langkah-langkah pembelajaran beserta sumber dan media yang diperlukan.

2. Lembar kerja kelompok sebagai media implementasi mode yang menggunakan strategi pembelajaran kooperatif-klarifikasi nilai dan PBL.
3. Lembar evaluasi, untuk mengukur penguasaan kompetensi siswa dan skala sikap untuk mengukur karakter dan jati diri bangsa.

Dampak Pengiring

Model dirancang untuk meningkatkan karakter dan jati diri bangsa melalui pembelajaran kooperatif PBL dan kontekstual yang juga melatih siswa untuk mengklarifikasi nilai dan sikap yang seharusnya dikembangkan dalam konteks kemerdekaan berpendapat.

Desain Perencanaan ‘Mobel PKn Berkelok’ di SMP

Mata Pelajaran : PKn

Kelas / Semester : VII / 2

Standar Kompetensi : 4. Menampilkan perilaku kemerdekaan mengeluarkan pendapat

Kompetensi Dasar : 4.1 Menjelaskan hakikat kemerdekaan mengeluarkan pendapat

Alokasi Waktu : 2 X 40 menit (1 x pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran :

Melalui diskusi kelompok siswa dapat :

- Menjelaskan pengertian mengeluarkan pendapat
- Menjelaskan perundang-undangan yang mengatur kebebasan mengeluarkan pendapat
- Menjelaskan hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat
- Menjelaskan bentuk-bentuk menyampaikan pendapat di muka umum

- Menjelaskan tata cara mengemukakan pendapat secara baik dan benar
- Menjelaskan akibat pembatasan kemerdekaan mengemukakan pendapat
- Menjelaskan konsekwensi kebebasan mengeluarkan pendapat tanpa batas.

B. Core Value Budaya Jawa : Rukun dan Hormat

- dapat dipercaya (*Trustworthines*)
- Rasa hormat dan perhatian (*Respect*)
- Tekun (*Diligence*)
- Tanggungjawab (*Responsibility*)
- Kewarganegaraan (*Citizenship*)

C. Materi Ajar

- Pengertian mengeluarkan pendapat
- Perundang-undangan yang mengatur kebebasan mengeluarkan pendapat
- Hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat
- Bentuk-bentuk menyampaikan pendapat di muka umum
- Tata cara mengemukakan pendapat secara baik dan benar
- Akibat pembatasan kemerdekaan mengemukakan pendapat
- Konsekwensi kebebasan mengeluarkan pendapat tanpa batas

D. Model Pembelajaran: *Cooperatif learning* dan Klarifikasi Nilai

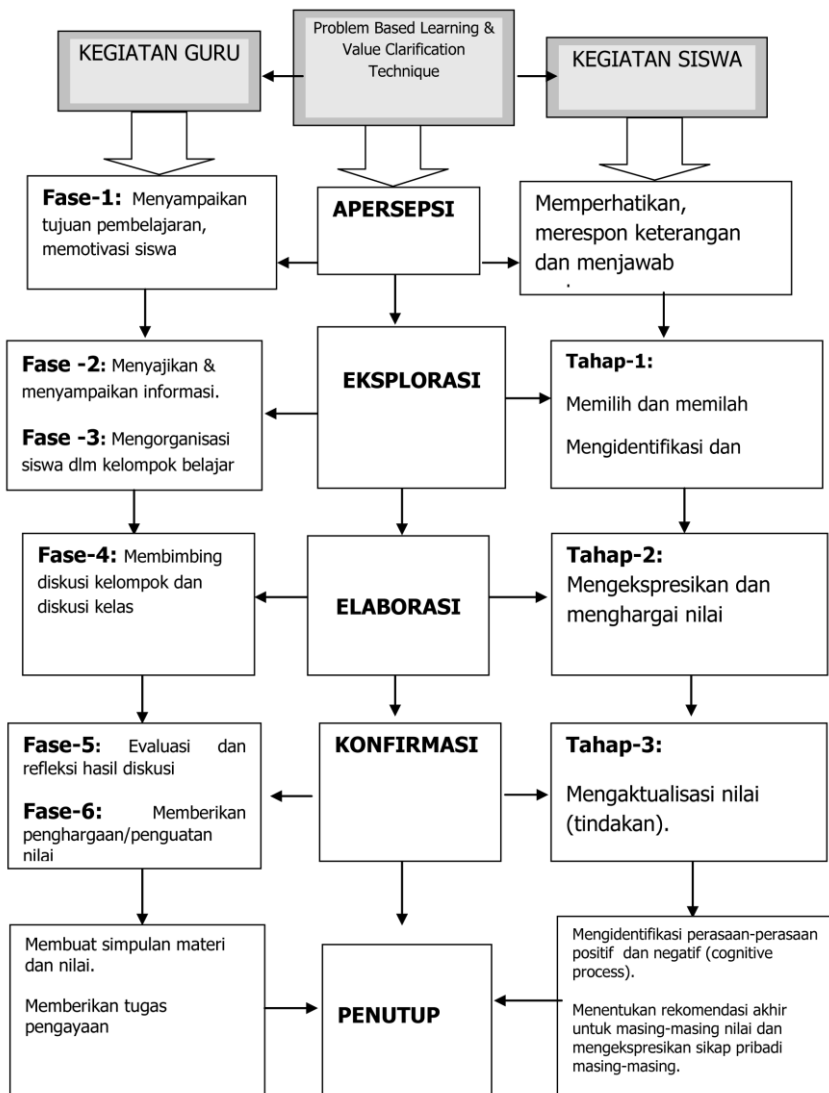
E. Alat dan sumber :

- Alat : LCD, foto, dan film berbagai aksi mengeluarkan pendapat
- Sumber : Buku Paket

F. Evaluasi : Proses dan hasil.

G. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran model pembelajaran

DESAIN 'MOBEL PKn BERKELOK'



APERSEPSI

Fase I : Menyampaikan tujuan & memotivasi siswa

- Guru memberi motivasi.
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
- Guru menjelaskan, pembelajaran ini selain akan membahas topik permasalahan juga mendeskripsikan nilai-nilai yang dapat dikembangkan dari permasalahan yang dikaji.
- Guru menjelaskan konsep nilai dan sumber nilai, antara lain adalah nilai kearifan lokal.
- Siswa mendeskripsikan konsep nilai, memilah, dan memilih nilai.

EKSPLORASI

Fase II: Guru menyampaikan informasi

Fase III: Guru mengorganisasi siswa dalam kelompok belajar

Tahap ke-1 : Siswa memilih nilai mengklasifikasi nilai

Tahap ke-2 : Siswa menghargai dan mengekspresi pilihan nilai

- Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan dibahas.
- Guru menjelaskan konsep nilai dan pentingnya nilai bagi individu maupun kelompok masyarakat.
- Siswa memperhatikan penjelasan tentang materi, mempelajari dan mendeskripsikan nilai-nilai berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam gambar.
- Guru melibatkan siswa mencari informasi.
- Siswa melalui diskusi memilih nilai dan mengklasifikasi nilai yang relevan.

ELABORASI

Fase IV: Guru membimbing diskusi kelompok bekerja dan belajar
Tahap ke-3: Aktualisasi dan internalisasi nilai dalam bentuk tindakan

- Guru memberikan penguatan siswa untuk menelusuri berbagai sumber.
- Guru memfasilitasi siswa dalam diskusi kelompok.
- Melalui diskusi kelompok, siswa mengekspresikan pilihan nilai yang relevan.
- Siswa secara kooperatif dan kolaboratif mempresentasikan hasil diskusi.
- Melalui diskusi kelas, siswa mengekspresikan dan menghargai pilihan nilai dengan menunjukkan fakta pendukungnya.
- Siswa berkompetisi menemukan kartu mengeluarkan pendapat dan makna simbolismenya sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan dalam diskusi.

KONFIRMASI

Fase V : Evaluasi

Fase VI : Memberikan penghargaan

Tahap ke-3: Aktualisasi dan internalisasi nilai dalam bentuk tindakan

- Guru bersama siswa meluruskan dan menyimpulkan.
- Guru memfasilitasi siswa untuk memberikan penguatan tentang nilai-nilai yang bisa diteladani relevansinya dengan kehidupan sehari-hari.

- Siswa menunjukkan contoh-contoh sikap/ perbuatan. Lingkup aktivitas cognitive process maupun life style adalah kriteria kesuksesan internalisasi nilai.
- Guru melakukan penilaian dan /atau refleksi.
- Guru memberikan penghargaan bagi kelompok.

PENUTUP

- Siswa menyatakan posisi, alasan, menguji, dan mengaktualisasikan nilai yang dipilih.
- Guru memberikan penguatan.

2. Hasil Validasi Model

Draf “Model PKn Berkelok” divalidasi oleh tim ahli yang terdiri dari dua pakar, yaitu pakar pembelajaran PKn dan pakar teknologi pembelajaran. Aspek-aspek dalam draft model pembelajaran yang divalidasi meliputi kelayakan teori pendukung, kelayakan sintak, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak instruksional, dan dampak pengiring. Selain memberikan skor pada indikator masing-masing aspek para ahli juga diminta memberikan kesimpulan akhir mengenai kelayakan model, memberikan catatan, dan saran-saran untuk perbaikan.

Hasil uji validasi dari para ahli terhadap draft model dideskripsikan sebagai berikut. *Pertama*, untuk aspek kelayakan teori pendukung dengan indikator 6 butir yang meliputi: teori dan model pembelajaran sosial, teori sistem dalam pembelajaran, teori pembelajaran PKn, teori pembelajaran klarifikasi nilai, teori pembelajaran kooperatif, teori pembelajaran PBL

skore totalnya sebesar 25. *Kedua*, untuk aspek kelayakan sintak dengan jumlah indikator 4, yang meliputi: fase-fase dalam sintak merupakan kegiatan pembelajaran yang logis, fase-fase sintak memuat jenis kegiatan pembelajaran yang didukung secara wajar oleh aspek-aspek strategi belajar kooperatif, fase-fase dalam sintak memuat secara jelas peran guru dan siswa, dalam sintak memuat tradisi yang ada di lingkungan sekitar siswa jumlah skore totalnya 17. *Ketiga*, untuk sistem sosial dengan indikator 4 butir, yang meliputi: ada kejelasan pola hubungan guru dan siswa, pola hubungan guru dan siswa memperlihatkan guru sebagai fasilitator dan pembimbing, ada kejelasan hubungan guru dan siswa dalam kegiatan kelompok, ada kejelasan hubungan guru dan siswa dalam kegiatan individu skore akhirnya 17. *Keempat*, aspek prinsip reaksi dengan indikator 4 butir, yang meliputi: perilaku guru yang berlaku dan model dinyatakan dengan jelas, perilaku guru dalam kegiatan siswa secara individu/kelompok dinyatakan dengan jelas, perilaku guru dalam kegiatan mendorong, menelusuri, dan menginterpretasi dinyatakan dengan jelas, perilaku guru dalam kegiatan diskusi dan presentasi dinyatakan dengan jelas skore akhirnya 17. *Kelima*, aspek sistem pendukung dengan indikator 4 butir, yang meliputi: kegiatan pembelajaran ditunjukkan dengan jelas pada rencana pembelajaran, media mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, lembar latihan lanjutan pendukung pencapaian tujuan pembelajaran, lembar evaluasi sesuai dengan tujuan pembelajaran skore totalnya 17. *Keenam*, untuk aspek dampak pembelajaran dan dampak pengiring dengan indikator 6 butir, yang meliputi: jenis-jenis dampak

pembelajaran menunjukkan arah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, jenis-jenis dampak pembelajaran dinyatakan dengan jelas, jenis-jenis dampak pembelajaran cukup logis, jenis-jenis dampak pengiring menunjukkan arah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, jenis-jenis dampak pengiring dinyatakan dengan jelas, jenis-jenis dampak pengiring cukup logis total skorenya 23. Ketujuh, untuk aspek pelaksanaan pembelajaran dengan indikator 4 butir, yang meliputi: tugas perencanaan dinyatakan dengan jelas, penjabaran kegiatan kelompok dinyatakan dengan jelas, peran guru dalam membantu siswa pada kegiatan individu/kelompok dinyatakan dengan jelas, adanya penanganan situasi dalam kegiatan skore akhirnya 18.

Dengan demikian melihat hasil penilaian para ahli di atas maka dapat dinyatakan bahwa dari 32 indikator yang telah divalidasi dengan standar penilaian 5 diperoleh nilai total 134 dan nilai rata-rata 4,18. Nilai tersebut termasuk ke dalam kategori baik. Karena itu dapat dinyatakan bahwa model pembelajaran yang dikembangkan mempunyai kategori baik.

3. Hasil Uji Validasi Perangkat Pembelajaran

Dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) juga dikembangkan beberapa prosedur yang mengarah pada langkah-langkah pembelajaran kooperatif PBL dan Klarifikasi Nilai. Karena itu, bentuk, prosedur atau aspek yang akan divalidasi oleh ahli meliputi: format, isi, dan bahasa.

Hasil penilaian perangkat pembelajaran oleh para ahli dapat dideskripsikan sebagai berikut. *Pertama*, untuk aspek format dengan jumlah indikator 4, yang meliputi: kejelasan

pembagian materi, sistem penomoran jelas, pengaturan ruang/ tata letak, jenis/ukuran huruf sesuai skore totalnya 19. *Kedua*, aspek isi dengan indikator 7 butir, yang meliputi: kebenaran isi/materi, isi sesuai dengan standar kompetensi kurikulum, pemilihan strategi pendekatan metode dan sarana pembelajaran dilakukan dengan tepat sehingga memudahkan siswa untuk belajar, kegiatan guru dan siswa diurutkan secara jelas, kesesuaian urutan materi, kesesuaian alokasi waktu yang digunakan, dan kelayakan sebagai perangkat pembelajaran memperoleh skore akhir 30. *Ketiga*, aspek bahasa dengan jumlah indikator 4 butir, yang meliputi: tata bahasa baik, struktur kalimat sederhana, kejelasan petunjuk dan arahan, komunikatif dan mudah dimengerti nilai akhirnya 16.

Dengan demikian berdasarkan hasil penilaian para ahli terhadap perangkat pembelajaran di atas maka dapat dinyatakan bahwa dari 15 indikator yang telah divalidasi, dengan standar penilaian 5 diperoleh nilai total 65 dan nilai rata-rata 4,33. Nilai tersebut termasuk ke dalam kategori baik. Karena itu dapat dinyatakan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan mempunyai kategori baik.

Bab 6

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PKn ‘BERKELOK’

A. Uji Kelompok Kecil (Uji Terbatas)

- *Deskripsi Uji Implementasi Siklus Ke-1*

Uji implementasi terbatas model pembelajaran dilakukan dengan dua siklus. Uji siklus pertama yang dikenakan pada kelompok terbatas hasilnya dapat dideskripsikan ke dalam beberapa bagian, yakni dimulai dari kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, observasi, dan refleksi.

1. Perencanaan Pembelajaran

Perangkat pembelajaran untuk uji terbatas-1 (UT-1) menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah diperbaiki berdasarkan hasil validasi dan masukan dari ahli dan praktisi. Sebelum melaksanakan uji coba, RPP telah telah dipelajari dan dipahami ulang agar langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dalam perencanaan dapat terlaksana. Selain itu disiapkan media pembelajaran berupa

gambar dan peristiwa yang menggambarkan kemerdekaan berpendapat. Pengembangan model pertama dilakukan di SMPN 10 Surakarta dengan Ibu Guru B dan di SMPN 21 dengan Bpk S serta dua Tim Peneliti bertindak sebagai observer.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran menggunakan RPP SMP kelas VII semester 2, yakni pada standar kompetensi: 4. Menampilkan perilaku kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan kompetensi dasar: 4.1 Menjelaskan hakekat kemerdekaan mengeluarkan pendapat dengan alokasi waktu: 2 X 40 menit.

Tujuan Pembelajaran, meliputi: siswa dapat menjelaskan hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat, siswa dapat menunjukkan contoh-contoh kemerdekaan mengemukakan pendapat di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk mengeluarkan pendapat di sekolah, keluarga, dan masyarakat umum, serta siswa dapat membuat contoh bentuk-bentuk mengeluarkan pendapat di sekolah, keluarga, dan masyarakat umum.

Core Value Budaya Jawa: rukun dan hormat. Indikator Nilai yang diharapkan: toleransi, rasa hormat dan perhatian, tekun, tanggung jawab, mengutamakan kepentingan umum, dan menjaga ketertiban umum. Adapun untuk materi ajar, meliputi: hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat, bentuk-bentuk menyampaikan pendapat di muka umum, dan tata cara mengemukakan pendapat secara baik dan benar. Model pembelajaran meliputi *cooperatif learning* dan klarifikasi nilai. Metode Pengajaran yang digunakan ceramah bervariasi dan diskusi kelompok.

pok. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keterampilan proses dan CTL. Langkah-langkah pembelajaran menggunakan tahapan sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelum ini.

Sumber Belajar, meliputi: buku teks PKn siswa kelas VII, UUD 1945 dan UU No. 9/1998, artikel/berita di berbagai media massa, dan foto-foto/gambar kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Adapun evaluasi yang digunakan meliputi evaluasi proses, yakni mengukur aktivitas belajar individual dan partisipasi siswa dalam kegiatan kelompok/ kelas serta alat evaluasinya menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. Evaluasi hasil belajar mengukur kompetensi sesuai dengan tujuan pembelajaran.

3. Hasil Observasi dan Refleksi Siklus Ke-1

- a. Pembelajaran secara umum belum berjalan baik. Pada tahap apersepsi guru menayangkan berbagai kejadian anarkhis karena pemahaman kemerdekaan berpendapat yang kebablasan. Suasana kelas mulai hidup tetapi guru belum mengkaitkan dengan nilai, norma dan hukum untuk mencegah kemerdekaan berpendapat yang kebablasan.
- b. Guru belum melakukan tanya jawab tentang berbagai gambar dan kejadian kebebasan berpendapat. Guru belum memancing peserta didik bagaimana agar kebebasan berpendapat tidak menjurus pada anarkhi perlu norma, aturan dan hukum. Salah satu sumber nilai/ norma adalah norma budaya.

- c. Pada saat penayangan kejadian/ gambar, guru belum membimbing siswa untuk mengidentifikasi nilai yang harus ditinggalkan dan yang harus diutamakan dalam kemerdekaan berpendapat.
- d. Guru terlalu lama menggunakan waktu untuk apersepsi, untuk membahas kejadian tersebut sehingga nilai-nilai kearifan lokal budaya jawa berkaitan dengan kemerdekaan berpendapat belum dijelaskan secara tuntas.
- e. Pada saat eksplorasi guru kurang memberi penjelasan tentang inti materi pertemuan dan lembar kerja siswa belum dijelaskan kepada siswa sehingga pada saat elaborasi, yakni diskusi siswa dengan kelompoknya belum bisa berjalan lancar.
- f. Proses klarifikasi nilai yang seharusnya dilakukan siswa belum maksimal sehingga siswa pilihan nilai dan aktualisasi nilai berupa tindakan banyak yang belum relevan.
- g. Model pembelajaran belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran yang disiapkan tim peneliti bersama dengan guru.

4. Hasil Diskusi dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran sebagaimana di atas, setelah dilakukan diskusi dan refleksi bersama tim peneliti dan guru kolaborator disepakati hal-hal berikut.

- a. SK dan KD siklus pertama akan diulang lagi dalam pelaksanaan pembelajaran karena pada siklus I substansi materi

belum dapat dieksplorasi oleh guru dan siswa sehingga juga belum dimaknai isinya.

- b. Untuk mengurangi kebingungan guru hanya digunakan model pembelajaran kooperatif dan klarifikasi nilai. Sintak tidak ada perubahan tetapi kalau PBL dicantumkan sebagai model, guru agak rancu dengan sintak klarifikasi nilai. Berdasarkan permintaan guru kolaborator pada siklus ke-2 akan menggunakan kooperatif dan klarifikasi nilai dengan tetap dipayungi oleh CTL karena mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya di lingkungan peserta didik, yakni budaya Jawa.
- c. Guru perlu menambah pengetahuan dan perbenda-haraan tentang nilai-nilai kearifan budaya Jawa sehingga dapat memperkaya penggalian nilai-nilai karakter.
- d. Agar lebih memudahkan guru dalam menerapkan langkah-langkah yang ada di dalam RPP maka dilakukan sedikit perubahan pada format penulisan pada kolom.
- e. Pada saat diskusi kelompok peserta didik agak kebingungan sehingga guru harus menjelaskan pada tiap-tiap kelompok sehingga memakan waktu. Untuk itu perlu dibuatkan lembar kerja untuk diskusi kelompok. Dengan demikian juga memudahkan guru untuk mengarahkan peserta didik pada substansi setiap tahapan pembelajaran.
- f. Guru belum sepenuhnya memahami isi atau substansi kegiatan dalam model pembelajaran terutama langkah-langkah klarifikasi nilai. Untuk itu guru perlu memahami langkah-langkahnya sehingga dapat mengarahkan kegiatan siswa dalam mengklarifikasi nilai.

- g. Untuk kelancaran proses pembelajaran maka sebelumnya peserta didik dan guru dikondisikan agar benar-benar siap melaksanakan model (mempelajari materi dan menelusuri nilai-nilai kearifan budaya Jawa)

- ***Deskripsi Uji Implementasi Siklus Ke-2***

Pada tahap UT ke-2, uji implementasi model dilaksanakan di dua sekolah, yakni di SMPN 10 dengan Guru B dan di SMPN 21 dengan guru S. Uji implementasi terbatas model pembelajaran siklus kedua juga dideskripsikan ke dalam beberapa bagian yang dimulai dari kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, observasi, dan refleksi sebagaimana pada siklus pertama.

1. **Perencanaan Pembelajaran**

Perangkat pembelajaran untuk implementasi model siklus ke-2 menggunakan RPP yang pertama, dengan alasan pada siklus pertama pembelajaran belum bisa terlaksana, yakni baru sampai pada tahap apersepsi dan eksplorasi. Media pembelajaran selain power point juga menggunakan tayangan berbagai peristiwa demonstrasi dari para buruh dan mahasiswa yang menunjukkan “pemahaman kemerdekaan berpendapat yang kurang tepat”. Untuk kegiatan pembelajaran siswa sudah disiapkan lembar kerja masing-masing kelompok dan sekaligus sebagai petunjuk langkah-langkah dalam mengerjakan dan membahas permasalahan dalam kelompok.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran siklus ke-2 ini juga menggunakan RPP di SMP kelas VII semester 2, yakni pada standar kompetensi: 4. Menampilkan perilaku kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan kompetensi dasar: 4.1 Menjelaskan hakekat kemerdekaan mengeluarkan pendapat dengan alokasi waktu: 2 X 40 menit. Tujuan pembelajaran, bahwa setelah selesai diharapkan para siswa dapat menjelaskan hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat, dapat menunjukkan contoh-contoh kemerdekaan mengemukakan pendapat di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk mengeluarkan pendapat di sekolah, keluarga, dan masyarakat umum, serta siswa dapat membuat contoh bentuk-bentuk mengeluarkan pendapat di sekolah, keluarga, dan masyarakat umum.

Core Value Budaya Jawa: rukun dan hormat. Indikator Nilai yang diharapkan: toleransi, rasa hormat dan perhatian, tekun, tanggung jawab, mengutamakan kepentingan umum, dan menjaga ketertiban umum. Adapun materi ajarnya adalah hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat, bentuk-bentuk menyampaikan pendapat di muka umum, tata cara mengemukakan pendapat secara baik dan benar. Model pembelajaran meliputi *cooperatif learning* dan klarifikasi nilai. Metode Pengajaran, ceramah bervariasi dan diskusi kelompok. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keterampilan proses dan CTL. Langkah-langkah pembelajaran menggunakan tahapan sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelum ini.

Sumber Belajar, meliputi: buku teks PKn siswa kelas VII, UUD 1945 dan UU Nomor 9/1998, artikel/berita di berbagai media massa, dan foto-foto/gambar kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Adapun evaluasi yang digunakan meliputi evaluasi proses, yakni mengukur aktivitas belajar individual dan partisipasi siswa dalam kegiatan kelompok/ kelas serta alat evaluasinya menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. Evaluasi hasil belajar mengukur kompetensi sesuai dengan tujuan pembelajaran.

3. Hasil Observasi dan Refleksi Siklus Ke-2

- a. Hasil observasi aktivitas guru dalam pembelajaran diperoleh data penerapan sintak 84 (sangat baik), prinsip reaksi 84 (sangat baik), sistem sosial 80 (baik), sistem penunjang 82 (sangat baik), dan nilai rata-ratanya 82 (sangat baik).
- b. Dari hasil observasi dilakukan diskusi reflektif mengenai pelaksanaan pembelajaran uji coba siklus ke-2. Hasil diskusi reflektif menyimpulkan bahwa guru sudah memahami dan mampu melaksanakan seluruh tahapan model.
- c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sekaligus merupakan apersepsi, guru telah melaksanakan langkah-langkah pembelajaran sebagaimana dalam RPP yang disusun. Guru telah menyampaikan informasi berkaitan dengan materi dan nilai kearifan lokal budaya Jawa yang dapat dijadikan rujukan dalam mengekspresikan kemerdekaan berpendapat.
- d. Pada tahap elaborasi guru telah mampu mengorganisasikan peserta didik dalam diskusi kelompok. Pada tahap ini

secara jelas dapat diamati bahwa peserta didik melalui diskusi kelompok telah mampu memilah dan memilih nilai, karena itu kelompok dapat menunjukkan kasus atau peristiwa dan mendeskripsikan nilai-nilai yang dapat diambil dari peristiwa tersebut. Demikian pula pada kegiatan mengekspresikan dan menghargai nilai, peserta didik telah berhasil mempertentangkan dasar (nilai-nilai) yang harus diteladani maupun yang harus ditinggalkan. Pada tahapan ini terjadi diskusi kelompok yang cukup menarik ketika peserta didik menyebutkan contoh-contohnya.

- e. Guru membimbing kelompok bekerja dan belajar. Pada tahap ini peserta didik melalui diskusi kelompok tampak jelas kegiatan peserta didik dalam menentukan tindakan yang relevan dengan nilai yang dipilih. Mereka dengan lantang sudah dapat menunjukkan tindakan yang harus dilakukan dan dihindari dengan alasan yang tepat dan dapat diterima dalam diskusi kelas. Guru sudah mengarahkan peserta didik untuk mempertimbangkan, menguji, dan akhirnya menentukan pilihan prioritas tindakan yang relevan.
- f. Pada tahap evaluasi dan refleksi nampak jelas guru bersama peserta didik bertanya jawab meluruskan kesalahan atas pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan dari hasil diskusi. Sebagai penguatan nilai, guru sudah dapat mengeksplorasi secara mendalam contoh-contoh tindakan yang mengacu nilai yang menjadi prioritas.
- g. Pada tahap penutup tampak guru bersama-sama dengan peserta didik membuat rangkuman/ simpulan diskusi,

melakukan penilaian dan/ atau refleksi terhadap diskusi yang baru dilakukan. Bersama dengan peserta didik menguatkan nilai-nilai yang harus dikembangkan dan yang harus dihindari. Guru juga telah memberikan penghargaan bagi kelompok yang kompak dan telah menyampaikan pendapatnya dengan contoh-contoh yang tepat dan jelas serta dapat diterima oleh seluruh kelas. Peserta didik menyatakan posisi dan alasannya, menguji nilai dalam beberapa situasi yang berbeda sebagai proses internalisasi nilai yang telah diyakini.

- h. Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran uji coba terbatas ke-2 maka setelah dilakukan diskusi dan refleksi bersama guru dan kolaborator tampak bahwa guru benar-benar telah memahami langkah-langkah pembelajaran secara utuh. Meskipun demikian guru belum merasa puas karena untuk evaluasi kompetensi dan karakter dilakukan dengan menggunakan tambahan waktu selama sepuluh menit.

4. Indikator Kinerja

Keberhasilan penelitian tindakan kelas ini ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut.

- a. Guru dan siswa mampu melaksanakan model pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal budaya Jawa.
- b. Adanya peningkatan skor karakter jati diri bangsa yang ditunjukkan dengan peningkatan skor angket karakter sebanyak 80%.
- c. Adanya peningkatan kompetensi yang ditandai dengan sekurang-kurangnya 75% siswa kelas VII semester II

memperoleh nilai 70 sebagai batas tuntas pembelajaran PKn.

Pada penelitian tindakan kelas ini, siklus dapat dihentikan apabila indikator kinerja sudah dipenuhi. Namun siklus dapat dibuka lagi apabila masih ada beberapa siswa yang nilai karakter maupun kompetensinya belum mencapai batas tuntas, meski secara keseluruhan indikator kinerja sudah dipenuhi.

5. Dampak Implementasi Model

a. Kompetensi

Berdasarkan hasil uji kompetensi pada siklus ke-2 tampak adanya peningkatan dibandingkan sebelum dilakukan tindakan. Ini berarti model mampu meningkatkan kompetensi siswa dibandingkan saat sebelum menggunakan model. Berdasarkan hasil belajar pada siklus ke-2, diketahui bahwa terdapat peningkatan kompetensi belajar dibandingkan saat pre-tes. Peningkatan tersebut cukup signifikan karena baik secara klasikal maupun individual dapat mencapai standar ketuntasan belajar minimal. Dengan demikian indikator kinerja dalam penelitian ini sekurang-kurangnya 75% siswa memperoleh nilai 70 sebagai batas tuntas pembelajaran telah dapat dipenuhi.

b. Karakter

Berdasarkan analisis skor karakter pada siklus ke-2 diketahui bahwa terdapat peningkatan karakter siswa dibandingkan pada siklus ke-1 (nilai 70,05 menjadi nilai 72,72) sedangkan peningkatan prosentase klasikal mencapai 80%. Peningkatan

tersebut cukup signifikan karena baik secara klasikal maupun individual dapat mencapai standar ketuntasan belajar minimal. Dengan demikian indikator kinerja dalam penelitian ini sekurang-kurangnya 80% siswa meningkat skor karakternya sudah terpenuhi.

B. Uji Kelompok Besar (Uji Luas)

Uji implementasi (uji luas) model pembelajaran dilaksanakan di SMPN 21 Surakarta. Pada uji implementasi luas ini menggunakan perangkat pembelajaran sebagaimana uji terbatas pada siklus kedua yang dideskripsikan ke dalam beberapa kegiatan, yakni perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, observasi, dan refleksi sebagai berikut.

1. Perencanaan Pembelajaran

Perangkat pembelajaran untuk implementasi (uji luas) model siklus ke-2 menggunakan RPP pertama, dengan alasan pada siklus pertama pembelajaran belum bisa terlaksana, yakni baru sampai pada tahap apersepsi dan eksplorasi. Media pembelajaran selain power point juga menggunakan tayangan berbagai peristiwa demonstrasi dari para buruh dan mahasiswa yang menunjukkan “pemahaman kemerdekaan berpendapat yang kurang tepat”. Untuk kegiatan pembelajaran siswa sudah disiapkan lembar kerja masing-masing kelompok dan sekaligus sebagai petunjuk langkah-langkah dalam mengerjakan dan membahas permasalahan dalam kelompok.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran uji luas ini menggunakan RPP di SMP kelas VII semester 2, pada standar kompetensi: 4. Menampilkan perilaku kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Adapun kompetensi dasarnya tentang 4.1 Menjelaskan hakekat kemerdekaan mengeluarkan pendapat dengan alokasi waktu 2 X 40 menit. Tujuan pembelajarannya, bahwa setelah selesai pembelajaran diharapkan para siswa dapat menjelaskan hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat, dapat menunjukkan contoh-contoh kemerdekaan mengemukakan pendapat di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk mengeluarkan pendapat di sekolah, keluarga, dan masyarakat umum, serta siswa dapat membuat contoh bentuk-bentuk mengeluarkan pendapat di sekolah, keluarga, dan masyarakat umum.

Core value budaya Jawa yang digunakan adalah rukun dan hormat. Indikator nilai yang diharapkan meliputi: toleransi, rasa hormat dan perhatian, tekun, tanggung jawab, mengutamakan kepentingan umum, dan menjaga ketertiban umum. Adapun materi ajarnya meliputi: hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat, bentuk-bentuk menyampaikan pendapat di muka umum, tata cara mengemukakan pendapat secara baik dan benar. Model pembelajarannya adalah *cooperatif learning* dan klarifikasi nilai. Metode pengajaran yang digunakan meliputi ceramah bervariasi dan diskusi kelompok. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keterampilan proses dan CTL. Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan tahapan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.\

Sumber Belajar, meliputi: buku teks PKn siswa kelas VII, UUD 1945 dan UU Nomor 9/1998, artikel/berita di berbagai media massa, dan foto-foto/gambar kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Adapun evaluasi yang digunakan meliputi evaluasi proses, yakni mengukur aktivitas belajar individual dan partisipasi siswa dalam kegiatan kelompok/ kelas. Alat evaluasinya menggunakan lembar observasi aktivitas siswa sebagai berikut.

Tabel Lembar Observasi Aktivitas Siswa

No	Nama Siswa	Aspek					Jumlah	Kategori
		A	B	C	D	E		
1								
2								

Keterangan :

Aspek A : sikap positif dalam kelompok (hormat dan rukun)

Aspek B : kemampuan mengemukakan pendapat & berargumentasi dlm kelompok

Aspek C : sikap toleransi dan tanggung jawab

Aspek D : komitmen terhadap pilihan nilai/tindakan dan etika

Aspek E : keluasan wawasan

Kategori Skor:

- Skor 1 : sangat kurang
- Skor 2 : kurang
- Skor 3 : cukup
- Skor 4 : baik
- Skor 5 : sangat baik

Kategori Total Skor:

- 0-10 : kurang
- 11-15 : cukup
- 16-20 : baik
- 21-25 : sangat baik.

3. Hasil Observasi dan Refleksi

Hasil observasi aktivitas guru dalam pembelajaran diperoleh data penerapan sintak 82 (sangat baik), prinsip reaksi 82 (sangat baik), sistem sosial 80 (baik), sistem penunjang 80 (sangat baik), dan nilai rata-ratanya 80 (sangat baik). Hasil observasi kemudian dilakukan diskusi reflektif mengenai pelaksanaan pembelajaran, yang hasilnya menyimpulkan bahwa guru sudah memahami dan mampu melaksanakan seluruh tahapan model. Indikator pemahaman dan kemampuan guru itu ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut.

- a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sekaligus merupakan apersepsi, guru telah melaksanakan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan RPP. Guru telah menyampaikan informasi berkaitan dengan materi dan nilai kearifan lokal budaya Jawa yang dijadikan rujukan dalam mengekspresikan kemerdekaan berpendapat.
- b. Pada tahap elaborasi guru telah mampu mengorganisasikan peserta didik dalam diskusi kelompok. Pada tahap ini secara jelas dapat diamati bahwa peserta didik melalui diskusi kelompok telah mampu memilah dan memilih nilai. Karena itu kelompok dapat menunjukkan kasus atau peristiwa dan mendeskripsikan nilai-nilai yang dapat diambil dari peristiwa tersebut. Dalam kegiatan mengekspresikan dan menghargai nilai, peserta didik telah berhasil mempertentangkan nilai-nilai yang harus diteladani maupun nilai-nilai yang harus ditinggalkan.
- c. Guru membimbing kelompok bekerja dan belajar. Pada tahap ini peserta didik melalui diskusi kelompok tampak

- jelas telah bisa menentukan tindakan yang relevan dengan nilai yang dipilih. Guru telah mengarahkan peserta didik untuk mempertimbangkan alasan dalam pemilihan nilai.
- d. Pada tahap evaluasi dan refleksi juga nampak jelas bahwa guru bersama peserta didik bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan dari hasil diskusi, serta menunjukan contoh-contoh tindakan yang mengacu pada nilai yang menjadi pilihan.
 - e. Pada tahap penutup guru bersama-sama dengan peserta didik membuat simpulan diskusi, melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap diskusi yang baru dilakukan. Guru bersama dengan peserta didik menguatkan nilai-nilai yang harus dikembangkan dan yang harus dihindari.

Berdasarkan pada pelaksanaan pembelajaran uji implementasi model di SMP 21 di atas, setelah dilakukan diskusi dan refleksi bersama guru dan kolaborator, ternyata guru telah memahami langkah-langkah pembelajaran secara utuh. Guru S mengemukakan bahwa pada saat diskusi kelompok peserta didik tidak seaktif seperti di SMPN 10. Hal ini disebabkan karena kualitas peserta didik di SMPN 21 di bawah SMPN 10 dan proses seleksi penerimaan peserta didik juga tidak seketat di sebagaimana di SMPN 10.

4. Dampak Implementasi Model

Pengaruh pembelajaran pada peningkatan prestasi atau kompetensi dan karakter siswa dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Prestasi

Berdasarkan hasil uji kompetensi pada saat implementasi model terlihat peningkatan kompetensi dibandingkan sebelum dilakukan tindakan. Diketahui bahwa terdapat peningkatan kompetensi belajar dibandingkan pre-tes. Peningkatan tersebut cukup signifikan baik secara klasikal maupun individual dapat mencapai standar ketuntasan belajar minimal. Dengan demikian indikator kinerja dalam penelitian, yakni sekurang-kurangnya 75% siswa memperoleh nilai 70 sebagai batas ketuntasan pembelajaran sudah dapat dipenuhi. Ini berarti model pembelajaran mampu meningkatkan kompetensi siswa dibandingkan saat sebelum menggunakan model.

b. Karakter

Berdasarkan analisis skor karakter pada implementasi model di SMPN 21 diketahui terdapat peningkatan karakter siswa dibandingkan pada siklus pertama (nilai 70,05 menjadi nilai 72,72) sedangkan peningkatan prosentase klasikal mencapai 80%. Peningkatan tersebut cukup signifikan karena baik secara klasikal maupun individual dapat mencapai standar ketuntasan belajar minimal. Dengan demikian indikator kinerja dalam penelitian ini sekurang-kurangnya 80% peserta didik meningkat skor karakternya sudah terpenuhi.

Mencermati hasil uji coba implementasi “Mobel PKn Berkelok” di atas maka dapat dinyatakan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Implementasi model pembelajaran ‘Berkelok’ budaya Jawa sangat tergantung pada kemampuan guru dalam meng-

- eksplorasi dan mengkontruksi nilai-nilai budaya Jawa yang relevan dengan materi pembelajaran.
- b. Melalui pengembangan pembelajaran peserta didik dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan karena (1) permasalahan nilai budaya Jawa yang dibahas tidak asing bagi peserta didik (kontekstual), (2) pembelajaran berpusat pada peserta didik dan melalui klarifikasi nilai mereka diberikan hak yang sama dalam menentukan pilihan nilai, mengekspresikan dan mengaktualisasi nilai selama komunitas pembelajaran menyетуinya, (3) pembelajaran mengembangkan sikap humanistik dan menghargai perbedaan ras dan gender sehingga dapat mengembangkan sikap toleransi pada peserta didik.
 - c. Hasil penilaian aktivitas guru yang meliputi: penerapan sintak, prinsip reaksi, sistem sosial, sistem penunjang sangat baik. Demikian juga aktivitas peserta didik, yang meliputi prinsip reaksi, aktivitas belajar individual, aktivitas belajar kelompok, dampak instruksional, dan dampak pengiring juga sangat baik. Hasil tes pengetahuan dan sikap menunjukkan terdapat perbedaan nilai yang signifikan sebelum dan sesudah pelaksanaan “Mobel PKn Berkelok” budaya Jawa.

5. Hambatan dan Keterbatasan Uji Coba Model

Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan uji coba implementasi model di SMP Negeri 10 dan 21 ditemukan hambatan atau keterbatasan sebagai berikut.

1. Komitmen guru untuk menerapkan RPP dan menjadikannya sebagai pedoman dalam pembelajaran masih perlu ditingkatkan karena masih ditemukan adanya kecenderungan guru mendominasi pembelajaran.
2. Pemahaman guru terhadap langkah-langkah (sintak) pembelajaran masih perlu ditingkatkan karena pada setiap tahapan sintak seolah-olah terpisah dengan tahapan lainnya.
3. Guru kurang memahami langkah-langkah pembelajaran klarifikasi nilai yang menjadi prioritas kegiatan peserta didik dalam kegiatan diskusi dan mengklarifikasi nilai.
4. Kurangnya pemahaman guru terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang bersumber nilai budaya Jawa sehingga guru kurang mengembangkan dengan contoh-contoh lainya dan hanya terpancang pada contoh yang dilampirkan dalam rencana pembelajaran.

Desain 'Mobel PKn Berkelok' hasil uji implementasi dideskripsikan sebagai berikut.

a. Sintak Model Pembelajaran

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran “Mobel PKn Berkelok”

APERSEPSI DAN ORIENTASI

Fase I : Menyampaikan tujuan & memotivasi siswa

- Guru memberi motivasi
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
- Guru menjelaskan bahwa pembelajaran selain akan membahas topik permasalahan tertentu juga akan mendeskripsikan nilai-nilai yang dapat dikembangkan dari permasalahan yang dikaji
- Guru menerangkan pentingnya nilai dalam kehidupan manusia/masyarakat, sumber nilai budaya Jawa.

EKSPLORASI

Fase II : Menyampaikan informasi.

Fase III : Mengorganisasi siswa dalam kelompok belajar

Tahap 1 : memilih nilai dan mengklasifikasi nilai

- Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan dibahas.
- Guru menjelaskan konsep nilai dan pentingnya nilai bagi individu maupun kelompok masyarakat
- Siswa memperhatikan penjelasan tentang materi, mempelajari dan mendeskripsikan nilai-nilai berdasarkan fakta yang ada dalam film.
- Guru melibatkan siswa mencari informasi.
- Siswa melalui diskusi memilih nilai dan mengklasifikasi nilai yg relevan.

ELABORASI

Fase IV : Membimbing kelompok bekerja dan belajar

Tahap 2 : Menghargai dan mengekspresi pilihan nilai

- Guru memberikan penguatan kepada siswa untuk menelusuri berbagai sumber.

- Guru memfasilitasi siswa dalam diskusi kelompok.
- Melalui diskusi kelompok, siswa mengekspresikan pilihan nilai yang relevan.
- Siswa secara kooperatif dan kolaboratif mempresentasikan hasil diskusi kelas.
- Melalui diskusi kelas siswa mengekspresikan dan menghargai pilihan nilai dengan menunjukkan fakta pendukungnya.

KONFIRMASI

Fase-5 : Evaluasi

Fase-6 :Memberikan penghargaan

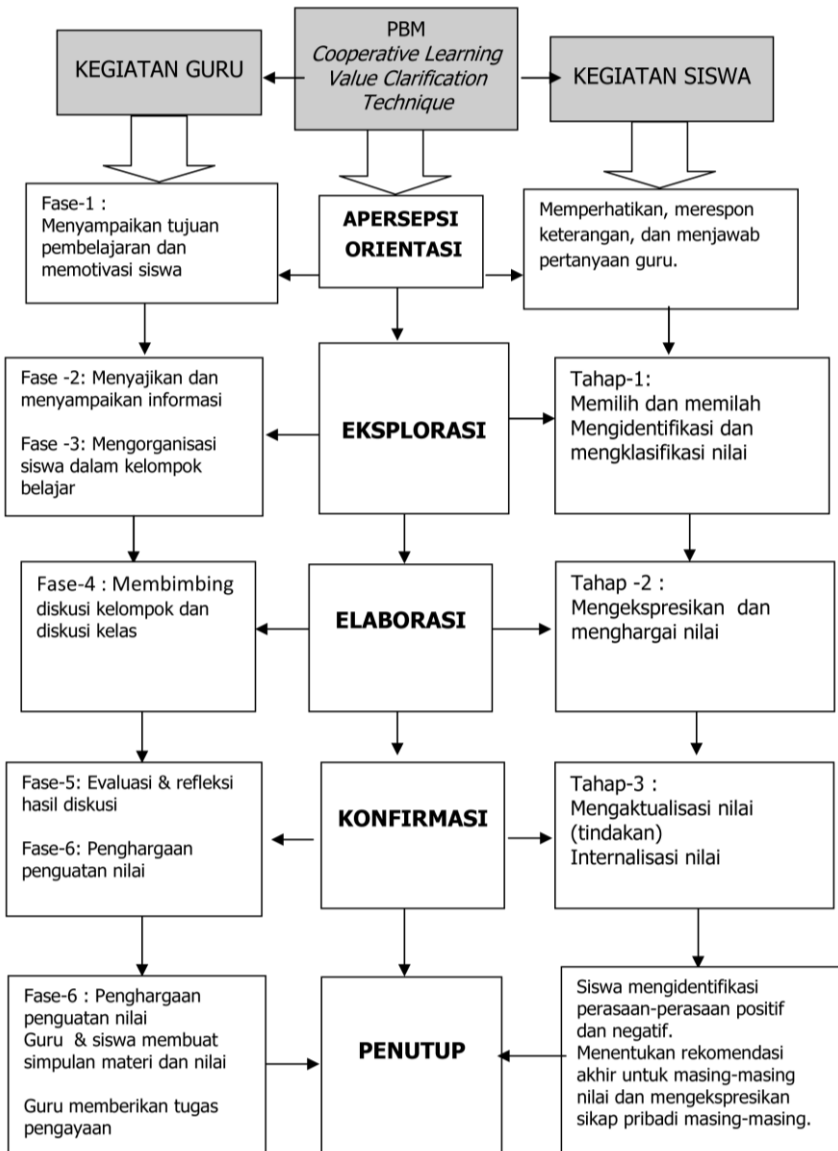
Tahap 3 : Aktualisasi nilai dan internalisasi nilai dalam bentuk tindakan

- Guru bersama siswa meluruskan dan menyimpulkan.
- Guru memfasilitasi siswa untuk memberikan penguatan tentang nilai-nilai yang bisa diteladani relevansinya dengan kehidupan sehari-hari.
- Siswa menunjukkan contoh-contoh sikap/perbuatan. Lingkup aktivitas *cognitive process* maupun lingkup *life style* merupakan kriteria kesuksesan internalisasi nilai.

PENUTUP

- Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi.
- Guru memberikan penghargaan bagi kelompok.
- Siswa menyatakan posisi, alasannya, menguji dan mengaktualisasikan nilai yang dipilih.
- Guru memberikan penguatan untuk aktualisasi nilai-nilai.
- Siswa menentukan rekomendasi akhir terhadap nilai untuk diekspresikan dalam sikap pribadi masing-masing.

'MOBEL PKn BERKELOK' (MODEL HIPOTETIK)



b. Sistim Sosial

Pembelajaran di sekolah merupakan sistem sosial karena terjadinya interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Bentuk interaksi disesuaikan dengan faktor-faktor tujuan, sifat bahan ajaran/materi, karakteristik siswa, sumber belajar yang tersedia, dan kompetensi guru. Dalam “Mobel PKn Berkelok” meningkatkan karakter dan jati diri bangsa digunakan kombinasi tiga jenis komunikasi.

c. Prinsip-prinsip Reaksi

Berdasarkan pengertian umum tentang prinsip reaksi maka peranan guru dalam “Mobel PKn Berkelok” meningkatkan karakter dan jati diri bangsa antara lain adalah (1) menyediakan sumber-sumber dan media belajar, yakni contoh-contoh peristiwa yang menunjukkan kemerdekaan berpendapat dan tata mengemukakan pendapat, menyediakan contoh-contoh nilai-nilai kearifan lokal dalam budaya Jawa yang relevan dengan materi, (2) menyampaikan informasi tentang materi dan hubungannya dengan nilai-nilai budaya, dan (3) membimbing siswa dalam mengklarifikasi nilai relevansinya dengan materi yang dibahas dan dalam konteks sosial.

d. Sistem Pendukung

‘Mobel PKn Berkelok’ membutuhkan sistem pendukung, yakni rencana pembelajaran yang memuat langkah-langkah model pembelajaran, lembar kerja kelompok sebagai media implementasi model yang menggunakan strategi pembelajaran kooperatif dan klarifikasi nilai, lembar evaluasi untuk mengukur

penguasaan kompetensi siswa dan skala sikap untuk mengukur nilai-nilai karakter dan jati diri kebangsaan siswa.

e. Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring

Dampak Instruksional:

- 1) Kemampuan menemukan nilai-nilai dari materi yang dipelajari dan kebermaknaannya bagi konteks kehidupan peserta didik dan sebagai revitalisasi nilai-nilai Pancasila.
- 2) Penguasaan kompetensi siswa.
- 3) Peningkatan karakter dan jati diri siswa.

Dampak Pengiring:

- 1) Sikap toleransi.

Melalui pembelajaran klarifikasi nilai siswa diajarkan tentang *ethical relativism* dan bagaimana manusia mengembangkan nilainya sendiri dan menghargai nilai orang lain.

- 2) Keaktifan Belajar.

Model pembelajaran memberikan ruang dan kesempatan pada peserta didik untuk berperan aktif. Keterlibatan peserta didik sangat dominan dalam menerapkan langkah-langkah klarifikasi nilai.

- 3) Sebagai Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila

Implementasi model yang dikemas dalam pembelajaran kooperatif dan klarifikasi nilai menjadikan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menyenangkan. Model juga mampu memberdayakan peserta didik

dalam menggali dan mengaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa sekaligus meningkatkan penguatan nilai-nilai Pancasila.

Bab 7

UJI EFEKTIVITAS ‘MOBEL PKn BERKELOK’

A. Deskripsi Uji Efektivitas

Model pembelajaran PKn ‘Berkelok’ setelah dilakukan uji implementasi terbatas dan luas meski akhirnya dinyatakan sebagai model pembelajaran yang baik tetapi masih perlu diuji tingkat efektivitasnya. Adapun uji efektivitas ‘Mobel PKn Berkelok’ yang dilakukan di SMPN 10 dan SMPN 21 dideskripsikan mulai perencanaan dan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut.

1. Perencanaan Pembelajaran

Perangkat pembelajaran untuk uji efektivitas model menggunakan RPP PKn SMP kelas VII semester 2 pada standar kompetensi 4, yakni menampilkan perilaku kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan kompetensi dasar 4.2 yakni menguraikan pentingnya kemerdekaan mengeluarkan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Alokasi waktu yang digunakan dirancang 2 X 40 menit. Media pembelajaran selain

power point juga menggunakan tayangan berbagai peristiwa demonstrasi dari para buruh dan mahasiswa yang menunjukan “perilaku kemerdekaan berpendapat yang kurang tepat“. Untuk kegiatan pembelajaran siswa sudah disiapkan lembar kerja masing-masing kelompok dan sekaligus sebagai petunjuk langkah-langkah dalam mengerjakan dan membahas permasalahan dalam kelompok.

Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai bahwa melalui pengamatan dan diskusi para siswa dapat menjelaskan hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab, dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk mengeluarkan pendapat di sekolah, keluarga, dan masyarakat umum, dapat mendeskripsikan tata cara mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, dapat menjelaskan tujuan pengaturan kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum, dapat menunjukkan tindakan mengemukakan pendapat secara baik, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menjelaskan akibat kebebasan mengeluarkan pendapat tanpa batas.

Core value budaya Jawa, selain dikembangkan sifat rukun dan hormat para siswa dikenalkan sifat-sifat pemimpin yang baik. Dalam kaitan dengan kemerdekaan berpendapat harus didasari oleh sifat-sifat sebagai berikut. a) *Sepi ing pamrih rame ing gawe* (semua yang dilakukan secara tulus/ berkomitmen), b) *Berbudi bawa laksana* (memiliki sifat yang luhur dan bijaksana, tidak mementingkan kepentingan sendiri maupun golongan / kelompoknya, mampu melaksanakan semua kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai seorang pemimpin),

c) *Memayu hayuning bawono* (manusia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Untuk menciptakan keselamatan seseorang di dunia tak ada artinya tanpa kebaikan budi pekertinya).

Dalam mengemukakan pendapat perlu dilakukan dengan sifat tanggung jawab dan memperhatikan kepentingan umum, tidak berbuat merusak atau anarkhis. Untuk itu siswa dikenalkan dengan sifat-sifat yang baik dalam ajaran Tri Dharma Sri Mangkunagara I yang tertuang dalam sesanti berikut. a) *rumongso melu handarbeni* (merasa ikut memiliki), b) *wajib melu hangrungkepi* (membela, memperjuangkan, memelihara, dan membina), c) *mulat sariro hangroso wani* (mawas diri, introspeksi, tidak selalu menyalahkan orang lain).

Indikator nilai yang diharapkan meliputi: toleransi, rasa hormat dan perhatian, tekun, tanggung jawab, berani, komitmen, mengutamakan kepentingan umum, dan menjaga ketertiban umum. Materi ajar meliputi: hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bertanggungjawab, tujuan pengaturan kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum, tata cara mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, dan tata cara mengemukakan pendapat di muka umum. Model pembelajaran yang akan digunakan pembelajaran kooperatif dan klarifikasi nilai. Metode pengajaran menggunakan ceramah bervariasi dan diskusi kelompok. Pendekatan yang diterapkan adalah ketrampilan proses dan CTL.

Sumber Belajar, meliputi: buku teks PKn siswa kelas VII, UUD 1945 dan UU nomor 9/1998, artikel/ berita di berbagai media massa, dan foto-foto/ gambar kemerdekaan mengeluar-

kan pendapat. Adapun evaluasi yang digunakan adalah evaluasi proses, mengukur aktivitas belajar individual dan partisipasi siswa dalam kegiatan kelompok/ kelas.

2. Langkah-langkah Pembelajaran

Langkah-langkah pembelajaran uji efektivitas 'Mobel PKn Berkelok' dideskripsikan dengan tabel sebagai berikut.

Tabel Langkah-langkah Pembelajaran

Tahap	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	Nilai yang Dikembangkan
Fase -1 Menyampaikan tujuan pembelajaran (5 menit)	<ul style="list-style-type: none"> • Guru memotivasi siswa. • Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. • Guru menjelaskan bahwa pembelajaran kali ini tidak hanya mempelajari materi tetapi juga akan menggali nilai-nilai yang dapat diteladani dari topik yang akan dibahas dalam kelompok. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Siswa memperhatikan dan merespon pertanyaan guru.</i> • <i>Siswa memperhatikan arahan guru dan mampu menunjukkan contoh tindakan yg menunjukan prinsip rukun dan hormat.</i> 	

Tahap	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	Nilai yang Dikembangkan
<p>APERSEPSI</p> <p>Fase-2 : Menyampaikan informasi (7 menit)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Guru menjelaskan pengertian nilai. Nilai meliputi rujukan untuk menyatakan sesuatu itu baik, buruk, bagus, jelek, pantas, tidak pantas, wajar, tidak wajar, sopan, atau kurang ajar. <p>Nilai dalam budaya Jawa: <i>Sepi ing pamrih rame ing gawe.</i> <i>Berbudi bawa laksana.</i> <i>Memayu hayuning bawono.</i></p> <p>Hidup seseorang di dunia akan berarti kalau memiliki kebaikan budi pekerti. Karena itu kemerdekaan mengeluarkan pendapat tidak boleh menjurus pada perbuatan anarkhis dengan merusak sarana prasarana umum dan mengganggu ketertiban umum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Siswa mendeskripsikan konsep nilai yang berkaitan dengan topik. <p><i>Tahap-1:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Siswa memilah dan memilih nilai yang sesuai dengan keterangan guru</i> <i>Dengan melihat tayangan peristiwa. Siswa memilih nilai yang dapat diteladani dan menghindari perbuatan yang tidak terpuji.</i> 	

Tahap	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	Nilai yang Dikembangkan
<p>EKSPLORASI</p> <p>Fase-3: Mengorganisasi siswa dalam kelompok belajar</p> <p>(15 Menit)</p>	<p>Sambil tanya jawab, guru menjelaskan materi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab 2. Tujuan pengaturan kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum 3. Tata cara mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 4. Tata cara mengemukakan pendapat di muka umum <p>➤ <i>Guru mendampingi siswa untuk diskusi dalam kelompok kecil</i></p> <p>➤ <i>Guru memberi penguatan bahwa kemerdekaan untuk kepentingan umum dilakukan dengan tanggung jawab dan di dasari oleh prinsip :</i></p> <p>➤ <i>Rumongso melu handarbeni.</i></p> <p>➤ <i>Wajib melu hangrungepi</i></p> <p>➤ <i>Mulat sariro hangroso wani</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Guru melibatkan siswa mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/ tema materi yang akan dipelajari dari berbagai sumber referensi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa memperhatikan penjelasan guru • Siswa dengan kelompoknya mulai menelusuri referensi dan berdiskusi dlm kelompok . • Siswa menuangkan hasil diskusi dalam lembar kerja siswa. • Materi yang dibahas yakni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab 2. Tujuan pengaturan kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum 3. Tata cara mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 4. Tata cara mengemukakan pendapat di muka umum. <p><i>Siswa dalam kelompok menjawab, membuat contoh, mendeskripsikan nilai yg dikembangkan dan yg harus ditinggalkan. Siswa mengaktualisasi nilai yg dikembangkan dalam contoh-contoh tindakan</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan lembar kerja siswa dalam kelompok kecil berdiskusi. • Pembelajaran kooperatif merupakan contoh konkrit kemerdekaan mengemukakan pendapat. • Pada proses diskusi, guru dapat memberikan penguatan terhadap prinsip hormat dan rukun. • Guru menggunakan lembar observasi kegiatan siswa. • Siswa mengembangkan sikap toleransi, menjaga ketertiban umum, mengutamakan kepentingan bersama, menghargai perbedaan pendapat.

Tahap	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	Nilai yang Dikembangkan
<p>ELABORASI</p> <p>Fase-4: Membimbing kelompok bekerja dan belajar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Guru memberikan penguatan kepada siswa untuk membaca dan mencari dari berbagai sumber. ➤ Guru memfasilitasi siswa agar diskusi berjalan dengan baik dan memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis. ➤ Melalui diskusi guru memberi kesempatan pada siswa untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut dalam diskusi. ➤ Memfasilitasi siswa dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. ➤ Memfasilitasi siswa berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan kompetensi belajar. ➤ Memfasilitasi siswa untuk menyajikan hasil kerja kelompok. ➤ Memfasilitasi siswa melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri. 	<p>Tahap-2: <i>Menghargai, mengekspresikan, dan menegaskan pilihan nilai</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam diskusi kelompok maupun diskusi kelas siswa mengekspresikan dan menegaskan pilihan nilai. • Siswa secara bergantian mempresentasikan hasil diskusi kelompok. • Siswa mengekspresikan dan menentukan pilihan nilai yang relevan dengan permasalahan dan disampaikan dalam diskusi kelas disertai dengan contoh. • Siswa secara kooperatif dan kolaboratif menjawab dan menanggapi pertanyaan dalam diskusi kelas. • Siswa mengklarifikasi jawaban dengan contoh-contoh yang relevan dengan nilai yang ditunjukkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada proses ini guru tetap menggunakan lembar observasi kegiatan siswa

Tahap	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	Nilai yang Dikembangkan
<p>KONFIRMASI</p> <p>Fase-5: Evaluasi</p> <p>Fase-6: Pemberian- penghargaan</p> <p>(5 menit)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa dari diskusi. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan dari hasil diskusi. Guru memberikan tes formatif secara lisan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Guru menyuruh siswa untuk mendeskripsikan nilai-nilai yang harus diteladani dan sikap yang harus dihindari dari materi yang didiskusikan. 	<p>Tahap-3</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Aktualisasi nilai yang dipilih (tindakan)</i> <i>Internalisasi Nilai</i> <ul style="list-style-type: none"> Siswa menanyakan hal-hal yang belum diketahui/belum jelas dari hasil diskusi, serta dengan bimbingan guru siswa membuat rangkuman hasil diskusi. Siswa menjawab pertanyaan guru. Siswa menunjukkan contoh-contoh sikap/ perbuatan yang harus dikembangkan serta yang harus dihindari. Siswa menyatakan posisi dan alasannya, menguji dengan beberapa situasi yang sama, dan meng-aktualisasikan nilai yang dipilih dalam kehidupan di sekolah/ masyarakat/ negara. 	

Tahap	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	Nilai yang Dikembangkan
PENUTUP Kesimpulan Refleksi (5 menit)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bersama-sama dengan siswa membuat rangkuman /simpulan diskusi. ➤ Melakukan penilaian dan /atau refleksi terhadap diskusi yang baru dilakukan. ➤ Memberikan penghargaan bagi kelompok yang kompak dan bagus jawabannya. ➤ Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. ➤ Memberikan penguatan dalam kaitannya dengan aktualisasi nilai-nilai yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari ➤ <i>Sepi ing pamrih rame ing gawe</i> ➤ <i>Berbudi bawa laksana.</i> ➤ <i>Memayu hayuning bawono</i> ➤ <i>Rumongso melu handarbeni wajib melu hangrungkepi mulat sariro hangroso wani</i> <p>Memberikan tugas individual sebagai pengayaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasikan tindakan atau tata cara mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Siswa bersama guru membuat refleksi dengan merangkum hasil diskusi kelas. ❖ Siswa merespon tugas kelompok untuk memperjelas materi yang didiskusikan di kelas. <p><i>Internalisasi nilai</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Siswa bersama guru menyimpulkan keseluruhan pengalaman belajar dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. ❖ Siswa mengidentifikasi perasaan-perasaan positif dan negatif yang muncul, menentukan rekomendasi akhir untuk masing-masing nilai, dan mengekspresikan sikap pribadi masing-masing. ❖ Siswa melaksanakan tugas pengayaan dan dikerjakan di luar jam pelajaran. 	KESIMPULAN <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Kemerdekaan mengemukakan pendapat salah satu bentuk demokrasi.</i> ➤ <i>Kemerdekaan berpendapat dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab</i> ➤ <i>Hal tersebut harus dilakukan karena manusia tidak akan berarti kalau tidak memiliki karakter yang baik</i> ➤ <i>Karakter yang baik antara lain :yakni</i> ➤ <i>Sepi ing pamrih rame ing gawe,</i> (semua yg dilakukan secara tulus, memiliki komitmen) ➤ <i>Berbudi bawa laksana</i> (memiliki sifat yang luhur, bijaksana, tidak mementingkan sendiri maupun golongan/ kelompoknya).

Tahap	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	Nilai yang Dikembangkan
	2. Mendeskripsikan contoh nilai-nilai yang harus dikembangkan dan nilai-nilai yang harus dihindari dalam mengemukakan pendapat di muka umum		<p>➤ <i>Memayu hayuning bawono</i> (bertanggung jawab dalam menciptakan ketertiban umum dan menciptakan harmoni sosial</p> <p>➤ <i>Tanggung jawab, saling menghormati, toleransi, menghargai perbedaan, memiliki komitmen sehingga tercipta masyarakat madani.</i></p>

B. Hasil Uji Efektivitas Model di SMP Negeri 10

1. Keadaan Awal Kelompok Eksperimen dan Kontrol

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Bab sebelumnya bahwa rancangan eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *the matching only pratest - posttest control group design*. Konsekuensi dari penggunaan rancangan ini bahwa kedua kelompok yang dibandingkan secara statistik harus dalam kondisi sama sebelum perlakuan diberikan. Untuk mengetahui keadaan awal sebelum perlakuan diberikan (antara eksperimen

dan kontrol), dilakukan pre-tes pada dua kelompok subyek yang diberikan perlakuan.

a. Kompetensi

Dari hasil analisis terlihat bahwa rata-rata nilai kompetensi sebelum perlakuan untuk kelas eksperimen sebesar 71,62 sedangkan kelas kontrol sebesar 69,17. Namun terlebih dahulu dilakukan uji asumsi bahwa variance populasi kedua sampel adalah sama dengan melihat nilai *lavenne test*. Setelah melihat varian sama maka langkah selanjutnya adalah melihat nilai F-test untuk menentukan apakah terdapat perbedaan secara signifikan. Dari hasil analisis dengan SPSS 16 diperoleh nilai F hitung *lavene test* sebesar 0,036 dengan nilai probabilitas 0,850. Karena probabilitas $> 0,05$. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa H_0 tidak dapat ditolak atau memiliki variance yang sama. Luaran SPSS juga menunjukkan bahwa nilai F hitung ditemukan sebesar 0,395 untuk perlakuan dengan nilai signifikansi sebesar 0,532. Karena nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa rerata kompetensi kedua kelompok adalah sama.

b. Karakter

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata nilai karakter sebelum perlakuan untuk kelas eksperimen adalah 69,11 dan kelas kontrol adalah 69,13. Selanjutnya untuk melihat perbedaan rerata dilakukan *uji one way anava*. Namun terlebih dahulu dilakukan uji asumsi bahwa variance populasi kedua sample adalah sama dengan melihat nilai *lavenne test*.

Dari hasil analisis dengan SPSS 16 diperoleh nilai F hitung *lavene test* sebesar 0,002 dengan nilai probabilitas 0,965. Karena probabilitas $>0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 tidak dapat ditolak atau memiliki variance yang sama. Hasil SPSS *Test of between subject effects* diperoleh nilai F hitung sebesar 0,000 untuk perlakuan dengan nilai signifikansi sebesar 0,987. Karena nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa rerata karakter kedua kelompok sama.

Dengan demikian berdasarkan hasil analisis statistik dapat disimpulkan bahwa sebelum diberikan perlakuan, baik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai kemampuan yang sama.

2. Perbedaan Rerata Sebelum dan Sesudah Perlakuan (Kelas Eksperimen)

Untuk menganalisis perbedaan rerata sebelum dan sesudah perlakuan dilakukan dengan *uji paired sample t test*.

a. Kompetensi

Rerata nilai kompetensi kelas eksperimen sebelum perlakuan adalah 71,63 dan sesudah perlakuan adalah 80,54. Dari data tersebut tampak ada perbedaan mean (peningkatan rerata sebesar 8,91.) Selanjutnya untuk melihat perbedaan mean dan peningkatan itu bermakna dilakukan uji *paired sample t test* antara rerata nilai pre-test dan post-test. Dari hasil analisis dengan SPSS 16 diperoleh nilai t sebesar 3,561 dengan probabilitas signifikansi 0,001. Jadi disimpulkan bahwa

rata-rata nilai uji kompetensi antara sebelum dan sesudah perlakuan adalah berbeda.

b. Karakter

Rerata nilai karakter kelas eksperimen sebelum perlakuan 69,29 dan rerata nilai karakter sesudah perlakuan 79,24. Dari data tersebut nampak ada perbedaan mean (peningkatan rerata sebesar 9,95). Dari hasil analisis dengan SPSS 16 diperoleh nilai t sebesar 8,310 dengan probabilitas signifikansi 0,000. Jadi disimpulkan bahwa rata-rata nilai karakter sebelum dan sesudah perlakuan adalah berbeda. Kesimpulannya, bahwa pada kelas eksperimen diberikan perlakuan model menunjukkan seluruh komponen, yakni kompetensi dan karakter jati diri bangsa terdapat peningkatan rerata dan terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai pre-test dengan post-test.

3. Perbedaan Rerata Sebelum dan Sesudah Perlakuan (Kelas Kontrol)

a. Kompetensi

Hasil analisa data menunjukan bahwa rerata nilai kompetensi kelas kontrol sebelum perlakuan adalah 69,17. Rerata nilai kompetensi kelas kontrol sesudah perlakuan adalah 71,83. Dari data ini nampak ada perbedaan mean (peningkatan rerata sebesar 2,67). Untuk melihat apakah perbedaan mean dan peningkatan itu bermakna selanjutnya dilakukan uji paired sample t test antara rerata nilai pre test dan post test. Dari hasil analisis dengan SPSS 16 diperoleh nilai t sebesar 1,441 dengan probabilitas signifikansi 0,158. Jadi disimpulkan bahwa

rata-rata nilai uji kompetensi antara sebelum dan sesudah perlakuan adalah sama.

b. Karakter

Dari hasil analisis data diperoleh rerata nilai karakter kelas eksperimen sebelum perlakuan adalah 68,94 sesudah perlakuan adalah 70,22. Dari data tersebut nampak ada perbedaan mean (peningkatan rerata sebesar 1,28). Untuk melihat apakah perbedaan mean dan peningkatan itu bermakna selanjutnya dilakukan uji paired sample t test antara rerata nilai pre test dan post test. Diperoleh nilai t sebesar 1,928 dengan probabilitas signifikansi 0,062. Disimpulkan bahwa rata-rata nilai karakter kelompok kontrol antara sebelum dan sesudah perlakuan adalah sama.

Berdasarkan data tersebut di atas maka disimpulkan bahwa untuk kelas kontrol yang diberikan perlakuan pembelajaran PKn dengan model pembelajaran kooperatif menunjukan bahwa seluruh indikator, yakni kompetensi dan karakter jati diri bangsa terdapat peningkatan rerata tetapi tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai pre-test dan post test.

4. Perbedaan Rerata Sesudah Perlakuan (Kelas Eksperimen dan Kontrol)

a. Kompetensi

Hasil analisis terlihat bahwa rata-rata nilai kompetensi sebelum perlakuan untuk kelas eksperimen adalah 80,54 sedangkan kelas kontrol 71,83. Selanjutnya untuk melihat nilai rerata dilakukan uji one way anava. Namun terlebih dahulu

dilakukan uji asumsi bahwa variance populasi kedua sample adalah sama dengan melihat nilai *lavenne test*.

Dari hasil analisis dengan SPSS 16 diperoleh nilai F hitung lavene test sebesar 0,222 dengan nilai probabilitas 0,639. Karena probabilitas $>0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 tidak dapat ditolak atau memiliki variance yang sama. Output SPSS test of between subject effects memberikan nilai F hitung sebesar 6,226 untuk perlakuan dengan nilai signifikansi sebesar 0,015. Karena nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa rerata pretasi kedua kelompok berbeda secara signifikan.

b. Karakter

Rata-rata nilai karakter sesudah perlakuan di kelas eksperimen adalah 79,24 sedang di kelas kontrol adalah 70,22. Untuk melihat apakah perbedaan rerata itu bermakna dilakukan uji one way anava. Terlebih dahulu harus dilakukan uji asumsi bahwa variance populasi kedua sample adalah sama dengan melihat nilai *lavenne test*. Hasil analisis dengan SPSS 16 diperoleh nilai F hitung lavene test sebesar 1,274 dengan nilai probabilitas 0,263. Karena probabilitas $>0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 tidak dapat ditolak atau memiliki variance yang sama. Nilai F hitung diperoleh sebesar 35,509 untuk perlakuan dengan nilai signifikansi sebesar 0,00. Karena nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa rerata karakter jati diri kedua kelompok berbeda secara signifikan.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sesudah kelas eksperimen diberi perlakuan model yang dikembangkan

dan kelas kontrol diberikan perlakuan pengajaran PKn dengan model kooperatif, kemudian dilakukan post-test diperoleh nilai rerata yang berbeda. Pada aspek kompetensi dan karakter jati diri bangsa terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil post-test kelompok eksperimen. Dengan demikian terbukti bahwa model pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal yang dikembangkan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kompetensi dan penguatan karakter jati diri bangsa.

C. Hasil Uji Efektivitas Model di SMP Negeri 21

1. Keadaan Awal Kelompok Eksperimen dan Kontrol

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, rancangan eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *the matching only pratest posttest control group design*. Konsekuensi dari penggunaan rancangan ini adalah kedua kelompok yang dibandingkan secara statistik harus dalam kondisi sama sebelum perlakuan diberikan. Untuk mengetahui keadaan awal sebelum perlakuan diberikan (kelas eksperimen dan kontrol), dilakukan pemberian pra tes kepada dua kelompok subyek yang akan diberi perlakuan. Secara ringkas, hasil pengolahan data disajikan sebagai berikut.

a. Kompetensi

Rata-rata skor pre test kompetensi pada kelompok eksperimen adalah 66.54 sedangkan pada kelompok kontrol 66,00. Selanjutnya, hasil analisis dengan SPSS 16 diperoleh nilai F hitung Lavene test sebesar 0,044 dengan nilai probabilitas 0,834, Karena probabilitas $>0,05$ maka dapat disimpulkan

bahwa H_0 tidak dapat ditolak atau diterima atau memiliki variance yang sama. Out put SPSS memberikan nilai F hitung sebesar 0,019 untuk perlakuan dengan signifikansi sebesar 0,892. Karena nilai signifikansi $>0,05$ maka disimpulkan bahwa rerata kompetensi kedua kelompok sama.

b. Karakter

Rata-rata skor pre-test karakter pada kelompok eksperimen adalah 65,24, dan kelompok kontrol 65,31. Selanjutnya untuk melihat perbedaan rerata dilakukan uji one way anava. Dari hasil analisis dengan SPSS 16 diperoleh nilai F hitung Lavene test sebesar 0,002 dengan nilai probabilitas 0,961, Karena probabilitas $>0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 tidak dapat ditolak atau diterima atau memiliki variance yang sama. Out put SPSS memberikan nilai F hitung sebesar 0,002 untuk perlakuan, dengan signifikansi sebesar 0.961. Karena nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa rerata nilai karakter kedua kelompok sama.

2. Perbedaan Rerata Sebelum dan Sesudah Perlakuan (Kelas Eksperimen)

a. Kompetensi

Rerata nilai kompetensi kelas eksperimen sebelum perlakuan adalah 66,54. Rerata nilai kompetensi kelas eksperimen sesudah perlakuan adalah 74,38. Dari data tersebut nampak ada perbedaan mean (peningkatan rerata sebesar 7,84). Untuk melihat apakah perbedaan dan peningkatan itu bermakna selanjutnya dilakukan uji paired sample t test antara rerata

nilai pre test dan post test. Hasil analisis SPSS 16 diperoleh nilai t sebesar 2,857 dengan probabilitas signifikansi 0,007. Jadi disimpulkan bahwa rata-rata uji kompetensi sebelum dan sesudah perlakuan adalah berbeda.

b. Karakter

Hasil analisa data dapat dijelaskan bahwa rerata nilai karakter kelas eksperimen sebelum perlakuan 65,24 dan sesudah perlakuan 74,97. Dari data tersebut nampak terdapat perbedaan mean (peningkatan rerata sebesar 9,73). Untuk melihat apakah perbedaan mean dan peningkatan itu bermakna selanjutnya dilakukan *uji paired sample t test* antara rerata nilai pre test dan post test. Dari hasil analisis dengan SPSS 16 diperoleh nilai t sebesar 7,667 dengan probabilitas signifikansi 0,000. Disimpulkan bahwa rata-rata nilai karakter antara sebelum dan sesudah perlakuan adalah berbeda.

Berdasarkan data tersebut maka disimpulkan bahwa pada kelas eksperimen dengan perlakuan model yang dikembangkan baik pada komponen kompetensi maupun karakter jgati diri terdapat peningkatan rerata dan terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai pre-tes dan post-tes.

3. Perbedaan Rerata Sebelum dan Sesudah Perlakuan (Kelas Kontrol)

a. Kompetensi

Hasil analisis dengan Program SPSS 16.0 diperoleh hasil sebagai berikut: Rerata kompetensi kelas kontrol sebelum perlakuan adalah 66,0. Rerata nilai kompetensi kelas kontrol

sesudah perlakuan adalah 66,2. Dari data tersebut nampak ada perbedaan mean (peningkatan rerata sebesar 0,21. Dari hasil analisis dengan SPSS 16 diperoleh nilai t sebesar 0,752 dengan probabilitas signifikansi 0,457. Jadi disimpulkan bahwa rata-rata nilai uji kompetensi antara sebelum dan sesudah perlakuan adalah sama.

b. Karakter

Hasil analisa data menunjukan rerata nilai karakter kelas kontrol sebelum perlakuan 64,67 dan sesudah perlakuan 65,26. Dari data tersebut nampak ada perbedaan mean (peningkatan rerata sebesar 0,79). Dari hasil analisis diperoleh nilai t sebesar 1,181 dengan probabilitas signifikansi 0,245. Jadi disimpulkan bahwa rata-rata nilai karakter sebelum dan sesudah perlakuan adalah sama.

Dari hasil analisis data disimpulkan bahwa pada kelas kontrol, pelaksanaan pembelajaran PKN berbasis kearifan lokal dengan model kooperatif menunjukkan hasil pada komponen kompetensi, karakter dan jati diri bangsa terdapat peningkatan rerata apabila dilihat dari rerata pra-test dengan post-test, serta tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai pre-test dan post-test.

4. Perbedaan Rerata Sebelum dan Sesudah Perlakuan (Eksperimen dan Kontrol)

a. Kompetensi

Hasil analisis data dapat dijelaskan bahwa rata-rata nilai kompetensi sebelum perlakuan pada kelas eksperimen 74,38 dan pada kelas kontrol 66,21. Dari hasil analisis diperoleh nilai *F* hitung *lavene test* sebesar 0,002 dengan nilai probabilitas 0,965. Karena probabilitas $>0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 tidak dapat ditolak atau memiliki variance yang sama. *Output SPSS Test of between subject effects* memberikan nilai *F* hitung sebesar 4,553 untuk perlakuan dengan nilai signifikansi sebesar 0,036. Karena nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa rerata kompetensi kedua kelompok berbeda secara signifikan.

b. Karakter

Hasil analisis data dapat dijelaskan bahwa rata-rata nilai karakter sesudah perlakuan pada kelas eksperimen 75,75 dan pada kelas kontrol 70,25. Selanjutnya dari hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *F* hitung diperoleh sebesar 4,553 dengan nilai signifikansi sebesar 0,036. Karena nilai signifikansi $< 0,05$ maka disimpulkan bahwa nilai rerata karakter kedua kelompok, yakni kelas eksperimen dan kontrol berbeda secara signifikan. Kemudian dari hasil analisis diperoleh nilai *F* hitung *lavene test* sebesar 2,824 dengan nilai probabilitas 0,097. Karena probabilitas $>0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima atau memiliki variance sama. *Output SPSS* memberikan nilai *F* hitung sebesar 37,538 untuk perlakuan

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa rerata karakter kedua kelompok (eksperimen dan kontrol) berbeda secara signifikan.

Berdasarkan deskripsi data di atas maka disimpulkan bahwa sesudah kelas eksperimen diberikan perlakuan model pembelajaran PKn berbasis budaya lokal dan kelas kontrol diberi perlakuan dengan pengajaran PKn dengan model pembelajaran kooperatif, kemudian dilakukan post-test diperoleh rerata yang berbeda. Pada kedua indikator terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil post-test kedua kelompok. Hal ini membuktikan bahwa model tergolong efektif untuk meningkatkan kompetensi dan menguatkan karakter jati diri pada peserta didik.

Berdasarkan uji efektivitas model maka secara keseluruhan (kelompok SMPN 10 dan SMPN 21) menunjukkan bahwa model pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal yang dikembangkan terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi belajar dan penguatan karakter jati diri bangsa. Dalam tindakan berikutnya ketika model pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal diterapkan pada kategori sekolah yang berbeda ternyata tidak menunjukkan adanya perbedaan secara signifikan. Karena itu model pembelajaran yang dikembangkan dapat diterapkan pada kategori sekolah apapun dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap semua kompetensi dan penguatan karakter jati diri bangsa.

D. Validitas, Praktikabilitas, dan Efektivitas 'Mobel PKn Berkelok'

Model pembelajaran yang dikembangkan mulai dari draft awal model, uji coba terbatas, dan uji coba luas hingga uji validasi terbukti telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang digunakan untuk menilai model pembelajaran mengacu pada kriteria Nieveen (1999), yakni kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan.

1. Kevalidan

Model dikatakan valid jika memenuhi kriteria: (1) Minimal dua dari tiga ahli (validator) menyatakan bahwa model didasarkan pada dasar teoretik yang kuat. (2) Minimal dua dari tiga ahli menyatakan bahwa komponen model secara konsisten saling berkaitan. (3) Hasil ujicoba menunjukkan bahwa komponen-komponen saling berkaitan.

Hasil validasi ahli dan praktisi pada saat uji coba terbatas menunjukkan bahwa draft awal 'Mobel PKn Berkelok' telah memenuhi kriteria (1) dan (2). Adapun untuk kriteria (3) maka berdasarkan hasil observasi mulai uji coba (Uji 1,2) dan uji validasi (UV) menunjukkan bahwa komponen-komponen pembelajaran saling berkaitan satu dengan lainnya. Desain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi saling berkaitan, antara langkah-langkah (sintak) pembelajaran satu sama lain juga saling berkaitan, antara aktivitas guru dengan peserta didik saling berkaitan, antara aktivitas peserta didik dalam kegiatan

kelompok dengan aktivitas peserta didik dalam kegiatan individu juga saling berkaitan. Berdasarkan hasil tersebut maka 'Model PKn Berkelok' yang dikembangkan telah memenuhi syarat-syarat validitas sebuah model pembelajaran.

2. Kepraktisan

Model dikatakan praktis jika memenuhi kriteria: (1) Minimal dua dari tiga ahli memberikan pertimbangan bahwa model tersebut dapat diterapkan di kelas. (2) Guru menyatakan dapat menerapkan model di kelas. (3) Tingkat keterlaksanaan model termasuk dalam kategori tinggi.

Hasil uji coba terbatas menunjukkan bahwa validator praktisi (guru PKn SMP) yang diminta memberikan validasi menyatakan draft model pembelajaran layak dan dapat diterapkan di kelas. Adapun untuk kriteria (2) dan (3) berdasarkan hasil observasi proses maupun hasil pembelajaran mulai dari uji coba 1-2 hingga uji validasi telah menunjukkan bahwa guru dapat menerapkan di kelas dan hasilnya menunjukkan kecenderungan terus meningkat. Hasil akhir uji coba terbatas menunjukkan bahwa hasil observasi aktivitas guru menunjukkan sangat baik. Hasil analisis aktivitas peserta didik menunjukkan sangat baik dan rata-rata penguasaan kompetensi atau hasil belajar ketuntasan belajar 70 dan indikator peserta didik yang mencapai ketuntasan mencapai 75%. Kemudian peningkatan skor karakter jati diri bangsa mencapai 80%. Demikian pula dengan hasil akhir uji coba luas, hasil observasi

aktivitas guru, peserta didik, maupun hasil belajar peserta didik menunjukkan nilai rata-rata di atas 70. Dengan demikian kriteria kepraktisan pembelajaran telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa 'Mobel PKn Berkelok' adalah praktis (dapat diterapkan di kelas).

3. Keefektifan

Model dikatakan efektif jika dipenuhi 4 dari 5 kriteria berikut: (1) rata-rata aktivitas *on task* peserta didik minimal sebesar 90%, (2) rata-rata aktivitas aktif peserta didik minimal sebesar 40%, (3) terdapat kecenderungan peningkatan skor tes, (4) lebih dari 50% peserta didik memberikan tanggapan positif, dan (5) guru memberikan tanggapan positif terhadap model.

Untuk membuktikan bahwa 'Mobel PKn Berkelok' yang dikembangkan telah memenuhi syarat-syarat keefektifan dapat dilihat dari perkembangan aktivitas peserta didik, aktivitas guru, tanggapan guru dan peserta didik mengenai keterlaksanaan atau adaptasi model. Hasil penilaian aktivitas guru dan murid dalam penerapan model pada setiap tahapan pengujian mengalami perkembangan hingga mencapai standar yang sangat baik. Demikian pula dengan kecenderungan peningkatan hasil belajar peserta didik pada uji coba dan uji luas menunjukkan kecenderungan terus meningkat pada komponen kompetensi dan komponen karakter dan jati diri bangsa. Dengan demikian pelaksanaan 'Mobel PKn Berkelok' di SMPN 10 dan SMPN 21 telah berjalan sesuai dengan model yang

dikembangkan dan mampu meningkatkan skor kompetensi dan skor karakter jati diri bangsa sebanyak 80%. Model juga mampu meningkatkan ketuntasan belajar sekurang-kurangnya 75%. Karena itu, disimpulkan bahwa ‘Model PKn Berkelok’ telah memenuhi syarat-syarat keefektifan sebuah model pembelajaran.

Bab 8

PENGEMBANGAN ‘MOBEL PKn BERKELOK’

Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Kearifan Lokal (‘Mobel PKn Berkelok’) telah diuji secara terbatas, luas, dan uji efektivitas. ‘Mobel PKn Berkelok’ dinyatakan dapat digunakan sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kompetensi dan penguatan karakter jati diri peserta didik. Disadari bahwa model pembelajaran tidak selalu sempurna sehingga berbagai upaya untuk menyempurnakan model perlu terus menerus dilakukan. Bahkan kajian secara mendalam terhadap model pembelajaran PKn ‘berkelok’ perlu dilakukan agar dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya. Untuk itu maka pada bagian ini dideskripsikan hasil kajian atas penelitian pendahuluan, pengembangan model, dan atas pengujian model itu sendiri.

A. Hasil Studi Pendahuluan

1. Rasional Pengembangan Model

Sesuai dengan temuan pada penelitian pendahuluan bahwa permasalahan dalam pembelajaran PKn SMP di kota Surakarta adalah sebagai berikut. *Pertama*, tujuan PKn di tingkat per-sekolahan adalah mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik. Tujuan yang dirinci menjadi beberapa butir tersebut dipahami oleh para guru PKn, yaitu meliputi: (1) warga negara yang menguasai pengetahuan (*knowledge*), (2) memiliki keterampilan (*skills*), (3) mengembangkan sikap dan nilai (*attitudes and values*) dan dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan serta cinta tanah air.

Kedua, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia bersifat multi dimensional, maksudnya program PKn mengandung tiga dimensi, yakni sebagai (1) program kurikuler, (2) program akademik, dan (3) program sosial kultural. Dalam pelaksanaannya program tiga dimensi ini terjadi secara simultan, khususnya dalam mencapai tujuan umum PKn, yakni terbentuknya warga negara yang cerdas dan baik.

Ketiga, domain PKn sebagai program kurikuler pada hakikatnya merupakan program PKn yang dirancang dan dibelajarkan kepada peserta didik pada jenjang satuan pendidikan tertentu. Pelaksanaan pembelajaran pada domain ini kurang berhasil, setidaknya dapat dilihat dari adanya degradasi nilai-nilai karakter bangsa yang telah demikian tajam menggejala pada sebagian besar masyarakat. Untuk itu maka PKn masih sangat diperlukan, terlebih bahwa keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Keempat, domain PKn sebagai program akademik. Kajian ini lebih memperjelas bahwa PKn bukanlah semata-mata sebagai mata pelajaran dalam kurikulum sekolah melainkan pendidikan disiplin ilmu yang memiliki tugas komprehensif. Hal tersebut mengandung arti bahwa semua *community of scholars* mengemban amanat (*missions*) bukan hanya di bidang telaah instrumental, praksis-operasional dan aplikatif melainkan dalam bidang kajian teoritis-konseptual yang terkait dengan pengembangan struktur ilmu pengetahuan dan *body of knowledge*.

Kelima, domain PKn sebagai program sosial kultural. Program PKn ini dikembangkan dalam konteks kehidupan masyarakat dengan sasaran semua anggota masyarakat. Tujuannya lebih pada upaya pembinaan warga masyarakat agar menjadi warga negara yang baik dalam berbagai situasi dan perkembangan zaman yang senantiasa berubah. Terjadinya perubahan sistem politik pasca reformasi yang menimbulkan euforia politik berlebihan sehingga program sosial kultural pernah dilaksanakan pada masa pemerintahan Orde Baru, yakni melalui berbagai program penataran P4 tidak berjalan efektif. Karena itu, perlu dicarikan strategi program PKn dalam dimensi sosial kultural.

Keenam, perkembangan mata pelajaran PKn rasanya kental dengan aroma perkembangan politik di Indonesia. Orde reformasi memunculkan euforia pada tahun 1998 dan simbol-simbol orde baru dianggap sebagai bahaya laten, karena itu Pancasila melalui penataran P4 ikut dipinggirkan dalam dialektika kehidupan berbangsa. Pendidikan Moral Pancasila

(PMP) sebagai sebuah mata pelajaran berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tanpa ada *embel-embel* Pancasila.

Ketujuh, cakupan materi dalam pembelajaran PKn menjadi salah satu kendala dan kesulitan bagi guru dalam menyusun RPP dan implementasi pembelajaran. Kesulitan dan hambatan yang dihadapi guru saat pembelajaran PKn dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal dapat disimpulkan sebagai berikut. a) Kesesuaian antara materi PKn dengan alokasi waktu yang terdapat pada kurikulum kurang berimbang. Kondisi ini menjadi penyebab proses pembelajaran bersifat monoton, hafalan, dan tekstual karena guru cenderung menggunakan metode ceramah. b) Guru dihadapkan pada motivasi siswa yang rendah dalam mengikuti pelajaran PKn di kelas. Anggapan siswa jika pelajaran PKn lebih banyak menghafal menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya motivasi siswa. c) Guru dihadapkan pada persepsi siswa bahwa pelajaran PKn tidak terlalu penting. Hal itu dibuktikan dengan pelajaran PKn yang tidak masuk dalam ujian akhir nasional (UAN). Selain itu jam pelajaran PKn kelas IX harus “diambil” mata pelajaran lain karena fokus mempersiapkan UAN. d) Dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal, guru terkadang dihadapkan pada realitas masyarakat yang tidak sesuai dengan materi pelajaran. e) Guru mengalami kendala dalam menerapkan metode, model atau strategi pembelajaran yang *student centered*. Penyebabnya adalah rendahnya motivasi siswa dan materi yang bersifat hafalan, dan f) Guru merasa menyampaikan materi PKn kurang bermakna, bahwa kesesuaian pem-

belajaran PKn dengan implementasi di lapangan belum maksimal.

Beberapa temuan hasil penelitian pendahuluan pada dasarnya memberikan gambaran tentang kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran PKn sekaligus merupakan dasar pemikiran untuk mengembangkan model pembelajaran, termasuk strategi mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kearifan lokal untuk penguatan karakter dan jati diri bangsa.

2. Dasar Pemikiran Pengembangan Model

Mencermati temuan studi pendahuluan maka berdasarkan teori dan hasil-hasil penelitian dikemukakan ide dan pemikiran pengembangan model sebagai berikut.

- a. Materi *content informal* dalam PKn yang bersifat kontekstual sesuai dengan realitas sosial budaya peserta didik, yakni budaya Jawa.
- b. *Core value* budaya Jawa bersumber dari prinsip hormat dan rukun yang kemudian menjadi harmonisasi dijabarkan dan dipetakan dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai karakter.
- c. Untuk mempersiapkan peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik maka pembelajaran PKn dilakukan melalui (a) belajar sambil berbuat (*learning by doing*), (b) belajar memecahkan masalah sosial (*social problem solving learning*), (c) belajar melalui pelibatan sosial (*socio-participatory learning*), dan (d) belajar melalui pembiasaan dan interaksi sosial-kultural (*enculturation and socialization*).
- d. Proses pembelajaran PKn melalui (1) belajar sambil berbuat, (2) belajar memecahkan masalah sosial, (3) belajar

- melalui pelibatan sosial direalisasikan dengan model pembelajaran *Problem Based Learning*, *Project Based Learning*, dan Klarifikasi Nilai.
- e. Proses belajar melalui pembiasaan dan interaksi sosial-kultural direalisasikan melalui budaya sekolah, role model dari guru, kepala sekolah, dan orang tua.
 - f. Untuk merealisasikan tujuan PKn menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) dan warga negara yang aktif (*active citizen*) digunakan pembelajaran kooperatif dan klarifikasi nilai.

Kombinasi Pembelajaran Kooperatif dan Klarifikasi Nilai dipilih untuk merealisasikan model pembelajaran PKn di SMP berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan jati diri bangsa. Model pembelajaran tersebut dilandasi oleh teori konstruktivis dimana dalam model ini pembelajaran dimulai dengan menyajikan masalah nyata yang penyelesaiannya membutuhkan kerjasama antar siswa, guru memandu siswa menguraikan rencana pemecahan masalah menjadi tahap-tahap kegiatan, guru memberi contoh mengenai penggunaan keterampilan dan strategi yang dibutuhkan supaya tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan. Guru menciptakan suasana kelas yang fleksibel dan berorientasi pada upaya penyelidikan oleh siswa.

Klarifikasi Nilai adalah model pembelajaran penumbuhan-kembangan nilai moral yang bersentuhan langsung dengan upaya pencarian langsung oleh anak didik secara cerdas, dialogis, dan reflektif terhadap problematika dan dilema moral

yang akan selalu dihadapi anak. Karena itu, model strategi klarifikasi nilai memiliki arti yang sangat strategis terutama untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri anak itu sendiri dalam rangka penumbuhkembangkan nilai moral secara cerdas dan elegan bukan melalui paksaan dan tekanan dari luar diri anak itu sendiri.

Dengan memanfaatkan klarifikasi nilai peserta didik akan merefleksikan dan berfikir secara kritis dan komprehensif akan nilai-nilai yang dimilikinya dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan situasi nyata kehidupan sehari-hari atau mengkaitkannya dengan persoalan-persoalan yang telah pernah ada dalam kehidupan di masyarakat.

Pembelajaran klarifikasi nilai disebut juga sebagai inkuiri nilai karena dapat mengembangkan sikap dan kepribadian. Sikap dan kepribadian yang berkembang dengan belajar inkuiri, antara lain meragukan kebenaran yang telah lama dan ingin mengetahui hal yang baru, menghargai penalaran sebagai cara untuk memperoleh suatu kebenaran, menghargai data sebagai alat untuk menguji kebenaran, objektif terhadap data yang ada serta menghindari prasangka, bersedia menerima keputusan sementara sebelum mendapatkan kepastian jawaban.

Peserta didik dengan menggunakan belajar penemuan dapat menghubungkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Pembelajaran dengan penemuan (inkuiri) merupakan pembelajaran yang mengembangkan intelektual peserta didik, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berhasil mengembangkan potensi seorang peserta didik secara

maksimum. Hal ini seperti yang diharapkan Ausubel (1963) dapat mengembangkan belajar yang penuh makna (*meaningful learning*). Proses penemuan nilai merupakan karakteristik pembelajaran inkuiri selain induktif adalah keterampilan proses. Belajar dengan keterampilan proses berarti belajar sebagai proses. Proses cara menemukan pengetahuan, melibatkan mental peserta didik untuk menghayati subjek yang dipelajari. Inkuiri bukan berarti bertanya tetapi mencari makna lebih dalam dengan kegiatan intelektual agar peserta didik dapat lebih menghayati.

Salah satu komponen utama inkuiri adalah proses, berupa operasi proses intelektual. Inkuiri adalah keterampilan proses sebagai pendekatan belajar-mengajar yang mengarah kepada pengembangan kemampuan mental, fisik, dan sosial sebagai penggerak kemampuan dalam diri peserta didik. Pendekatan keterampilan proses menekankan adanya prinsip (1) motivasi, sebagai pembangkitkan daya dalam pribadi peserta didik yang mendorong untuk melakukan sesuatu, (2) latar atau konteks, yaitu menggunakan pengetahuan atau pengalaman yang telah dimiliki peserta didik, (3) keterarahan pada fokus tertentu dengan merumuskan batasan-batasan masalah yang akan dipecahkan murid, (4) hubungan sosial yang menekankan kerjasama, (5) belajar sambil bekerja dengan menekankan aktivitas mental dan fisik, (6) perbedaan perorangan sehingga tidak ada anak yang tertekan, (7) menemukan, yang menekankan proses belajar di mana peserta didik tidak hanya menerima informasi atau konsep tetapi didorong untuk mencari dan menemukan sendiri informasi serta konsep dan nilai tersebut, (8) peme-

cahan masalah dengan menekankan pada kepekaan peserta didik terhadap berbagai masalah dan kemudian mendorong memecahkan masalah-masalah tersebut (Semiawan, 1988: 10-13).

Perlunya pengembangan inkuiri nilai didasarkan bahwa penumbuh kembangan nilai-nilai moral pada anak didik ternyata tidak hanya sebatas mengupayakan dan menciptakan bentuk-bentuk interaksi sosial yang sangat kondusif dan positif bagi tumbuhkembangnya nilai-nilai moral dalam kehidupan anak yang akhirnya bermuara pada perilaku moral dalam kehidupan keseharian mereka. Namun yang lebih penting dan memiliki arti yang amat strategis dari yang pertama adalah menciptakan kemampuan bagi anak-anak didik secara cerdas mampu memahami dan menemukan nilai-nilai moral dalam dinamika interaksi sosialnya yang penuh dengan tantangan, terutama pada kondisi-kondisi sosial yang dinilai tidak kondusif bagi penumbuhkembangan nilai-nilai moral.

Peserta didik pada pembelajaran inkuiri dilatih ketajaman berpikirnya sehingga menjadi warga masyarakat yang mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dilatih mengidentifikasi masalah, membuat perkiraan berbagai aspek sosial yang merupakan sebab akibat masalah tersebut, menggali informasi berkenaan dengan permasalahan, dan akhirnya dilatih menyusun alternatif pemecahan masalah. Pembelajaran inkuiri merupakan suatu proses, peserta didik dibimbing mencari makna lebih dalam dengan aktivitas intelektual agar menghayati bukan hanya mendengarkan. Tujuan pembelajaran inkuiri tidak hanya

beyond knowing dan *beyond understanding* tetapi juga domain kognitif tinggi (analisis dan sintesis). Domain afektif terjadi dalam aktivitas menjabarkan nilai dan membentuk sikap, domain motorik terjadi dalam bentuk keterampilan aspek-aspek teknis inkuiri. Proses inkuiri dalam pembelajaran adalah (1) perumusan masalah, (2) memperkenalkan konsep-konsep, (3) memformulasikan hipotesis, (4) mengumpulkan data dan informasi untuk menguji hipotesis, dan (5) penarikan kesimpulan.

Implementasi model pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal adalah menumbuh-kembangkan nilai-nilai moral. Karena itu klarifikasi nilai merupakan pilihan dalam menjawab dinamika psiko-sosial dalam diri anak. Tertujunya pilihan pada klarifikasi nilai dikarenakan model pengajarannya sangat menekankan akan terwujudnya kemampuan anak untuk memilah, memilih, memahami dan bereksplorasi secara cerdas terhadap nilai-nilai moral dalam konteks materi yang dipelajari.

B. Pengembangan ‘Mobel PKn Berkelok’

Melalui kajian teoritik dan kerangka pemikiran serta temuan hasil penelitian awal maka desain model pembelajaran yang dikembangkan adalah dengan mengadopsi dan menggabungkan model Pembelajaran Kooperatif dan Klarifikasi Nilai. Pembelajaran Kooperatif terdiri dari enam tahapan, yakni: (1) menyampaikan tujuan, (2) menyampaikan informasi, (3) mengorganisasikan dalam kelompok, (4) membimbing kelompok untuk bekerja dan belajar, (5) mengevaluasi, (6) memberi penghargaan. Adapun model Klarifikasi Nilai terdiri dari tiga fase, yakni peserta didik (1) memilah dan memilih nilai, (2)

menghargai dan mengekspresikan nilai, (3) aktualisasi dan internalisasi nilai. Penggabungan dua model pembelajaran dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada model pembelajaran menurut Permen Diknas No 41 Tahun 2007 terdiri dari 5 fase, yaitu fase-1 Apersepsi, fase-2 Eksplorasi, fase-3 Elaborasi, fase-4 Konfirmasi, dan fase-5 Penutup.

Model Pembelajaran Kooperatif merupakan rumpun *The social family models* adalah rumpun model pembelajaran tentang hakekat manusia dan cara belajar. Rumpun model ini menekankan pada sifat dasar masyarakat dan belajar tingkah laku sosial, serta interaksi sosial dalam belajar. Peranan sentral pendidikan dalam model ini adalah mempersiapkan warga-negara berperilaku demokrasi, mempertinggi kehidupan personal dan sosial serta untuk menjamin hasil dari proses demokrasi. Karena itu, *cooperative* akan mempertinggi kualitas hidup, membawa kegembiraan dan pengertian tentang semangat dan menurunkan konflik sosial. *Cooperative behavior* selain didukung oleh adanya masyarakat juga karena kemampuan intelektual individu. Karena itu, diperlukan interaksi sosial untuk dapat membangkitkan *academic learning*. Perkembangan produk *social behavior*, *academic skills*, dan *knowledge* saling bergabung. Kerjasama akan menghasilkan *collective energy* yang disebut sinergi. Model sosial dalam pembelajaran merupakan pondasi membangun komunitas belajar. Karena itu manajemen kelas (*classroom management*) merupakan bahan mengembangkan kerjasama dalam kelas. Perkembangan positif pada budaya sekolah merupakan proses pengembangan cara-

cara integratif dan produktif pada interaksi dan norma-norma yang mendukung semangat aktivitas belajar.

Secara umum pada tujuan pembelajaran mengacu pada tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, yakni pada peningkatan penguasaan peserta didik terhadap materi PKn, penguatan karakter yakni kemampuan peserta didik dalam melakukan klarifikasi nilai-nilai yang bersumber dari nilai kearifan lokal budaya Jawa dan meningkatkan karakter jati diri peserta didik. Rumusan tujuan yang disusun merupakan pencerminan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dengan indikasi meningkatnya penguasaan peserta didik terhadap materi PKn sekaligus penguatan karakter peserta didik.

‘Mobel PKn Berkelok’ dikembangkan dengan menggunakan pendekatan proses kurikulum. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai kearifan Jawa ke dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang akan diajarkan. Cara ini dipandang tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah dan dapat diterima oleh seluruh peserta didik tanpa harus menambah jam pelajaran.

Materi pembelajaran sesuai SK dan KD yang dikembangkan dengan menggunakan buku pegangan guru dan peserta didik serta LKS dan nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa. Pemilihan nilai-nilai yang dikembangkan disesuaikan dengan materi pembelajaran dan nilai-nilai pendidikan karakter. Pelaksanaan pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal dikembangkan sejalan dengan pembelajaran PKn di kelas, dengan alokasi waktu setiap pertemuan 2 jam pelajaran atau 2 x 40 menit.

Media dan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Pada model ini, media, sumber, dan alat pembelajaran yang digunakan guru pada dasarnya sangatlah luas. Dapat berupa media cetak, maupun media elektronika mulai yang sederhana hingga media modern berteknologi tinggi. Karena itu pemilihan dan penggunaan media, sumber, dan alat tidak ditentukan secara khusus, serta perlu memperhatikan kondisi nyata di sekolah, khususnya ketersediaan, dan kemampuan guru dalam menggunakan media, sumber, dan alat tersebut. Media, sumber, dan alat tersebut antara lain berupa buku paket dan buku sumber mata pelajaran IPS, LCD dan internet yang pada umumnya telah dimiliki dan mudah digunakan oleh peserta didik.

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembelajaran yang diimplementasikan telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu penilaian yang dilakukan meliputi penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses diarahkan untuk menilai kegiatan dan perilaku peserta didik selama pembelajaran berlangsung sedangkan penilaian hasil dimaksudkan untuk menilai penguasaan peserta didik terhadap materi pembelajaran yang ditetapkan.

Penilaian proses pada implementasi 'Mobel PKn Berkelok' dikembangkan dilakukan dengan melakukan pengamatan kegiatan peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung.

Misalnya pada saat diskusi, mengerjakan tugas individu dan kelompok, pada saat presentasi, mengemukakan tanggapan, dan lain-lain. Sedangkan penilaian hasil dilakukan menggunakan teknik tes dan non tes. Tes digunakan untuk menilai penguasaan kompetensi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Skala sikap digunakan untuk mengukur karakter dan sikap jati diri bangsa. Evaluasi pembelajaran disusun dengan mengacu tujuan pembelajaran, karena evaluasi diadakan untuk mengukur tercapainya tujuan pembelajaran. Tes yang dikembangkan sebagai alat evaluasi terdiri dari soal pilihan ganda untuk menjangring pengetahuan peserta didik terhadap materi, tes skala sikap untuk mengukur karakter dan sikap peserta didik terhadap jati diri bangsa.

Secara umum tujuan pengembangan ‘Model PKn Berkelok’ yakni agar peserta didik secara kritis mampu menemukan nilai-nilai yang dapat diteladani maupun yang dihindari dari materi pembelajaran. Selain itu model diharapkan juga memberi efek yang berarti terhadap penguatan karakter dan sikap peserta didik terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa.

Dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri dan nilai-nilai orang lain maka pelaksanaan pembelajaran kooperatif digabungkan dengan pendekatan klarifikasi nilai (VCT). Penggabungan model pembelajaran *cooperative learning* dan *Value Clarification Technique* didasari bahwa perkembangan moral terkait erat dengan perkembangan kognitif dan hasil dari interaksi sosial. Melalui ‘Model PKn Berkelok’ menumbuh kembangkan kemampuan anak didik agar

secara cerdas mampu memahami dan menemukan nilai-nilai moral dalam dinamika interaksi sosialnya yang penuh dengan tantangan, terutama pada kondisi-kondisi sosial yang dinilai tidak kondusif bagi penumbuhkembangan nilai-nilai moral. Pembelajaran VCT (*Value Clarification Technique*) adalah teknik pengajaran untuk membantu peserta didik dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri peserta didik. Pendekatan ini akan membantu peserta didik dalam memahami dan menemukan nilai-nilai/ makna peristiwa secara mendalam (*ultimate meaning*).

Materi pembelajaran diarahkan pada tujuan yang ditetapkan, pada tiap-tiap RPP dicantumkan juga materi tentang nilai-nilai yang dikembangkan dari budaya Jawa. Sedangkan kelengkapan pembelajaran atau fasilitas pendukung meliputi perangkat-perangkat yang digunakan dalam pembelajaran dan alat bantu pembelajaran. Perangkat-perangkat tersebut meliputi: Lembar kerja kelompok, Lembar evaluasi mandiri (tes pilihan ganda) dan Lembar Skala Sikap berkaitan dengan nilai karakter. Materi pembelajaran yang disampaikan guru disusun berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan tetap memperhatikan karakteristik pelajaran PKn.

Langkah-langkah pembelajaran dikembangkan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran kooperatif yang digabungkan dengan model pembelajaran klarifikasi nilai. Penggabungan dua model pembelajaran dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada model pembelajaran menurut Permen Diknas No.41 tahun

2007, terdiri dari tiga tahap, yakni (1) Apersepsi, (2) Inti, terdiri atas Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi serta (3) Penutup.

Pada implementasi uji terbatas ke-2, komponen desain model mengalami perubahan pada langkah-langkah pembelajaran klarifikasi nilai. Pada tahap awal perencanaan model terdiri dari tujuh langkah yakni (1) peserta didik memilih nilai; (2) peserta didik mengklasifikasi nilai melalui analisis masalah dalam diskusi; (3) Peserta didik mempertimbangkan konsekuensi dari nilai yang dipilih; (4) Peserta didik mengargai nilai dengan menunjukkan alasannya dalam konteks permasalahan yang dikaji; (5) Mengekspresikan pilihan; peserta didik menentukan pilihan nilai yang relevan dengan permasalahan dan disampaikan dalam diskusi kelas; (6) Mengaktualisasikan pilihan nilai (tindakan). Peserta didik menunjukkan contoh-contoh sikap/perbuatan yang harus dikembangkan serta yang harus dihindari; (7) Internalisasi nilai, peserta didik menyatakan posisi dan alasannya, menguji dalam beberapa situasi yang sama, dan mengaktualisasikan nilai yang dipilih dalam kehidupan di sekolah/ masyarakat.

Ketujuh langkah klarifikasi nilai mencerminkan keutuhan dimensi pendidikan yang produktif dan efisien disederhanakan menjadi tiga langkah. Hal ini dimaksudkan agar guru mudah dalam mengevaluasi dan memberi penguatan pada setiap tahapan kegiatan pembelajaran. Langkah pertama sampai ketiga termasuk dimensi kognitif (menekankan kemampuan rasional). Langkah keempat dan kelima mencerminkan dimensi afektif (penghargaan dan rasa bangga), langkah keenam dan ketujuh

mencermikan dimensi psikomotorik (tindakan konkrit yang terus-menerus dan terpola).

Pendekatan klarifikasi nilai memberi penekanan pada nilai yang sesungguhnya dimiliki oleh seseorang berdasarkan berbagai latar belakang pengalamannya. Karena itu tujuan pendidikan adalah mengembangkan keterampilan peserta didik dalam melakukan proses menilai. Sejalan dengan pandangan tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Elias (1989), bahwa bagi penganut pendekatan ini, guru bukan sebagai pengajar nilai melainkan sebagai *role model* dan pendorong. Peranan guru adalah mendorong peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk mengembangkan keterampilan peserta didik dalam melakukan proses menilai.

Penyederhanaan langkah-langkah pengembangan model pembelajaran PKn berbasis kearifan local sesuai dengan tahap perkembangan intelektual atau perkembangan kognitif anak. Seperti dijelaskan dalam dalil pokok Piaget bahwa: (1) perkembangan intelektual terjadi melalui tahap-tahap beruntun yang selalu terjadi dengan urutan yang sama; (2) tahap-tahap tersebut didefinisikan sebagai suatu kluster dari operasi mental (pengurutan, pengekelan, pengelompokan, pembuatan hipotesis dan penarikan kesimpulan) yang menunjukkan adanya tingkah laku intelektual; dan (3) gerak melalui tahap-tahap tersebut dilengkapi oleh keseimbangan (*equilibration*), proses pengembangan yang menguraikan tentang interaksi antara pengalaman (*asimilasi*) dan struktur kognitif yang timbul (*akomodasi*).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang berlangsung secara interaktif antara faktor intern pada diri pembelajar dengan faktor ekstern atau lingkungan sehingga melahirkan perubahan tingkah laku. Pematangan intelektual atau pertumbuhan kognitif seseorang ditunjukkan oleh bertambahnya ketidak tergantungan respons dari sifat stimulus.

Integrasi nilai kearifan lokal yang bersumber dari budaya Jawa dapat dilaksanakan karena nilai-nilai tersebut memiliki makna bagi komunitasnya. Dalam memaknai nilai kearifan lokal budaya Jawa peserta didik secara aktif melalui diskusi melakukan transformasi makna untuk pembentukan karakter. Melalui proses *self-indication* peserta didik menilai, memberi makna, pada nilai-nilai budaya yang dapat diteladani dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna tersebut. Dalam konteks ini interpretasi dan transformasi terhadap nilai-nilai budaya menjadi nilai-nilai karakter tidak terlepas dari interaksi sosialnya.

Melalui integrasi nilai budaya Jawa dalam pembelajaran PKn menjadikan pembelajaran menjadi bermakna, karena materi yang dipelajari di sekolah ada relevansinya dengan konteks kehidupan masyarakat. Penemuan nilai-nilai relevan dengan kehidupan dilakukan peserta didik melalui interaksi kelompoknya. Dengan demikian model pembelajaran ini mengembangkan “bagaimana cara /proses belajar” menemukan sesuatu yang bermakna bukan apa hasil belajar. Karena itu belajar yang efektif adalah belajar yang menekankan makna dan keaktifan

peserta didik sehingga peserta didik mencari, mengkontruksi pengetahuan sehingga menjadi bermakna.

Pada tahap eksplorasi merupakan perpaduan kegiatan guru menyampaikan informasi dan mengorganisasi peserta didik dalam kelompok belajar dengan kegiatan peserta didik memilah dan memilih nilai melalui diskusi kelompok. Guru menyampaikan informasi tentang materi sesuai dengan tujuan pembelajaran, berkaitan dengan kegiatan orientasi dan apersepsi. Peserta didik secara berkelompok mulai menelusuri berbagai sumber belajar dan buku teks untuk mengidentifikasi, menganalisis permasalahan yang menjadi tugas kelompok, mendeskripsikan nilai-nilai dalam konteks peristiwa/ permasalahan yang dikaji. Melalui diskusi kelompok peserta didik memilah dan memilih nilai dan mendeskripsikan contoh-contoh tindakan yang relevan dengan pilihan nilai. Dalam kegiatan memilih dan memilah nilai membutuhkan proses berfikir yang melibatkan operasi mental, seperti: klasifikasi, induksi, deduksi, dan penalaran. Proses berfikir dalam rangka memilah dan memilih nilai relevan dengan teori belajar Bruner, "discovery" yaitu belajar dengan menemukan konsep sendiri, suatu proses pencarian pengetahuan secara aktif peserta didik dan dengan sendirinya memberikan hasil yang paling baik.

Kegiatan ini dilakukan peserta didik dalam bentuk diskusi dengan panduan lembar kerja kelompok (LKS 1-3). Tahap ini peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada.

Tahap elaborasi, peserta didik menghargai pilihan nilai dan mengekspresikan pilihan nilai tersebut dalam diskusi kelompok dan diskusi kelas. Peserta didik secara kooperatif dan kolaboratif berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Melalui diskusi kelas peserta didik mengekspresikan dan menegaskan pilihan nilai yang relevan dengan permasalahan. Melalui diskusi peserta didik menyebutkan contoh-contoh tindakan yang harus dilakukan dan dihindari. Guru memfasilitasi peserta didik agar diskusi, berjalan dengan baik dan memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis. Melalui diskusi memberi kesempatan untuk berpikir menganalisis menyelesaikan masalah dan bertindak tanpa rasa takut dalam diskusi.

Pada tahap ini proses berpikir berkaitan dengan belajar bermakna, karena dengan berpikir peserta didik dapat memperoleh informasi baru dan mengembangkannya. Kebermaknaan pembelajaran PKN bagi peserta didik tercapai dengan memasukkan materi yang menghubungkan pengetahuan, keyakinan dan sikap yang mereka peroleh di dalam kelas maupun di luar kelas (kontekstual). Belajar akan bermakna bila pada pembelajaran peserta didik berhasil mengaitkan informasi pada konsep-konsep relevan yang terdapat pada struktur kognitifnya.

Pelaksanaan tahap elaborasi merupakan fase peserta didik mengekspresikan nilai dan menghargai nilai. Kegiatan ini mengembangkan aspek afektif setelah didahului oleh kegiatan berfikir tingkat tinggi meliputi aspek-aspek mengorganisasi, membangun, menginvestigasi dan mengevaluasi sehingga peserta didik mampu memilah dan memilih nilai. Karena itu kegiatan ini akan membekali peserta didik tentang “etos”,

“nilai”, “keyakinan”, “kebutuhan” untuk hidup bersama (*to live together*) orang atau kelompok lain. Peserta didik akan belajar bagaimana menghormati teman sejawat manusia sebagai manusia, dilatih untuk mempunyai rasa tanggungjawab terhadap seluruh ciptaan yang hidup dan bernyawa, dilatih agar mereka peka dan cepat tanggap terhadap hal-hal yang mengarah kepada kebencian, kekerasan dan seluruh perkembangan baru dan yang mengancam kehidupan bersama.

Tahap inti yang ketiga adalah konfirmasi, yakni guru dan peserta didik meluruskan kesalahan pahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan dari hasil diskusi. Peserta didik mengklarifikasi hasil diskusi yang belum dipahami untuk melakukan evaluasi dan menguji relevansi nilai-nilai yang dipilih dengan contoh-contoh tindakan di sekolah dan masyarakat. Peserta didik dengan bimbingan guru melakukan refleksi dan merangkum hasil diskusi kelas. Peserta didik menyatakan posisi dan alasannya, menguji dengan beberapa situasi yang sama, dan mengaktuali-sasikan nilai yang dipilih dalam kehidupan di sekolah/ masyarakat/ negara.

Berkaitan dengan kegiatan peserta didik pada tahap konfirmasi yang di dalamnya termasuk kegiatan peserta didik dalam aktulisasi dan internalisasi nilai relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tidak diperoleh secara pasif oleh seseorang melainkan melalui tindakan. Tahap ini relevan dengan tujuan pendidikan nilai, yakni (1) membantu peserta didik untuk menyadarkan dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai orang lain. (2) membantu peserta didik supaya mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan

orang lain, (3) membantu peserta didik mampu menggunakan kemampuan berperilaku rasional dan tingkah laku mereka sendiri secara bersama-sama. Karena itu model pembelajaran yang dikembangkan ini lebih menekankan pada bagaimana peserta didik belajar bukan bagaimana guru mengajar. Tanggung jawab guru dalam pembelajaran adalah menstimulasi dan memotivasi peserta didik. Mendiagnosis dan mengatasi kesulitan peserta didik serta menyediakan pengalaman untuk menumbuhkan pengetahuan peserta didik. Belajar merupakan proses untuk membangun penghayatan terhadap suatu materi yang disampaikan.

Tahap penutup, kegiatan pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal, yakni peserta didik bersama guru menyimpulkan keseluruhan pengalaman belajar dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan, mengidentifikasi perasaan-perasaan positif dan negatif yang muncul, menentukan rekomendasi akhir untuk masing-masing nilai, dan mengaktualisasikan sikap pribadi masing-masing secara berkelanjutan sehingga terjadi proses internalisasi nilai. Langkah penting dalam kegiatan ini adalah pemberian tugas terstruktur sebagai tindak lanjut dari pengembangan model pembelajaran klarifikasi nilai agar anak memiliki pengetahuan moral yang sangat bermanfaat bagi *moral judgment* dan *moral reasoning* yang akan mempengaruhi perilakunya.

Tahap terakhir model pembelajaran yang dikembangkan relevan dengan pemikiran pembelajaran Ki Hadjar Dewantoro, yakni *tut wuri handayani* sehingga peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh-

nya dengan pemaknaan yang lebih baik. Peserta didik membangun sendiri konsep atau struktur materi yang dipelajarinya, tidak melalui paket-paket konsep yang dikemas guru melainkan peserta didik sendiri yang mengemasnya. Dalam proses mengemas pengetahuan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik lainnya berbeda atau mungkin terjadi kesalahan. Di sinilah tugas guru memberikan bantuan dan arahan sebagai fasilitator dan pembimbing. Hal inilah yang disebut dengan konstruktivisme dalam pembelajaran, yakni adanya aktivitas peserta didik yang sifatnya proaktif dan reaktif dalam membangun pengetahuan. Dengan demikian tercapai konstruktivisme secara utuh. Penemuan dalam belajar lebih mudah diperoleh dalam konteks sosial budaya seseorang. Karena itu tujuan pendidikan adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berfikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sosialnya.

Implikasi dari teori belajar konstruktivisme dengan tujuan pengembangan model dengan menggunakan klarifikasi nilai adalah mengembangkan dimensi kognitif atau kemampuan rasional (memilah dan memilih nilai); (2) dimensi afektif (penghargaan dan rasa bangga), (3) dimensi psikomotorik (tindakan konkrit yang terus menerus dan terpola). Pada akhirnya akan terjadi internalisasi nilai-nilai yang dibangun oleh peserta didik sendiri.

Dari deskripsi di atas implikasinya terhadap model pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal adalah bahwa kegiatan pembelajaran identik dengan aktivitas peserta didik secara optimal, tidak cukup dengan mendengar dan melihat

tetapi harus dengan *hands-on*, *minds-on*, *konstruktivis*, dan *daily life* (kontekstual). Pembelajaran tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya perhatian pada faktor emosional dan nilai-nilai yang dibawanya. Di lain pihak, pembelajaran juga tidak dapat dijalankan dengan kekosongan informasi. Oleh karena itu, kedua-duanya harus menjadi satu.

Dari hasil pembahasan di muka dapat disimpulkan bahwa penggabungan model pembelajaran kooperatif dengan klarifikasi nilai dalam kerangka pembelajaran menurut permendiknas no 41/ th 2007 menjadi model PKn berbasis kearifan lokal relevan dengan teori belajar dan model pembelajaran yang dipilih. Proses pembelajaran bukan hanya menekankan pada transfer pengetahuan, moral, dan sikap tetapi lebih menekankan pada bagaimana peserta didik melalui rekonstruksi memperoleh pengetahuan, menemukan dan mengembangkan nilai-nilai yang diyakini dan menjadikan sebagai pola tingkah laku dalam kehidupan sosialnya.

Proses pembelajaran yang menekankan pada “individu peserta didik” sebagai subjek belajar sejalan dengan pendidikan karakter, yaitu adanya cita-cita kemandirian manusia (*moral otonomy*) dalam bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan karakter diawali dengan pengetahuan (memilah dan memilih nilai). Pengetahuan (teori) tersebut bisa bersumber dari pengetahuan agama, sosial, dan budaya. Pengetahuan itu diharapkan dapat membentuk sikap atau akhlak yang mulia (mengekspresikan dan menghargai nilai), dan akhirnya mengamalkan apa yang diketahui. Pendidikan bukan hanya sekedar menumbuhkan dan mengembangkan

keseluruhan aspek kemanusiaan tanpa diikat oleh nilai tetapi nilai merupakan pengikat dan pengarah proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Karena itu praktek pendidikan hendaknya berbasis pada seperangkat nilai sebagai paduan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

Dalam kerangka pembelajaran humanitis, pendidikan karakter membutuhkan kemampuan guru untuk menyentuh dan menyapa keseluruhan dan keutuhan pribadi anak didik, yang meliputi: perasaan, rasio, imajinasi, kreativitas, dan memori. Dengan demikian maka paradigma pendidikan karakter seharusnya lebih tajam diarahkan pada kehendak dan motivasi serta bukannya intelektualitas.

C. Efektivitas 'Mobel PKn Berkelok'

1. Peningkatan Pengetahuan dan Penguatan Karakter

Penguasaan peserta didik terhadap materi PKn pada tahap uji coba terbatas dan uji coba luas dengan menerapkan 'Mobel PKn Berkelok' mengalami peningkatan. Indikasi ini terlihat dari perbedaan skor pengetahuan peserta didik terhadap materi PKn sebelum dan sesudah pembelajaran. Pada pretest rata-rata skor peserta didik pada uji coba terbatas dan pada uji coba luas cenderung tidak berbeda, hal ini disebabkan pemberian pretest dilakukan sebelum peserta didik mendapatkan perlakuan.

Implementasi pembelajaran pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal pada setiap siklus membawa dampak berbeda di kelompok sekolah dilihat dari indikator kinerja, yaitu (1) adanya peningkatan pengetahuan PKn yang ditandai dengan

sekurang-kurangnya 75% peserta didik kelas VIII semester dua memperoleh nilai 70 sebagai batas tuntas pembelajaran, (2) adanya peningkatan skor karakter yang ditunjukkan dengan peningkatan skor angket sebanyak 80%.

Ketuntasan aspek pengetahuan sangat dipengaruhi oleh kemampuan peserta didik dan tingkat kelompok sekolah. SMPN 10 termasuk dalam kelompok sekolah yang tinggi, penilaian ini didasarkan pada keberhasilan tingkat kelulusan dan standar nilai untuk masuk di SMPN 10. SMP ini menerapkan standar untuk menjaring calon peserta didik, yakni berdasar hasil tes masuk dan NEM. Melalui standar itu maka peserta didik SMPN 10 termasuk anak-anak yang memiliki kemampuan intelegensi tinggi. Karena itu, mereka akan mencapai ketuntasan belajar dengan waktu yang lebih singkat. Hasil pengujian model menunjukkan bahwa pada siklus ke-2, peserta didik di SMPN 10 telah mencapai indikator keberhasilan model pembelajaran yang dikembangkan dengan indikator 75%, peserta didik mencapai ketuntasan dengan nilai minimal 70% dan peningkatan skor karakter jati diri bangsa mencapai 80%. Pada komponen pengetahuan dan karakter dilihat dari prosentase ketuntasan maka untuk siswa SMPN 10 lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik di SMPN 21.

Pada siklus ke-3 di SMPN 21 mencapai ketuntasan komponen pengetahuan 88% dan SMPN 10 mencapai 93%. Komponen karakter SMPN 10 mencapai ketuntasan 80% sedangkan di SMPN 21 sebesar 75%. Dari hasil ini menunjukkan bahwa implementasi model mampu meningkatkan skor prestasi dan karakter yang dikembangkan di kedua SMPN.

Temuan di atas juga menunjukkan bahwa input sekolah sangat berpengaruh terhadap pencapaian pengetahuan dan pembentukan karakter peserta didik. Berkaitan dengan temuan tersebut dapat dijelaskan seperti temuan pada siklus ke-3 di SMPN 10 bahwa keberhasilan implementasi model pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal dipengaruhi oleh kondisi sekolah, meliputi peserta didik, guru, sarana dan prasarana, serta budaya sekolah.

Di SMPN 10 secara umum hasil pengembangan pengetahuan dan karakter lebih baik dari SMPN 21. Indikator ini dapat dijelaskan dari standar masuk SMPN 10 berdasar pada perolehan nilai UAN sedangkan di SMPN 21 tidak ada standar nilai UAN. Dari implementasi model pembelajaran terbukti bahwa di SMPN 10 prosentase pencapaian ketuntasan pembelajaran untuk komponen pengetahuan lebih tinggi dibandingkan dengan SMPN 21.

Pada komponen karakter berdasar tes hasil implementasi model untuk SMPN 10 lebih tinggi dibandingkan dengan SMPN 21. Temuan ini dapat dijelaskan bahwa berdasarkan input siswa di sekolah tersebut dan role model dari guru berpengaruh terhadap pendidikan karakter dan pembentukan sikap peserta didik.

Misi utama pendidikan mengajarkan bahwa semangat kedamaian, harmoni, dan keselamatan. Konsep ini mengandung arti bahwa pendidikan tidak sebatas mengenalkan peserta didik nilai-nilai budaya yang dianutnya melainkan juga mengajarkan penghayatan visi kemanusiaan. Karena itu perlu memasukkan suatu perspektif baru dalam pendidikan di sekolah, yaitu pen-

dekatan komplementer yang memberikan prioritas pada perspektif para penganut budaya lain (*insider*). Intinya menyertakan suatu empati, yang berusaha menjadikan apa yang dipahami dan dialami oleh para penganut suatu budaya dapat dipahami oleh orang luar, dan dengan demikian menghasilkan pengetahuan empatik yang netral dan tidak menilai (dengan menanggukkan imajinasi tidak percaya), terpisah dari reaksi-reaksi dan penilaian-penilaian subjektif.

Melalui proses inkuiri nilai peserta didik menemukan nilai-nilai moral dalam konteks pembelajaran, bersamaan itu sekolah menciptakan lingkungan kondusif bagi penanaman tentang nilai-nilai dasar yang menjadi *core values* pendidikan karakter. Budaya sekolah ini akan terinternalisasi dalam kepribadian peserta didik dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepribadian peserta didik sehingga menjadi manusia yang berkarakter.

Implikasi dari temuan pelaksanaan uji ‘Mobel PKn Berkelok’, bahwa (1) Integrasi nilai-nilai budaya dari lingkungan peserta didik dalam pembelajaran PKn akan meningkatkan penguasaan pengetahuan peserta didik terhadap materi pembelajaran. (2) Keberhasilan pembelajaran pada komponen pengetahuan dan karakter dilihat dari prosentase ketuntasan untuk SMPN 10 lebih tinggi dibandingkan dengan SMPN 21. Dalam penguatan karakter perlu dibarengi dengan pengembangan budaya sekolah yang menanamkan nilai-nilai dasar yang menjadi *core values* pendidikan karakter. (3) Sekolah sebagai tempat berkumpulnya peserta didik dari berbagai golongan ras budaya dan gender diharapkan mampu mentransformasikan nilai-nilai luhur yang dianggap “absolute” dan nilai-nilai budaya

yang bersifat *relative* menjadi “*core values*” pendidikan karakter yang terpancar dari nilai altruistik dalam keberagamaan.

2. Prinsip-prinsip Pembelajaran PKn 'Berkelok'

Prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam mengimplementasikan model pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal adalah sebagai berikut.

- a. Guru perlu memahami konsep, sumber nilai, dan fungsi nilai dalam kehidupan. Integrasi nilai-nilai budaya dalam pembelajaran PKn bertujuan agar pembelajaran tidak hanya berorientasi pada materi dan hasil tetapi juga mengembangkan sikap peserta didik dengan bersumber dari kearifan lokal. Tumbuh kembangnya nilai-nilai moral dapat dilakukan sendiri oleh peserta didik melalui proses penemuan nilai-nilai yang dapat diteladani maupun yang harus dihindari dalam konteks materi, relevansinya dengan realitas (kontekstual).
- b. Guru memiliki kemampuan mengembangkan nilai yang bersumber dari kearifan lokal budaya setempat. Fungsi guru dalam model sebagai pemandu dan sebagai nara sumber, karena itu guru perlu memiliki pemahaman tentang nilai yang bersumber dari kearifan lokal budaya setempat. Guru diharapkan mampu menjadi pemandu dan fasilitator bagi peserta didik dalam mentransformasikan nilai-nilai spirit yang bersumber dari kearifan lokal budaya setempat sebagai salah satu sumber pembentukan karakter bangsa.

- c. Guru menguasai prinsip-prinsip pembelajaran klarifikasi nilai. Dasar pengembangan model adalah pendidikan yang humanis, karena itu dalam proses pembelajaran menempatkan peserta didik sebagai individu yang aktif dan mampu menggunakan seluruh karakternya untuk menemukan nilai-nilai yang sesuai dengan pilihannya. Kemampuan tersebut diperoleh dengan bekal karakter dan melalui interaksi sosialnya. Karena itu klarifikasi nilai dalam pelaksanaannya digabung dengan model pembelajaran kooperatif.
- d. Guru harus bersikap objektif terhadap pilihan nilai-nilai setiap peserta didik. Salah satu prinsip pembelajaran klarifikasi nilai bahwa guru tidak boleh menyudutkan peserta didik terhadap pilihan nilainya. Tugas guru hanya memfasilitasi peserta didik agar mampu memilah dan memilih nilai, menghargai dan mengekspresikan nilai, dan mengaktualisasi nilai dalam bentuk tindakan yang relevan dan pada akhirnya terjadi internalisasi nilai.

3. Keunggulan ‘Mobel PKn Berkelok’

Beberapa keunggulan ‘Mobel PKn Berkelok’ dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a. Integrasi nilai-nilai budaya dalam pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal bersifat fleksibel, tergantung “*core value*” yang akan dikembangkan. Semua materi dalam SK dan KD PKn dapat didesain untuk integrasi nilai-nilai Pancasila. Transformasi nilai-nilai Pancasila ini bersifat lentur dan dinamis sehingga makna/karakter yang

- dikembangkan tergantung dalam konteks SK dan KD dan relevansinya dengan realitas kehidupan.
- b. Pembelajaran mengembangkan karakter dan warganegara muda yang baik. 'Mobel PKn Berkelok' dikembangkan dengan pembelajaran kooperatif dan klarifikasi nilai akan mempersiapkan peserta didik sebagai warganegara muda yang demokratis dan toleransi terhadap keberagaman dan memberikan bekal menuju terbentuknya warga negara yang baik (*"to be good citizens"*). Melalui proses inkuiri peserta didik tidak hanya menemukan kemungkinan pemecahan masalah tetapi juga menemukan nilai-nilai moral dalam konteks pembelajarannya.
 - c. Mengembangkan pribadi peserta didik secara utuh. 'Mobel PKn Berkelok' ditujukan untuk pengembangan potensi peserta didik secara utuh. Karena itu, model pembelajaran dapat dikatakan sebagai model pembelajaran kognitif, sosial, dan pendidikan nilai-moral. Model pembelajaran dikembangkan dengan pembelajaran VCT akan menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam merefleksikan dan berfikir secara kritis dan komprehensif akan nilai-nilai yang dimilikinya dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan situasi nyata kehidupan sehari-hari atau mengkaitkannya dengan persoalan-persoalan yang telah pernah ada dalam kehidupan. Dengan demikian pada hakikatnya 'Mobel PKn Berkelok' sejalan dengan tujuan pendidikan PKn.
 - d. Mengoptimalkan potensi sosial dan berpikir kritis-ilmiah peserta didik. Implementasi model mengajarkan kepada

peserta didik tentang keterampilan kerjasama dan kolaborasi, membantu peserta didik belajar keterampilan sosial dan secara bersamaan mengembangkan sikap demokrasi dan keterampilan berpikir logis. Pembelajaran dibentuk (*setting*) dalam bentuk kelompok kecil, pemecahan masalah, pencarian jawaban dan prinsip-prinsip demokrasi dengan interaksi satu sama lain dan merupakan lingkungan belajar sebagai sebuah karakter sistem sosial dengan prosedur demokrasi dan proses ilmiah. Dengan demikian akan mendorong peserta didik dalam berpikir dan bertindak, belajar aktif, perilaku kerjasama, dan tanggap pada kemajemukan dalam masyarakat multikultur.

4. Hambatan dalam Penerapan ‘Mobel PKn Berkelok’

Hambatan dalam penerapan ‘Mobel PKn Berkelok’ akan muncul dan menjadikan tujuan pembelajaran yang diharapkan tidak tercapai jika terjadi hal-hal berikut.

- a. Guru sangat mendominasi kelas dengan memberikan pesan-pesan moral yang menurut guru dianggap baik. Dominasi guru sangat dimungkinkan mengingat pendidikan selama ini dipahami sebagai transfer pengetahuan sehingga tugas guru adalah menyampaikan materi pembelajaran. Guru menempatkan diri sebagai pemateri atau nara sumber dalam pembelajaran dan peserta didik sebagai penerima. Karena itu orientasi pendidikan adalah menyampaikan materi sebanyak banyaknya.
- b. Guru tidak objektif dan terbuka dalam menilai pendapat peserta didik. Dalam kenyataannya sering terjadi proses

pembelajaran yang kurang mengembangkan dimensi kemanusiaan peserta didik. Dunia persekolahan tak ubahnya seperti mesin yang memproduksi lulusan dan luaran yang telah hilang sisi-sisi kemanusiaannya.

- c. Guru tidak menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan, demokrasi, dan bertanggung jawab. 'Mobel PKn Berkelok' dapat disebut sebagai laboratorium proses demokrasi dalam pembelajaran di kelas. Karena itu apabila guru mendominasi kelas dan tidak memberi ruang bagi setiap peserta didik untuk mengekspresikan pendapatnya maka akan menghambat tujuan yang diharapkan dari pengembangan model ini.
- d. Tidak adanya kebebasan peserta didik dalam menemukan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya secara moral. Karena itu peserta didik tidak memiliki keberanian untuk mengekspresikan nilai dan mengaktualisasikannya dalam bentuk tindakan karena tidak didukung oleh lingkungan yang kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexon dan Nana S.Sukmadinata. (2010). "Pengembangan Model Pembelajaran Terpadu Berbasis Budaya untuk meningkatkan Apresiasi Siswa Terhadap Budaya Lokal" Dalam *Cakrawala Pendidikan*. Juni 2010. Th. XXIX. No. 2. ISBN: 0216-1370. Jogjakarta: UNY.
- Alwasilah, A.Chaedar, dkk. (2009). *Etnopedagogi Landasan Praktek Pendidikan dan Pendidikan Guru*. Bandung: Kiblat.
- Arends, Richard. (1997). *Classrom Instruction and Management*. New York: Mc Graw Hill.
- Atmodjo, M.M.S.K. (1986). "Pengertian Kearifan Lokal dan Relevansinya dalam Modernisasi" *Dalam Ayatrohaedi penyunting. Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Ayatrohaedi. (1986). *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Barker. (2005). *Cultural Studies: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Barr, R.D.,dkk. (1978). *The Nature of the Social Studies*. Palm Spring: An ETS Pablication.
- Borba, M. (2008). *Membangun Kecerdasan Moral: Tujuh Kebajikan Utama Agar Anak Bermoral Tinggi*. Terj. Lina Jusuf. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Budimansyah, D. & Suryadi, K. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Prodi PKn-Sekolah Pascasarjana-UPI Bandung: Bandung.
- Bulach, Cletus R., (2002). "Implementing a Character Education Curriculum and Assessing Its Impact on Student Behavior". *ProQuest Education Journal*. Dec. 2002.
- Creswell, John W. (1994). *Qualitative & Quantitative Approach*. London New Delhi: SAGE Publications.
- Dewantara, Ki Hajar. (1977). *Karya Ki Hajar Dewantara. Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbitan Taman Siswa.
- Dewey, J. (1974). *The Child and The Curriculum and The School and Society*. Chicago and London: The University of Chicago.
- Doni Koesoema A. (2010). *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Eggen and Kauchak. (1996). *Strategies for Teachers: Information Processing Models in the Classroom*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Gall, Meredith D, Gall, Joyce P, & Borg, Walter R. (2003). *Educational Research, An Introduction* (Seventh Ed). Boston: Allyn and Bacon.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Books.
- Gunawan. (2006). *Pancasila, Pembangunan dan Nasionalisme*. Dalam Indonesian Journal of Sustainable Future, Vol. 2 No. 4 Desember 2006.

- Hariwijaya. (2004). *Islam Kejawen*. Yogyakarta: Gelombang Pasang.
- Hasan, H. (2001). *Pendidikan Ilmu Sosial*. Jakarta: Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.
- I Wayan Suastra N.K. & Ketut Tika. (2011). “Efektivitas Model Pembelajaran Sains Berbasis Budaya Lokal untuk Mengembangkan Kompetensi Dasar Sains dan Nilai Kearifan Lokal di SMP”. FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 5. No. 3 Desember 2011.
- Ibrahim, M. dkk. (2000). *Pembelajaran Kooperatif*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya Press.
- Joyce, B., Weil, M., Calhoun, E. (2000). *Models of Teaching*. London: Allyn and Bacon.
- Kaelan, dkk. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: PARADIGMA Yogyakarta.
- Kauchak, Donald P. & Eggen, Paul D., (1993). *Learning and Teaching, Research-Based Methods*. Boston: Allyn and Bacon.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Bahan Pelatihan Metodologi Belajar Mengajar Aktif*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan.
- _____. (2010). *Bahan Pelatihan Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum.
- _____. (2010). *Pembinaan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Kemendiknas.

- Ki Supriyoko. (2003). "Menuju Masyarakat Tertib Damai Salam Bahagia Sebagai Karakter Bangsa Masa Depan", *Makalah*. Disampaikan dalam Forum Sarasehan Kebudayaan. Yogyakarta: tanggal 19-20 Mei 2003.
- Koentjaraningrat. (2009). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. (2006). *Raja, Priyayi, dan Kawula: Surakarta 1900-1915*. Yogyakarta: Ombak.
- Lewis, K. (1996). *Character Education Manifesto*. New York: Boston University.
- Lickona, Thomas. (1992). *Educating for Character. How our Schools cans teach Respect and Responsibility*, New York: Bantam Books.
- Megawangi, Ratna, (2004) *Pendidikan Karakter Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*. Jakarta: BPMIGAS.
- Mulder, N. (1998). *Pribadi dan Masyarakat di Jawa: Penjelajahan mengenai Hubungannya*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Nata, A. (2009). *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Notonagoro. (1987). *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*. Cet. 9. Jakarta: Pantjoran Tujuh.
- Ormrod, J. (2008). *Human Learning* (5th ed.). New Jersey, NY: Pearson Education, Inc.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*.

- Poespowardojo, Soerjanto. (1986). "Pengertian Local Genius dan Relevansinya dalam Modernisasi". Dalam Ayatrohaedi (ed.), *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Quigley, C.N. dkk., (1991). *Civitas: A Framework for Civic Education*, Calabasas: Center for Civic Education.
- Rahmat, dkk. 2009. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Rukmana, H. (1990). *Butir-butir Budaya Jawa*. Jakarta: Yayasan Purna Bhakti Pertiwi.
- Samsuri, Samsuri. (2009). *Objektivikasi Pancasila sebagai Modal Sosial Warga Negara Demokratis dalam Pendidikan Kewarganegaraan*. ACTA CIVICUS, 2 (2). pp. 169-180. ISSN 1978-8428.
- Sapriya. (2008). "Perspektif Pemikiran Pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa (Sebuah Kajian Konseptual-Filosofis dalam Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan IPS". *Jurnal Acta Civicus*. "Vol" 1, (2). Bandung: UPI.
- Sedyawati, Edi. (2007). *Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*: Jakarta, Gramedia.
- Soegito, AT. (1999). "Sejarah Pergerakan Bangsa Sebagai Titik Tolak Memahami Asal Mula Pancasila" *Makalah Internship Dosen-Dosen Pancasila se Indonesia*. Yogyakarta.

- Sumarsono, dkk. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suparno, P. (2005). *Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suseno, Franz Magnis. (1996). *Etika Jawa, Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suyanto. (2003). *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium Ketiga*. Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa.
- Thobroni, M. & Arif, M., (2011:287). *Belajar dan Pembelajaran (Pengembangan Wacana dan Praktik Pembelajaran dalam Pembangunan Nasional)*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Tilaar, HAR. (2007). *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Penyusun. (2010). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah RI tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan serta Wajib Belajar. Bandung: Citra Umbara.
- Trianto. (2010). *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Winataputra, U.S. (1978). *A pilot Study of Implementation of the Area of Learning Moral Education of Pancasila in the 1975 SMA Curriculum in the Bandung Area (Postgraduate Project)* Sydney: Macquarie University.

- _____. (2005). *Konsep dan Strategi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi: Tinjauan Psiko-Pedagogis dan Sosio Andragogis*. Jakarta: Ditjen Pendidikan Tinggi (Bahan SUSCADOS Dikwar)
- _____. (2001). “Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi”. *Disertasi*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Wiriaatmadja, R. (2005). *Metode Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung: PPS UPI Bandung dan Remaja Rosdakarya.
- Wynne. B., 1992. *Public understanding of science research: new horizons or hall of mirrors*. Publie Undemanding of Science. 1.37-43. Lancaster University, Lancaster LA1 4YF, UK.
- Zuchdi, D. (2008). *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan yang Manusiawi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zuriah, N. (2010). “Model Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal dalam Fenomena Sosial Pasca Reformasi di Perguruan Tinggi”. *Laporan Penelitian Hibah Doktor - DP2M Dikti Diknas TA*. 2010.